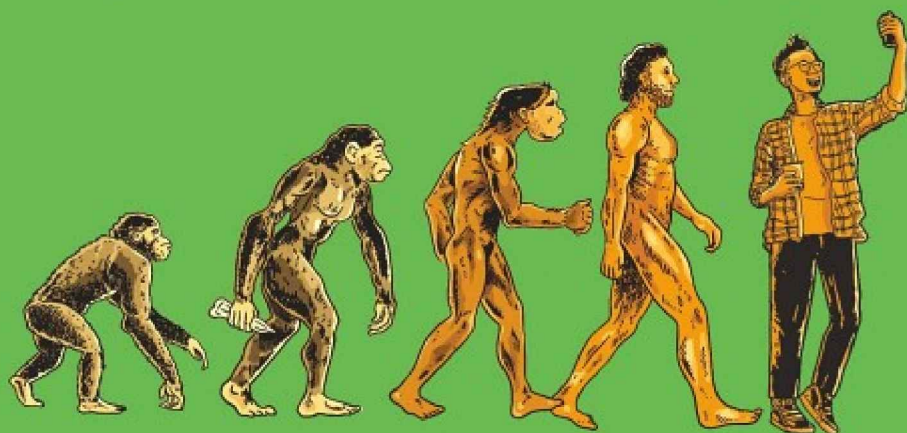


**IQBAL AJI DARYONO**

Praktisi Medsos Penuh Waktu



# SAPIENS



# DI UJUNG TANDUK

Pengantar

**Damar Juniarto**

Direktur Eksekutif dan *co-founder* SAFEnet  
Aktivis hak digital di kawasan Asia Tenggara

Dunia ini penuh dengan berbagai hal baru  
yang menantang untuk terus kita pelajari.

Terima kasih telah memilih buku ini  
dan menjadikannya sebagai bagian dari proses  
belajar yang tengah Anda jalani.

Salam hangat,  
Keluarga Bentang Pustaka

“Iqbal adalah salah seorang komentator sosial paling menyenangkan sekaligus menjengkelkan saat ini. Kita senang dengan gaya tulisannya yang jenaka, tapi juga jengkel karena kritiknya tentang ironi masyarakat digital, kok, banyak benarnya.”

—**Nezar Patria**, wartawan senior

“Berakrobat dengan diksi dan gagasan, serta dari sudut pandang yang tak biasa, IAD (Iqbal Aji Daryono) mengalirkan cerita sederhana aliran kali Ciliwung di musim hujan. Meliuk-liuk, kadang dalam, sesekali dangkal, tapi konsisten merontokkan sekat sumbatan kaku berkomunikasi pada era digital, IAD sukses menjadi episentrum perbincangam ragam karakter di media sosial tanpa syarat.”

—**Teguh Arifiyadi**, “pengendali tata kelola internet”, Kementerian Koinfno RI

“Iqbal Aji Daryono adalah jembatan dari dunia gagasan ke dunia ‘media baru’. Ide-ide besar yang lahir dari renungan serius, bisa dia sajikan dengan cara yang sangat renyah. Tulisannya membuat orang yang malas baca pun mau membaca. Dia seperti pengasuh yang bisa membujuk anak yang malas makan agar mau makan. Buku ini membuktikan hal itu sekali lagi.”

—**Abdul Gaffar Karim**, pengamat politik Universitas Gadjah Mada

“Dalam buku ini, Iqbal membawa kita dalam pengalaman yang cukup personal dan sehari-hari, tapi menyentil. Secara nakal dan terkadang komikal, kita diajak berefleksi tentang arsitektur kehidupan masa kini yang lebih banyak mempertemukan orang dalam ruang-ruang jagat maya dan digital.”

—**Irham Nur Anshari**, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada

Mari kita dukung hak cipta penulis dengan tidak menggandakan, memindai, atau mengedarkan sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin. Hak cipta bisa menjadi pendorong kreativitas penulis, penyebaran gagasan, dan penguatan nilai-nilai keberagaman. Terima kasih sudah membeli buku cetak/digital edisi resmi. Anda telah turut mendukung penulis dan penerbit agar terus berusaha membuat buku-buku terbaik bagi semua kalangan pembaca.

# **SAPIENS DI UJUNG TANDUK**

**IQBAL AJI DARYONO**



## **Sapiens di Ujung Tanduk**

Karya Iqbal Aji Daryono

Penyunting: Dhewiberta H.

Ilustrasi sampul: Ratotanggela

Perancang sampul: Labusiam

Pemeriksa aksara: Nurani

Penata aksara: Labusiam

Digitalisasi: Lian Kagura, Rakata

Edisi Digital, Juni 2022

ISBN 978-602-291-897-4

Diterbitkan oleh Penerbit Bentang

(PT Bentang Pustaka)

Anggota Ikapi

Jln. Palagan Tentara Pelajar No. 101, Jongkang, RT 004 RW 035, Sariharjo, Ngaglik, Sleman,  
Yogyakarta 55581

Telp.: 0274 - 2839636

Surel: [info@bentangpustaka.com](mailto:info@bentangpustaka.com)

Surel redaksi: [redaksi@bentangpustaka.com](mailto:redaksi@bentangpustaka.com)

<http://www.bentangpustaka.com>

Buku ini dipersembahkan  
untuk semua kolega medsos saya,  
baik kenal maupun  
tidak benar-benar kenal,  
baik real maupun *fake*,  
baik *lover* maupun *hater*,  
atas segenap diskusi, debat kusir,  
dan dinamika dunia komunikasi  
baru yang terus memperkaya  
khazanah kesadaran kita atas zaman  
yang juga membawa karakter baru.

# Netizen Indonesia sebagai Katak dalam Tempurung

**Oleh Damar Juniarto**

(Direktur Eksekutif dan *co-founder* SAFEnet,  
penasihat DigitalReach, aktivis hak digital di kawasan Asia Tenggara,  
penerima Anugerah Dewan Pers 2021, TC Changemakers 2021,  
Netizen Award Marketeers.com 2018, IVLP 2018:  
*Cyber Policy and Online Freedom of Expression*)

**S**ehari sebelum acara Forum Tata Kelola Internet Sedunia (*Internet Governance Forum*) 2019 di Kota Berlin, Jerman, dimulai, saya membaca opini yang ditulis Tim Berners-Lee, pencipta World Wide Web—internet yang kita kenal sekarang. Tim menulis “*I Invented the World Wide Web. Here’s How We Can Fix It*” di media *New York Times*. Ia berharap setelah 30 tahun penemuannya, kita akan menggunakan internet terutama untuk tujuan melayani umat manusia. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Masyarakat telah dicabik-cabik karena prasangka dan kebencian, disinformasi dijajakan secara daring. Para penipu menggunakan internet untuk mencuri identitas, penguntit menggunakannya untuk merisak dan mengintimidasi korban mereka, dan aktor jahat menumbangkan demokrasi menggunakan taktik digital yang canggih.

Menurutnya, internet yang diciptakannya telah rusak dan butuh diperbaiki. Karenanya, ia berpendapat internet butuh diintervensi secara radikal oleh semua orang yang memiliki kekuasaan atas masa depannya: pemerintah yang dapat membuat undang-undang dan mengatur, korporasi teknologi yang merancang produk; kelompok masyarakat sipil dan aktivis yang meminta pertanggungjawaban pihak yang berkuasa; dan setiap pengguna Internet yang berinteraksi dengan orang lain secara daring.

Tim sendiri sebagai pencipta juga bertekad memperbaiki dengan langkah membuat *Contract for the Web*. *Contract for the Web* adalah



rencana aksi global yang dibuat para aktivis, akademisi, perusahaan, pemerintah, dan warga dari seluruh dunia untuk memastikan dunia daring kita aman, memberdayakan, dan benar-benar untuk semua orang. Kontrak tersebut menguraikan langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan internet dan informasi penggunaannya yang disengaja.

Saya tidak tahu apakah opini Tim bahwa internet yang diciptakannya rusak dan butuh diperbaiki itu diketahui oleh ratusan juta pengguna Facebook, puluhan juta pengguna Twitter, dan beragam media sosial di Indonesia. Bisa jadi opininya tenggelam oleh keriuhan kontestasi pasca-pilpres 2019 dan ketegangan di Papua. Ketegangan yang saya maksud adalah pemadaman internet di Papua dan Papua Barat yang dimulai pertengahan Agustus dan baru benar-benar berakhir Oktober 2019.

Perbincangan tentang *human-centered approach technology* atau teknologi untuk kemanusiaan menjadi bintang utara yang menjadi kiblat perkembangan teknologi internet di berbagai belahan dunia. Namun, sepertinya perbincangan ini tak terjadi di Indonesia. Mengapa bisa demikian?

Padahal, gelombang kritik pada internet ini sudah terjadi cukup lama. Setelah terungkapnya skandal Cambridge Analytica pada Pilpres AS tahun 2016, sudah terjadi desakan global untuk memperbaiki internet. Salah satu gerakan yang saya aktif terlibat adalah #DearMark Fix Facebook yang diarahkan pada pencipta sekaligus miliarder Mark Zuckerberg untuk memperbaiki Facebook. Persoalan iklan politik tanpa pembatasan, polarisasi opini akibat algoritma media sosial, *surveillance marketing*, gelombang disinformasi dan genosida oleh rezim otoriter Myanmar pada suku bangsa Rohingya menjadi isu yang melatari gerakan *Global South Coalition* ini. Namun, sama seperti tenggelamnya opini Tim, kritik atas rusaknya Facebook ini sepertinya tidak diketahui oleh penggunaannya di Indonesia.

Kenyataannya, pengguna internet seperti terlalu terikat pada Facebook sehingga bahkan tak pernah mempertimbangkan untuk keluar dari Facebook. Kita mungkin khawatir dan mengeluh tentang penyalahgunaan data oleh Facebook, tapi dengan cepat kita kembali menyambar ponsel dan membaca informasi di dinding Facebook kita, seperti takut ketinggalan berita. Facebook adalah aplikasi yang kali pertama kita buka pada pagi hari, ketika kita bosan, belajar, ketika kita ingin berbicara dengan teman, membaca berita, mencari bisnis, dan ratusan lainnya. Itu telah menjadi bagian intrinsik dari gaya hidup kita. Kita di Indonesia mungkin tidak terlalu peduli juga pada isu Tata

Dunia yang baru, *Future of Work*, persoalan etik pada Kecerdasan Buatan yang dikhawatirkan akan menyingkirkan dan pada gilirannya menggantikan umat manusia. Kita sepertinya tidak ambil pusing apakah teknologi internet ini rusak dan perlu diperbaiki. Mungkin bagi kita, teknologi ini dianggap sudah sempurna dan paripurna? Tampaknya bagi *netizen* Indonesia, urusan internet hanyalah seluas jagat medsos. *Bagai katak dalam tempurung*, asal internet masih bisa dipakai berselancar, habis perkara.

Di manakah posisi *netizen* (baca: manusia) Indonesia dalam situasi tadi?

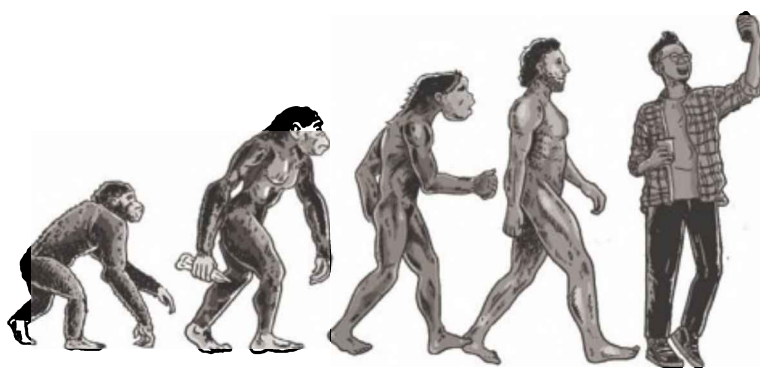
Jawabannya dapat ditemukan dalam kumpulan tulisan Iqbal Aji Daryono ini. Karya *Sapiens di Ujung Tanduk* ini mampu memotret manusia Indonesia di tengah hiruk-pikuk informasi. Seperti kebanyakan manusia Indonesia kiwari, Iqbal hidup di dua dunia: di dunia nyata dan digital. Ia mengakui, "Facebook adalah dunia saya yang kedua setelah keluarga." Kebanyakan tulisannya menuturkan tentang manusia di tengah tegangan antara modernitas dan tradisional, antara angkringan dan kafe, teman sungguhan dan teman medsos, Facebook dan keluarga. Pandangannya bahwa media sosial adalah angkringan 4.0 adalah alusi yang saya yakin dipercaya oleh banyak pengguna internet di Indonesia yang ingin agar media sosial seperti angkringan, tempat sosialisasi antarwarga dan jadi simbol egaliter antarwarga masyarakat, antarmanusia. Meskipun menurut saya, media sosial itu tempat baku hantam antarwarga dan arena adu kuasa antara dua gajah: negara dan korporasi. *Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah*. Di tengah negara dan korporasi bertarung kuasa, para pengguna terjepit di antaranya. Boro-boro mau enak *ngangkring*, mau sambat saja dihantui UU ITE.

Denpasar, 21 Maret 2022

# Daftar Isi

Netizen Indonesia bagai Katak dalam Tempurung  
Dari Angkringan ke Medsos  
Teman Medsos yang Bukan Teman  
Pakewuh Digital  
Hilangnya Separuh Diri Kita  
Bicara atau Dosa!  
Sang Perampas Kemerdekaan  
Kepraktisan Abal-Abal  
Mabuk Webinar  
Arogansi Pakar Medsos  
Literasi Media yang Terlupa  
Orang Pintar, Menulislah di Ruang Digital!  
Bu Guru Penggemar Viral  
Lagi-Lagi Kebelet Viral  
“Terforsir Aplikasi” dan Jiwa Kehumasan Kita  
Ketika Gambar-Gambar Diblokir  
Share Loc yang Mengubah Wajah Kita  
Nggak Viral, Nggak Ditindak?  
Membela Buzzer  
Korban-Korban Echo Chamber  
Tukang Palak Digital  
Menatap Kuburan Televisi  
Tak Perlu Lagi Ada Idola di Antara Kita  
Oligarki YouTuber  
YouTuber Pembela Petani  
Selebgram vs Penulis

YouTuber dan Tewasnya Informasi  
Hikmah Masa Corona  
Kearifan Generasi Baru  
Ruang-Ruang yang Tak Lagi Dicintai  
B Aja, Tak Lagi Istimewa  
Tentang Penulis



## Dari Angkringan ke Medsos

**S**udah lama saya melirik warung angkringan di depan gereja itu. Tiap pagi saat saya melintas sepulang mengantarkan anak ke sekolah, tempat itu selalu riuh. Bukan jenis keriuhan sebagaimana orang berbelanja makanan sambil terburu-buru, melainkan keriuhan yang tenang, hangat, penuh perbincangan.

Orang-orang itu duduk mengelilingi meja memanjang. Di hadapan mereka tampak gelas teh poci, kopi susu, atau minuman yang lain. Asap tembakau sesekali mengepul, di sela bibir mereka yang tertawa atau berceramah entah apa.

Ketika akhirnya saya sempat mampir, terbuktilah kesan selintas yang selalu saya tangkap itu.

Sembari menyesap teh panas yang saya pesan, tak sampai dua batang rokok saya habiskan, sudah saya telan sejilid tebal cerita. Bahwa lelaki di hadapan saya adalah pedagang gas “melon” yang berkeliling ke warung-warung setiap pagi. Bahwa teman-teman nongkrong lainnya adalah tukang becak, sopir ojek, juga pekerja serabutan macam-macam. Bahwa sebagian di antara mereka nongkrong di situ sejak 1996, sejak perjaka hingga bercucu. Bahwa selama mereka nongkrong di situ “anggota” mereka datang dan pergi, juga sudah ada dua puluhan

teman yang meninggal.

Juga bahwa mereka merasakan kondisi ekonomi yang, menurut mereka, sejelek apa pun tetap saja membaik. “*Obah mamah* itu ya sekarang, Mas. Kalau mau kerja, sedikit banyak ada hasilnya. Lha kalau dulu, sudah *obah* pun belum tentu *mamah*.”

*Obah mamah* adalah konsep dalam tradisi Jawa. *Obah* adalah ‘bergerak’, *mamah* adalah ‘mengunyah’. Artinya, siapa pun yang mau bekerja akan bisa makan. Boleh saja Anda yang kritis-kritis itu tidak sepakat dengan Mas Tukang Becak yang menyatakan itu tadi. Tapi, memang itulah yang dia katakan, dan sebenarnya bukan soal-soal begitu pula yang di tulisan ini saya ingin ceritakan.

Saya cuma mau menggambarkan hal sederhana, yaitu bahwa di warung-warung angkringan tercipta interaksi merdeka, tanpa sekat-sekat sosial, perbincangan yang hangat dan menyenangkan, bahkan di antara orang-orang yang sebenarnya tidak saling mengenal.

Buktinya, setelah satu jam lebih percakapan berjalan dan saya harus segera pulang, barulah seorang bapak berumur 60-an tahun di hadapan saya bertanya, “*Njenengan asmane sinten*, Mas? Namanya siapa, Mas? Tinggal di mana?”

Kita tidak mungkin mengalami model interaksi seperti itu di restoran, misalnya. Atau di kafe-kafe. Di kafe kita bisa saja nongkrong lama, berjam-jam dari sore sampai dini hari. Tapi, yang kita ajak berbincang ya teman-teman sendiri, yang memang sudah janji nongkrong sejak semula. Kalaulah Anda bisa mengobrol dengan orang-orang di meja sebelah, kemungkinan semacam itu saya kira cuma satu banding seratus, atau bahkan banding lima ratus.

Kenapa angkringan beda? Jawabannya terletak pada arsitektur interiornya. Bangku-bangku yang panjang, tempat orang-orang duduk bergabung bersama siapa pun yang ada, bukan dengan kursi-kursi yang terpisah dan menciptakan “jarak sosial”, adalah penjelasan dari atmosfer komunikasi sebagaimana yang saya gambarkan di atas tadi.

\*\*\*

Arsitektur memang menciptakan dan menentukan karakter budaya, pola interaksi, bahkan struktur sosial. Dalam buku *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas*, Profesor Kuntowijoyo pun menyinggung hal

itu. Dia membandingkan antara rumah joglo Jawa dan rumah *gedhong* alias rumah batu modern.

Dalam rumah joglo, ada ruangan-ruangan berkonsep khas yang sangat terkait dengan pandangan dunia spiritual Jawa. Ada *pendhapa* (beranda), *pringgitan* (ruang antara), *dalem* (ruang santai keluarga), *senthong* (ruang dalam), *gandhok* (ruang berangin-angin), dan seterusnya. Bapak-ibu tidur di *senthong*, anak-anak tidur beramai-ramai di *dalem* yang terbuka itu.

Dengan penataan ruangan ala joglo, orang tua bisa setiap saat mengawasi anak-anak mereka. Itulah kenapa sifat keluarga Jawa adalah *parent-centered family*, keluarga yang berpusat pada orang tua. Karakter ini bisa berkembang lebih jauh lagi dalam hampir segala hal. Makanan terenak disajikan untuk bapak, anak-anak menikah dengan jodoh pilihan orang tua, dan sebagainya. Hasilnya, tradisi paternalisme tumbuh dari rumah-rumah Jawa klasik.

Iklim semacam itu beda dengan keluarga yang tinggal di rumah-rumah *gedhong* atau rumah modern yang menjamur sejak 1950-an. Rumah modern tidak dibangun berlandaskan konsep mistis apa pun, selain kebutuhan praktis. Tak ada aturan harus menghadap ke utara atau selatan, misalnya. Yang diperlukan hanyalah menghadap ke jalan, mau ke arah mana pun itu.

Kepraktisan pula yang melandasi pembagian ruangan di dalam. Tak ada kekhususan ini-itu. Orang tua dan anak-anak bebas memakai kamar mana saja, tak ada ruang terbuka tempat orang tua bisa mengawasi anak-anak mereka dalam sekali pandang, dan tak usah menunggu menikah pun anak-anak sudah bisa mendapatkan kamar mereka sendiri.

Dalam rumah *gedhong* begini, karakter yang ditumbuhkan adalah *child-centered family*. Anak-anak mendapatkan fasilitas terbaik. Ada makanan dan minuman khusus anak, ada bacaan untuk anak-anak, dan sebagainya. Yang terbaik bukan lagi dikuasai orang tua, khususnya bapak, melainkan untuk anak-anak. Tiba waktunya anak-anak menikah, mereka pun mencari pasangan hidup sendiri, bukan lagi hasil pilihan tak terbantahkan dari orang tua.

Hasilnya, tradisi yang lahir dari rumah-rumah *gedhong* adalah demokrasi, bukan lagi paternalisme. Setidaknya, seperti itulah pembacaan Pak Kuntowijoyo.

Apakah keterbukaan dan kesetaraan selalu melahirkan kultur demokratis? Saya sempat tergoda menyimpulkan itu, setelah membandingkan antara angkringan dan rumah *gedhong*. Kesetaraan dalam rumah batu modern, juga keterbukaan yang tidak dibekali dengan hierarki apa pun sebagaimana di angkringan, terbukti membentuk karakter-karakter manusia yang egaliter.

Akan tetapi, tiba-tiba saya meragukannya karena teringat model angkringan pada era digital. Angkringan 4.0 itu bernama media sosial, tentu saja.

“Arsitektur” media sosial sesungguhnya sangat mirip dengan arsitektur interior angkringan. Tak ada sekat-sekat di sana. Orang “duduk dan berkerumun” dengan bebas, tak ada jarak sosial maupun jarak psikologis, dan orang yang tidak saling mengenal pun bisa saling berbincang dengan riuhnya. Kita dan teman-teman medsos kita tak bedanya dengan saya dan pedagang gas “melon” yang rutin nongkrong di angkringan depan gereja sejak 23 tahun lalu itu.

Masalahnya, iklim yang seharusnya demokratis di dalam bangunan bernama medsos itu ternyata justru bergeser jadi anarkis. Orang bukan cuma bebas berbincang dengan siapa pun, tetapi (merasa) bebas pula memaki siapa pun. Orang bukan hanya merdeka tertawa bersama orang lain tanpa harus saling mengenal, tetapi (merasa) merdeka pula mentertawakan orang-orang yang tidak dikenal, persis di depan hidung mereka.

Saya sendiri sering iseng melakukan eksperimen sosial untuk membuktikan hal-hal semacam itu. Contoh kecil, kemarin akun media sosial sebuah koran daring memberitakan kisah terdamparnya ribuan *penis fish* di California. Itu ikan berbentuk mirip alat kelamin laki-laki. Saya pun menaruh komentar di kolom komennya. “Inilah tanda-tanda akhir zaman, peringatan Tuhan agar manusia Amerika lebih menjaga kelamin mereka.”

Hanya selang dua-tiga menit, bermunculanlah komen-komen balasan yang dahsyat-dahsyat. Satu yang terdahsyat berteriak, “Lu kalo habis *ngaibon* jangan komen, daaah! Itu ikan, Druuun, ikan! Kalo lu goblok jangan kelewatan juga, Druuun!!!”

Saya mengingat-ingat apakah saya memang habis *ngaibon*. Ternyata tidak, dan saya berani bersumpah memang tidak. Maka saya ingin



bertanya saja, mungkinkah kalimat segalak di komen itu muncul di angkringan, meskipun yang kita ajak bicara juga orang-orang yang tidak kita kenal, dan sama-sama tak ada urusan apa pun dengan kehidupan kita?

Tentu tidak. Kenapa? Apakah semata karena di angkringan ada kemungkinan orang yang kita damprat bisa seketika menyambar ceret panas lantas menuangkan isinya ke mulut kita, sedangkan di media sosial tidak? Belum tentu juga, saya rasa, sebab toh risiko-risiko konkret akibat celetukan di media sosial sudah berkali-kali kita saksikan.

Yang terjadi lebih karena kita, tanpa sadar, merasa impersonal. Akun kita jelas, nama dan identitas kita juga sering jelas, tetapi ada bias ilusi yang membuat kita di media sosial seolah-olah merasa bukan manusia. Kita merasa seperti sedang memainkan saja tokoh-tokoh dalam *game online* yang menembaki musuh-musuh yang juga sama-sama bidak *online*, padahal sebenarnya yang sedang kita gerakkan adalah akun riil dengan nama kita. Anda pernah merasakannya?

Itulah sebenarnya akar segala kekacauan di media sosial. Bukan kurangnya kesadaran-kesadaran kognitif, apalagi sekadar minimnya pemahaman-pemahaman hukum ITE.

\*\*\*

Sudah beberapa kali saya diminta berbagi di beberapa institusi, mulai sipil hingga tentara. Kantor-kantor itu ingin agar anggota dan para staf mereka benar-benar diberi pemahaman tentang peta *chaos* di medan digital, khususnya media sosial. Kasus persekusi *online*, kasus istri perwira<sup>1</sup> yang itu, juga kasus-kasus lainnya, kerap membuat mereka kehabisan akal bagaimana mengelola dan mengantisipasi segalanya.

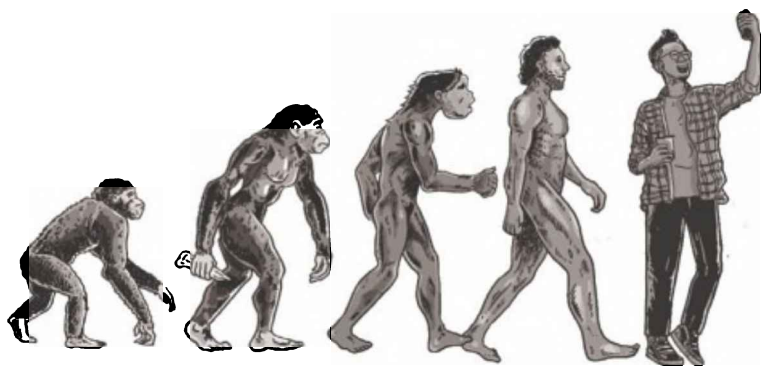
Selama itu pula saya menjelaskan dengan sangat kognitif. Tentang *impersonality*, *echo chamber*, *filter bubble*, *click culture*, juga permainan emosi publik digital demi kepentingan para pedagang politik dan pedagang isu.

Saya lupa, bahwa sebenarnya terapi psikologis bisa dijalankan dengan sangat sederhana, untuk mengembalikan impersonalitas menjadi personalitas, untuk memulihkan dehumanisasi menjadi humanisasi: sering-seringlah nongkrong di warung angkringan ala Jogja.

□

-----

<sup>1</sup> Pada 2019 Dandim 147/Kendari, Kolonel Kavaleri Hendi Suhendi, dicopot dari jabatannya karena *posting*-an istrinya, Irma Zulkifli Nasution, yang mengomentari penusukan Menko Polhukam Wiranto.



## Teman Medsos yang Bukan Teman

**P**ekan lalu, pagi-pagi sekali beberapa orang menggedor-gedor pintu *inbox* saya. Tanpa peduli bahwa jam segitu adalah jadwal saya mulai merebahkan badan setelah semalaman nonton film tembak-tembakan, mereka mencecar sambil meminta semacam pertanggungjawaban atas sebuah dosa yang rasa-rasanya tidak saya lakukan.

“Tuh, lihat temanmu, *Bro*. Kelakuannya macam gitu.”

*Ha? Yang mana?* Saya bingung. Lalu, semua pengirim pesan seperti bergerak dalam satu komando yang sama, yaitu menyodorkan tangkapan layar sebuah dialog di Facebook. Saya membacanya, dan memang orang yang disebut-sebut sebagai teman saya itu menuliskan komentar yang sangat tidak pantas menurut ukuran moralitas dan etika manusia waras.

Tentang ketidakpantasan itu tak perlu debat berpanjang-panjang. Sudah jelas tidak pantas. Yang perlu diperdebatkan adalah predikat “temannya Iqbal”. Saya segera menjawab, “Iya, dia memang teman alias *friend* Facebook-ku. Tapi, apa kalian kira otomatis dia berteman beneran sama aku?”

Sebenarnya saya kurang nyaman juga menjawab dengan cara begitu. Seolah-olah saya sebangsa pengecut yang tiba-tiba cuci tangan

saat ketahuan dekat dengan seseorang yang kena kasus. Masalahnya, ya itu tadi, dia bukan teman saya “beneran”. Ketemu muka tidak pernah, rumahnya di mana juga tidak tahu, lingkaran pergaulan dia orang-orang seperti apa saya pun tak paham.

“Lho, tapi aku lihat di profilnya dia orang Bantul, *Bro!* Tetanggamu, kan?”

Waduh. Langsung saya jelaskan, populasi penduduk Bantul itu hampir satu juta orang. Saya bahkan tidak yakin apakah saya mengenal satu persen di antaranya. Bahwa KTP kami sama-sama Bantul, mungkin iya. Tapi, itu kan urusan Disdukcapil dan kantor kelurahan saja, *to?* Bakalan sedikit beda penjelasannya kalau saya ini Bupati Bantul. Tentu saya sebagai pemimpin yang jujur, amanah, dan siap berkorban demi rakyat, akan merasa mengemban tanggung jawab untuk mengontrol akhlak seluruh rakyat saya (ini bukan kampanye, saya tidak berminat jadi bupati).

Ketika melontarkan jawaban-jawaban itu, diam-diam saya masih berpikir agak keras, bahkan kadang kala ragu juga dengan jawaban saya sendiri. Apakah benar hanya karena berteman di medsos dengan seseorang, lantas kita turut menanggung segenap amal perbuatan yang dilakukan “teman” kita itu?

Ya kalau teman medsos yang berlanjut ke kopdar, nongkrong, *selfie-selfie* bareng, dan foto *selfie* itu saya pajang berkali-kali, sepertinya lumayan wajar orang-orang menganggap kami berteman sungguhan. Sementara, yang namanya teman sungguhan sedikit banyak punya beban moral untuk mengingatkan temannya yang kebablasan. Masalahnya, ini teman medsos. Dan, teman medsos itu ternyata tak selalu merupakan teman sungguhan.

Di sisi lain, saya pun tidak bisa utuh-utuh menyalahkan orang-orang yang meminta klarifikasi saya terkait dosa “teman” saya. Sebab, ketika akun si pecundang itu dibuka oleh banyak orang, nama dan foto saya yang beraura terang benderang langsung nongol sebagai teman dia. Otomatis, sayalah yang tampil mencolok di hadapan para *stalker* itu.

Sampai kemudian ketemulah titik kunci miskomunikasinya. Ini tentang bagaimana kita menghadapi suatu ruang dengan suatu *mindset*. Pendek kata, kita ini nyebur ke sebuah dunia yang relatif baru, yang berbeda dengan dunia sebelumnya. Agar bisa lebih *kaffah* dengan dunia baru ini, semestinya cara pandang dan cara berpikir juga kita sesuaikan.

Di dunia lama, kita punya teman-teman yang riil. Tapi, kadang kala

kita juga nongkrong di warung kopi atau angkringan, ngobrol dengan sembarang orang yang tidak sungguh-sungguh kita kenal, tanpa harus menobatkan mereka sebagai teman.

Di dunia baru, warung kopi dan angkringan itu beralih wujud menjadi media sosial. Di situ kita bisa bebas berbincang dan berkelahi dengan siapa saja, bebas menguping siapa saja, tanpa harus secara sungguh-sungguh menyebut kawan berbincang dan bergelut kita itu sebagai teman betulan.

Makanya, saya pribadi senang nge-*add friend* berbagai jenis manusia, dan menerima permintaan pertemanan dari berbagai tipe manusia pula. Kadang orang-orang alias akun-akun yang berbeda pandangan dengan saya malah saya ajak “berteman”. Alasan saya minimal ada tiga.

*Pertama*, demi kesehatan jiwa saya sendiri. Saya kepingin informasi dan sudut pandang yang berseliweran di lini masa saya lebih berwarna, tidak tunggal belaka. Kita tahu, algoritma medsos acapkali membuat kita terperangkap dalam nada tunggal suara-suara. Makin monoton suara yang kita simak, makin sempit pandangan kita di ruang yang seharusnya lapang luar biasa.

*Kedua*, saya ini penulis, butuh objek berupa fenomena-fenomena untuk diolah dan diinterpretasi, dan medsos menyediakan bahan yang banyak sekali. Sangat keliru kalau melihat medsos sebatas sebagai media sebab ia sudah menjadi laboratorium sosial raksasa. Kalau membatasi diri untuk berteman hanya dengan teman-teman “sungguhan”, kesempatan untuk menyimak isi kepala jutaan orang akan terlewatkan.

*Ketiga*, saya juga pedagang. Bukan cuma pedagang isu, tapi juga pedagang buku. Semakin luas lingkaran koneksi digital yang saya bangun, semakin laris buku-buku saya, dan semakin tinggi pula kapital yang menggunung di rekening saya. Masa gitu aja, kok, nggak paham. Hahaha. (Halo, Kantor Pajak!)

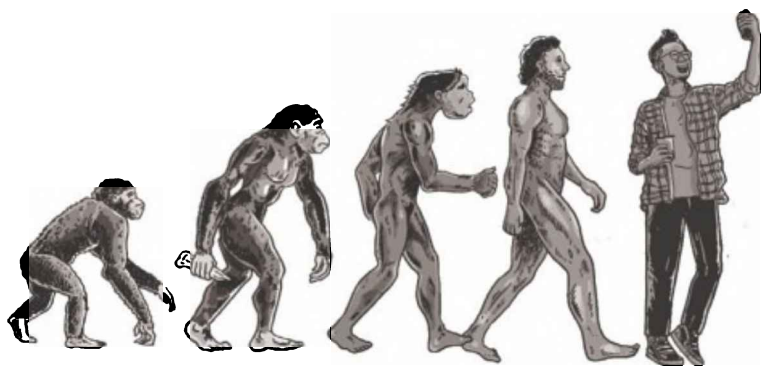
Ringkasnya, ada banyak karakter dan pola yang berubah dari cara berteman kita, dari zaman analog ke zaman digital. Menghadapi ruang digital dengan otak analog akan membuat kita kehilangan banyak kesempatan, dan menjadikan kita tidak beranjak ke mana-mana.

Sialnya, tidak semua orang adalah penulis sekaligus pedagang seperti saya. Maka, ketika mencoba menasihati teman-teman medsos saya untuk mengubah *mindset* saat nyemplung ke dunia baru,

memangnya saya ini siapa? *Lha wong* teman mereka beneran juga bukan. Ya suka-suka mereka sendiri, lah!

Meski demikian, saya berharap ada orang berkirim pesan ke *inbox* mereka. “Sis, temanmu itu, kok, sok-sokan banget, sih? Ngatur-ngatur orang pakai teori ini-itu, macam jagoan aja.”

Dan, yang dikirim pesan akan geragapan. “Lho lho lho! Sebentar. Iqbal itu memang teman Facebook-ku. Tapi, kan, bukan teman beneran, *Bro ....*”□



## Pakewuh Digital

**S**ahabat saya, sebut saja namanya Uda Brewok, siang itu *hepi* sekali. Memang saya tidak melihat langsung raut wajahnya, tapi sangat bisa merasakannya dengan membaca tulisan yang dia unggah pada dinding Facebook-nya.

Jadi, ceritanya Uda Brewok mengagumi seorang ulama besar. Ulama ini bukan kaleng-kaleng, bukan produk YouTube atau teve, dan kredibilitas ilmu serta kezuhudannya tak diragukan lagi.

Maka, betapa pantas si Uda *njenggirat* kaget campur berbunga-bunga, ketika tiba-tiba melihat Mbah Kiai meminta pertemanan Facebook dengan dirinya!

“Ya Allah, aku sampai loncat dari kursi begitu melihat nama beliau di *list* pengajuan pertemanan. Tentu saja langsung kukonfirmasi. Sungguh ini berkah Jumat yang paling membahagiakan,” begitu tulisnya.

Terus terang, saya pun merasa iri dengan anugerah itu. Sampai kemudian saya melihat ada yang berubah pada tampilan Facebook si Uda.

Sebelum-sebelumnya, ada satu foto yang muncul berulang kali di dinding Facebook Uda. Foto itu agak bikin gimana, gitu. Saya sendiri yang menjepretnya, waktu kami sedang jalan-jalan ke Madura.

Dalam foto itu, Uda berposisi memandang ke sebuah titik. Sial buat

dia, pose itu dilakukannya di depan sebuah toko pakaian dalam wanita. Maka, ketika saya memencet kamera diam-diam, sengaja saya posisikan si Uda tengah memandangi jejeran kutang yang bergelantungan.

Foto itu pun dikopi oleh teman-teman lain, dan muncul berkali-kali dalam berbagai unggahan dan aneka *caption*. Bahkan, akhirnya Uda Brewok sendiri berkali-kali mem-*posting*-nya ulang, dalam berbagai konteks, dalam banyak cerita.

Nah, tapi ternyata kisah itu ada akhirnya. Dan, itu terjadi sejak FB Uda berteman dengan FB Mbah Kiai.

Foto legendaris itu memang kembali muncul. Ada cerita baru yang diunggah Uda, lagi-lagi dengan foto itu sebagai ilustrasi. Tapi yang mengejutkan, gambar kutang bergelantungan tak tampak lagi! Ya, Uda telah menge-*crop* foto itu sehingga jadi jauh lebih sopan, jauh lebih *civilized*, dan tidak menciptakan efek kecanggungan yang bukan-bukan.

Saya menduga keras, semua itu terjadi karena Uda merasa sudah ada Mbah Kiai di daftar pertemanannya. Pasti setiap kali membuat unggahan, dia akan bertanya-tanya: *Simbah lihat tidak, ya? Waduh, kalau beliau lihat gimana? Jangan-jangan nanti aku kena tegur. Ah, enggak juga, sih. Beliau bukan tipe seperti itu. Tapi, gimanapun kan ya bikin aku malu. Belum lagi kalau Mbah Kiai kepingin komen di wall-ku, tapi malah batal cuma gara-gara enggan muncul di tempat yang sama dengan kutang-kutang koleksiku!*

Semua itu memang cuma dugaan saya. Tapi, dugaan itu terasa sangat masuk akal. Bahwa Mbah Kiai hanya salah satu saja di antara ribuan temannya, bahwa mayoritas teman *online* si Uda pasti lebih cocok dengan selera foto kutangnya, itu memang benar. Tapi, kekuatan kesungkunan di hadapan seorang ulama besar pasti berlipat-lipat lebih determinan daripada di depan ribuan temannya yang tak berguna itu.

Kesungkunan. Saya kira, itu sisi yang selama ini seolah dianggap tak lagi penting-penting amat dalam obrolan tentang komunikasi di alam digital. Manusia semakin impersonal, imaji anonimitas berkuasa, sikap-sikap impulsif yang mengabaikan batas-batas kepantasan sosial bermunculan dengan mudahnya.

Maka, klaim dan citra bahwa mayoritas masyarakat Amerika sangat demokratis, menjunjung tinggi HAM, sudah lupa dengan pandangan dunia yang berbasis warna kulit, dan sebagainya, termentahkan justru dengan telusuran *big data* yang mengungkap betapa lontaran-lontaran



rasis di ruang digital sedemikian masifnya. Maka, populisme kanan menyembul ke permukaan. Maka, Trump waktu itu menang.

Setidaknya, itulah yang selintas diceritakan Seth Stephens-Davidowitz dalam bukunya, *Everybody Lies*.

Di kiri-kanan kita sendiri, kita pun sempat melihat gelaran pertunjukan semacam itu dalam skala yang nyaris mengerikan. Teman lama yang bertahun-tahun tampak anteng-anteng saja tiba-tiba bisa menjadi beringas di akun Twitter-nya. Tetangga yang kita kenal sangat kalem mendadak kita pergoki menjadi predator yang sikat sana embat sini, seolah lupa bahwa yang mereka gebuki di alam *online* itu adalah kawan-kawan sendiri.

Lalu, di manakah perasaaan sungkan itu tertinggal?

Ternyata, ia tercecce di ceruk-ceruk ruang yang sebenarnya masih tersisa untuk kemanusiaan kita. *Big data* memang ada, impersonalitas memang ada, tapi pertemanan dan sikap takzim masih menjadi realitas yang tak bisa kita abaikan begitu saja. Sering kali ia memang tercampakkan, tapi tiba-tiba pada suatu pagi ia menjadi pertimbangan tunggal saat kita ingin melontarkan celetukan di layar HP yang bisa membawa konsekuensi macam-macam.

Saya jadi ingat diri saya sendiri. Dulu kala, saya sering menulis kritik kepada Muhammadiyah dan kepada perilaku segenap warga yang bernaung di bawahnya. Saya berani melakukan itu karena dua hal. *Pertama*, secara genetis dan kultural saya juga warga Muhammadiyah. Jadi, apa yang saya lakukan itu semacam autokritik. Tapi yang *kedua*, sepertinya saya bisa plong tanpa beban karena saya tidak cukup kenal para aktivis struktural Muhammadiyah.

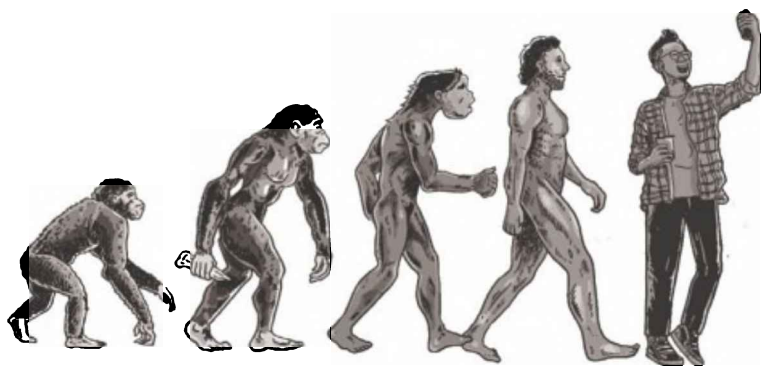
Begitu tulisan kritik saya kepada Muhammadiyah sering ramai, belakangan saya malah jadi bergaul dekat dengan banyak pegiatnya. Walhasil, lingkaran Muhammadiyah-struktural jadi salah satu lingkaran daring paling dominan di sekeliling saya. Hasil lebih jauhnya, saya jadi tak berani lagi asal mangap mengkritik Muhammadiyah.

Lucu, kan? Memang lucu. Padahal, belum tentu juga tulisan atau *posting*-an saya dibaca oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi setidaknya, dengan kesadaran-kognitif bahwa ada banyak orang Muhammadiyah yang ada di dalam *filter bubble* saya, muncul imajinasi-afektif (kalau boleh saya katakan begitu) yang mengontrol saya, bahkan ketika sebenarnya mereka tidak melakukan kontrol sama sekali, atau bahkan ketika sebenarnya mereka *blas* tidak peduli.

Bolehlah kemudian kita bawa-bawa nama Foucault di sini. Pilihan pertemanan digital kita, juga pilihan kita untuk menerima teman-teman tertentu, adalah keputusan untuk menciptakan penjara *panopticon* bagi diri kita sendiri. Kita menyerahkan diri untuk diawasi, tapi juga memasrahkan diri untuk merasa-diawasi bahkan ketika sebenarnya sedikit pun kita tidak sedang diawasi.

Ketika sampai di pemahaman ini, ingin saya kembali mengintip unggahan Facebook Uda Brewok. Jangan-jangan sekarang dia *posting* foto sedang mengaji kitab kuning, atau duduk wirid sambil menggenggam untaian tasbih besar-besar. Kalau benar begitu, ingin saya iseng menaruh komen di *wall*-nya, “Udaaa, kutangnya manaaa?”

Tapi, kemudian saya urungkan niat licik saya. Sebab, mendadak saya ingat bahwa saya berteman dengan akun adik saya, dan akun adik saya itu dipegang emak saya. Dan saya pikir-pikir, ngoceh tentang kutang sambil diawasi emak saya itu rasanya kok ya, aduh, agak-agak gimana.[]



## Hilangnya Separuh Diri Kita

**S**aya yakin malam tadi ribuan orang panik. Akun Facebook mereka tidak bisa dibuka. Ketika jempol digeser ke Instagram, situasinya sama saja. Maka, segera mereka ingin mencari kejelasan, dengan bertanya kepada siapa pun terkait kondisi darurat itu. Nah, dipencetlah logo hijau WhatsApp di layar HP. Tapi sungguh sial, WhatsApp sepi sekali. Saat dijajal kirim pesan pun, kiriman itu macet, dengan tanda centang yang tak kunjung nongol.

Kemudian muncul berita di media-media *online* yang berkabar bahwa ketiga medsos itu sedang *down* dan tak dapat diakses. Informasi itu memang membikin segalanya jadi lebih terang. Tetapi, orang-orang tidak semata-mata mencari terang. Mereka butuh berbicara.

Masalahnya, berbicara lewat apa? Akun Twitter lama tak dirawat, akun TikTok belum punya. Mau menelepon pakai jalur seluler? Duh, pulsanya yang nggak ada. Akibatnya, tak ada yang dapat dilakukan selain menonton kanal YouTube Baim Wong atau Dinar Candy, sembari tepekur nelangsa karena tak mampu berbuat apa-apa.

Ah, medsos memang sudah lama merampas sebagian diri kita. Kita dengan ikhlas menyerahkan separuh eksistensi kita kepada medsos. Tanpa medsos, tanpa akun medsos, agaknya kita sekarang tak lagi

merasa utuh sebagai manusia.

Berkali-kali saya menemukan adegan yang menunjukkan peta zaman seperti itu. Setidaknya, sudah lebih dari lima kali saya mendengar kalimat tanya dengan nada yang sama: “Eh, itu anak di mana, sih, sekarang? Kok, lama banget menghilang?”

Menghilang? Apa yang dimaksud dengan menghilang? Apakah orang yang dimaksud itu meninggalkan rumahnya, tanpa pamit minggat dari kantor tempat dia bekerja, lalu bapak-ibunya menangis sehari-hari sambil mencari dia ke mana-mana, dan akhirnya teman-temannya memasang pengumuman di koran-koran: “Orang hilang. Ciri-ciri tinggi 177 cm, berat badan sekitar 75 kilogram, berkacamata, rambut berjambul, terakhir dijumpai memakai kaus merah dan celana pendek cokelat doreng. Jika Anda menemukannya, harap hubungi nomor HP 08154XXXX.”?

Tidak, tidak. Menghilang dalam konsep hari ini tidak harus seperti itu. Seseorang bisa disebut menghilang padahal sehari-hari ia tetap pergi bekerja, tetap nongkrong ngopi-ngopi dengan teman-temannya, tiap sore pun ia pulang ke rumahnya dan selalu berpapasan dengan para tetangga. Namun, pada saat yang sama, unggahan Instagram terakhirnya bertanggal tiga bulan lalu, akun Facebook-nya *deactivate*, nge-*twit* pun yang biasanya sehari dua puluh kali sekarang tak pernah lagi, dan pada beberapa grup WhatsApp namanya muncul sepaket dengan keterangan *left group*. Ya, orang itu telah menghilang!

Kita cukup mudah menyebut seseorang menghilang, padahal yang terjadi tak lebih daripada “tak terlihat lagi di medsos”. Tanpa sadar, medsos telah menjadi kata kunci untuk menentukan apakah seseorang ada ataukah tidak ada!

Medsos adalah produk teknologi, dan teknologi memang sering kali merampas banyak bagian dari diri kita. Saya ingat dua peristiwa kecil yang sering membuat saya bertanya-tanya seberapa besar sebenarnya bagian otak kita yang pelan-pelan kehilangan fungsinya.

Peristiwa pertama terjadi tujuh tahun silam. Sore itu saya berada di kaki bukit yang menyangga Kuil Kiyomizu di sudut Kota Kyoto. Kepada penjaga hotel murah tempat saya menginap, saya bertanya ke mana arah menuju area Gion. Lelaki muda itu lantas mengambil selebar kertas, dan dengan bolpoin mencoret-coretkan denah kasar yang saking jeleknya mungkin hanya bisa dipahami oleh dia sendiri, saya, dan Tuhan. Tetapi, sekasar apa pun denahnya, saya manggut-manggut paham menyimaknya, berangkat jalan kaki dengan tenangnya, dan bisa

sampai Gion tanpa masalah apa-apa.

Peristiwa kedua terjadi lima tahun kemudian. Saya berada di negara yang sama, dengan bahasa dan huruf-huruf yang sama dengan lima tahun sebelumnya. Kali ini saya berada di apartemen adik saya di Tokushima, kota kecil yang sepi di Pulau Shikoku. Di situ, selama dua hari saya merasa takut berjalan-jalan sendirian, meski sambil menyimak peta sekalipun. Kenapa?

Alasannya sangat sederhana: paket data internet saya baru aktif pada hari ketiga. Tanpa internet, banyak kekhawatiran muncul di kepala saya. Bagaimana kalau saya kesasar? Bagaimana kalau tidak bisa kembali? Bagaimana “kalau-kalau” yang lain? Selama tiga tahun terakhir, ke mana-mana saya selalu mengandalkan Google Maps, atau Waze, dan fitur *share location* pada WhatsApp. Sudah terlalu lama saya menyetir tanpa mengingat-ingat jalur jalanan, pasrah saja dikendalikan oleh gambar kendaraan yang merayap pelan-pelan di lajur peta pada layar HP saya.

Lah, apa jadinya kalau saya berjalan tanpa aplikasi-aplikasi itu? Saya benar-benar kehilangan keberanian dalam situasi seperti itu.

Iya saya tahu, di sana banyak juga orang yang bisa ditanyai tentang jalan. Tetapi, mereka hanya bisa berbahasa Jepang. Saya sendiri memang lulusan Sastra Jepang. Tetapi, sebagaimana ada lulusan Fakultas Hukum yang gemar melanggar hukum dan tak sedikit lulusan Fakultas Ekonomi yang gagal mapan secara ekonomi, Anda tak perlu kaget melihat seorang lulusan Sastra Jepang yang tidak bisa berbahasa Jepang. Yang jelas, kalau saya kesasar, bakalan sulit saya menanyakan jalan kepada orang-orang di kota se-udik Tokushima, sebab kemungkinan besar tak ada yang bisa berbahasa Inggris di sana.

Poinnya, ketika dulu sebelum terbiasa menggunakan Google Maps saya masih sangat bisa bepergian hanya berbekal denah jelek, setelah Google Maps berkuasa, segalanya jadi berubah. Ruang-ruang kecerdasan spasial di otak saya lenyap. Kepercayaan diri saya lenyap. Banyak kemampuan saya sebagai *Homo sapiens* lenyap.

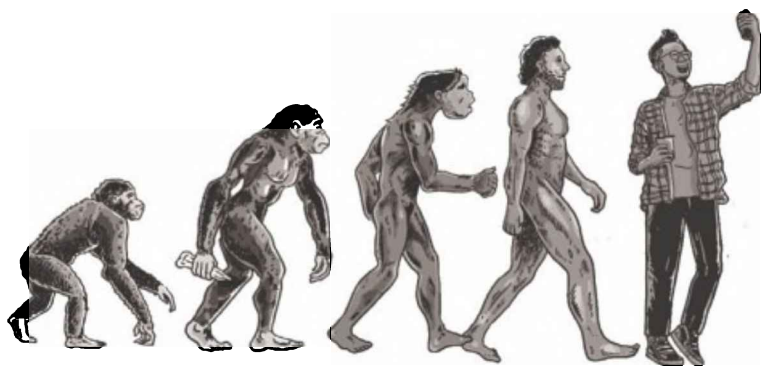
Seperti itulah hasil kerja teknologi. Ia menyalurkan sebagian diri kita. Dan, kalau Google Maps menyalurkan kemampuan otak saya (dan pasti juga otak Anda) untuk pemahaman peta, medsos jauh lebih beringas lagi: ia merampas bagian yang sangat besar dari eksistensi diri kita sebagai manusia.

Di medsos, manusia bukan cuma meminta bantuan teknis

sebagaimana di Google Maps. Melainkan menjadikannya ruang utama untuk menghadirkan diri kita, memunculkan karakter-karakter kita, membangun citra yang kita inginkan untuk dilihat dan dikagumi oleh manusia-manusia lainnya, menjadi jalur utama kita (bahkan kadang satu-satunya jalur kita) untuk berbicara dan mengeluarkan isi kepala, membentuk jejaring kehidupan sosial yang bisa-bisa sangat membentuk pula atmosfer psikologis sekaligus peluang-peluang penghidupan kita, dan entah ribuan fungsi apa lagi selain itu.

Google Maps telah merampas secuil kemampuan otak kita. Tetapi, medsos merampok separuh ke-manusia-an kita.

Barangkali saya berlebihan dalam melihat situasi zaman seperti ini. Namun, saya yakin ada banyak sekali manusia yang terjebak dalam keterungkungan serupa. Lho, Anda tidak percaya? Mari buktikan saja. Tunggu sebentar, saya tanyakan dulu soal itu kepada teman-teman lewat status di dinding Facebook saya.[]



## Bicara atau Dosa!

**Y**ou can't post or comment for 3 days. Kalimat itu tiba-tiba nongol di layar HP saya, persisnya ketika saya membuka aplikasi Facebook. Tentu saya kaget. Apa salah saya sama Mas Zuckerberg?

Kemudian, saya baca pelan-pelan segala keterangan lanjutannya. Ternyata hukuman itu ditimpakan gara-gara saya mengunggah foto sepiring tongseng kambing yang sedang saya santap, dan bersama gambar itu saya tuliskan: "Jamu penangkal Covid". Nah, rangkaian kata tersebut diendus oleh Facebook sebagai hoaks tentang Covid! Maka, tidurlah akun saya selama tiga hari.

Saya tak hendak membahas betapa lebainya Facebook, dan betapa mereka sekarang susah sekali diajak bercanda. Saya lebih ingin menggambarkan pergolakan spiritual yang saya alami selama tiga hari panjang penuh kebekuan itu.

Begini. Facebook buat saya ibarat cerutu buat Fidel Castro, atau sepeda buat Jokowi. Saya sendiri belum pernah melihat Jokowi sepedaan, kecuali di boneka kertasnya yang terpajang di bandara-bandara. Tapi, kira-kira seperti itu. Pendek kata, kantor saya di Facebook, tongkrongan utama saya di Facebook, perpustakaan saya di Facebook. Paling tidak, selama tujuh tahun terakhir, nyaris tidak ada satu hari pun yang saya lalui tanpa Facebook-an. Facebook adalah dunia saya yang kedua setelah keluarga (eh, atau kebalik?).

Dengan realitas seekstrem itu, azab tiga hari tanpa Facebook-an sungguh bukan perkara main-main. Otak, hati, dan segenap sistem kimiawi di dalam tubuh saya protes keras. Jangankan *posting* sesuatu, bahkan mau pencet *like* dan *lope-lope* saja saya dilarang. Lebih menyakitkan lagi, akun saya masih bisa saya lihat utuh, tampilannya utuh, unggahan teman-teman saya juga utuh dan selalu *ter-update* dari detik ke detik. Artinya, saya bisa memantau semuanya, tapi tidak bisa bicara.

Bisa memantau, tapi tidak bisa bicara. Bayangkan, bukankah itu berat sekali? Masih mending kalau saya tidak dapat melihat semuanya, dan pada saat yang sama saya tak boleh bicara. Itu bukan tantangan sulit, sebab memang tak ada yang mau saya bicarakan. Tapi, yang kemarin itu saya bisa melihat dan membaca semuanya! Sementara itu, kita tahu bahwa di bawah rezim medsos, setiap pergerakan di layar ponsel kita adalah stimulasi sekaligus aksi. Adapun aksi selalu menuntut reaksi. Kita bebas untuk tidak menciptakan aksi, tapi sering kali menjadi “dosa digital” jika kita tidak bereaksi sama sekali atas aksi demi aksi.

Mekanisme semacam itu bukan semata-mata karena kelemahan saya sendiri. Kalau Anda sudah nonton *The Social Dilemma*-nya Netflix, tentu nggak perlu heran-heran amat. Keinginan untuk bereaksi atas segala apa yang kita lihat itu bukan semata produk *free will*, buah prinsip kebebasan berekspresi, atau hasil nyata dari penerapan Pasal 28 UUD 1945. Itu semua dirancang, diorganisasi. Stimulasi-stimulasi itu memang terus dimatangkan efektivitasnya untuk terus menjebak kita, agar kita tak bisa menghindar lagi dari tindakan penuh reaksi.

Tak cuma itu. Atmosfer yang dibangun oleh algoritma-algoritma media sosial itu akhirnya menumbuhkan tuntutan sosial pula. Tuntutan untuk apa? Tentu saja untuk berbicara!

Maka, tidak aneh jika berkali-kali saya ditagih oleh beberapa kawan, “Heh, Bal, kamu kok belum ngomong soal yang itu? Ditunggu pendapatmu. Jangan diam saja!” Bahkan, lain kali tuntutan itu lebih mirip provokasi, bunyinya semacam, “Mana, kok soal anu belum kau bahas? Takut, ya? Atau, gengsi mengakui kalau pendapatmu yang dulu-dulu salah?”

Kita setiap saat ditekan untuk terus berbicara. Tidak berbicara adalah sikap seorang pengecut. Tidak berbicara adalah lari dari kenyataan. Tidak berbicara adalah dosa. Dan seterusnya. Mendadak kita lupa bahwa kemarin sore kita masih menjadi pemamah berita semata, tidak bisa berkata-kata selain di warung kopi atau pos ronda. Lalu medsos



datang, menciptakan tekanan-tekanan baru, lalu hadirilah demokratisasi dalam berkata-kata. Semua orang bisa berbicara, semua orang bebas menjadi produsen wacana, lalu semua orang segera lupa bahwa hak berbicara itu lambat laun bermetamorfosis menjadi kewajiban berbicara.

Maka, kita kecanduan berbicara. Candu medsos adalah candu untuk berbicara. Mungkin ada di antara kita yang suntuk menyimak dan membaca segala hal di lini masa. Tapi tanpa berbicara, dia belum dianggap aktif bermedsos. Medsos tidak bisa kita posisikan sebagai ruang perpustakaan atau taman baca, tempat kita hanya membaca dan dilarang berbicara. Di medsos, kita terbiasa bicara, jarang mendengar. Atau, kalau mendengar dan membaca, ya tujuannya untuk berbicara. Bukan untuk mendengar itu sendiri. Bahkan, kita sangat boleh tak usah membaca dan tak pernah mendengar sama sekali, asal rajin berbicara.

Kalau tidak percaya, coba tengok Twitter. Akun-akun besar di sana seolah membuat standar kualitas yang menjadi konsensus bersama: semakin keren sebuah akun, maka semakin banyak *follower*-nya, dan semakin sedikit akun lain yang dia *follow*. Pendek kata, puncak kejayaan sebuah akun Twitter adalah jika ia diikuti jutaan akun lain, sementara jumlah akun yang diikutinya adalah nol!

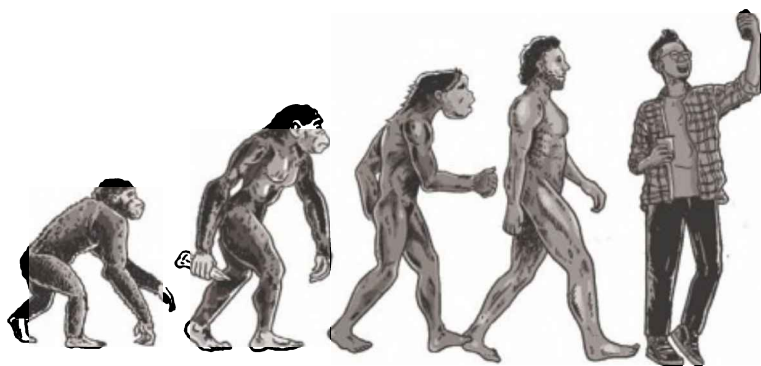
Lihat, bukankah itu gambaran tentang betapa kita semakin dipepet terus untuk sebanyak mungkin berbicara, sembari sesedikit mungkin mendengar?

Semua jebakan itu kian disempurnakan lagi dengan istilah *follower*. Kalau mau diterjemahkan mentah-mentah, kata tersebut berarti “pengikut”. Sialnya, dalam khazanah kebahasaan kita, kata pengikut lebih sering menempel pada frasa “pengikut Habib Rizieq”, “pengikut aliran Jambu”, “pengikut mazhab Jeruk”, dan sejenisnya. Pengikut adalah istilah yang secara lazim disematkan pada orang-orang yang pasrah mengikuti patronnya. Dan, jebakan istilah itu jugalah yang agaknya membius akun-akun besar sehingga di bawah sadar mereka merasa benar-benar punya massa pengikut jutaan, sambil sering kali lupa bahwa mungkin lebih dari separuhnya hanyalah *haters* atau akun jadi-jadian.

Dan, dengan segala bius itu, kita semua berbicara, dan terus berbicara. Kita takut tak lagi bisa bicara. Kita tersiksa jika suatu saat dibungkam, tak lagi punya ruang untuk bicara. Seperti saya yang selama 3 x 24 jam hanya diam memantau banjir kata-kata, tanpa sekali pun bisa melemparkan respons atasnya.

Saya yakin banyak juga yang akan seperti saya. Bedanya mereka

tidak mau mengakuinya. Kenapa? Ya karena mereka ogah mendengarkan saya sebab maunya hanya bicara dan bicara saja. Hahaha![]



## Sang Perampas Kemerdekaan

**S**ahabat saya, seorang sastrawan yang sedang naik daun, mengirim pesan Messenger di tengah malam.

“Sebenarnya, kadang aku ingin juga menuliskan pandangan-pandanganku di status Facebook, seperti yang kalian lakukan.” Ia tidak melanjutkan kalimatnya hingga beberapa detik berikutnya. Tercium aroma keraguan, hingga kemudian muncul lanjutannya. “Tapi, aku merasa, Facebook tidak pernah menghasilkan dialog apa-apa. Facebook tidak mengubah manusia.”

Saya tertegun. Serius amat, sih? Tapi, lelaki satu itu memang sejenis manusia yang hobinya merawat skeptisisme dalam nyaris setiap hal, sering kali sampai taraf menyebalkan. Apa yang ia sampaikan barusan itu pun sejukurnya tidak membuat saya heran. Dari situ juga saya yakin bahwa akunya tidak sedang dibajak orang.

Saya tidak terlalu menanggapi kata-katanya. Namun, hingga beberapa waktu kemudian, tiap kali saya menyimak kericuhan-kericuhan dunia maya, selalu teori Mas Sastrawan itu yang muncul di kepala saya.

Media sosial kita memang selalu riuh rendah penuh gairah. Apa pun diperdebatkan. Nongol isu sedikit di tingkat elite, lekas muncul pula pertarungan di level massa. Datang isu panas di tingkat bawah, meledak pula pandangan dari ribuan penonton dan penggembira.

Maka, ribut-ribut korupsi e-KTP menghadirkan dua kelompok suporter. Demikian pula kasus patung di kelenteng Tuban. Tak ketinggalan perkara kebijakan *Full Day School* dari Pak Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi.

Dengan nyaris selalu munculnya dua kelompok suporter berikut segenap *cheerleader*-nya, lalu apa yang kita dapatkan?

“Medsos tidak pernah menghasilkan dialog,” kata Mas Sastrawan.

“Oh. Apa lantas kau anggap medsos tidak membawa pengaruh ke dunia nyata? Hei, lihat itu, Ahok masuk penjara. Kau pikir itu bukan karena kejayaan medsos? Atau yang paling gampang ya yang itu, patung gede itu akhirnya dibungkus kain putih macam pocong. Menurutmu, itu bukan gara-gara medsos?”

“Oh, tentang efek ke dunia nyata itu soal lain.” Saya mencoba membantunya memberikan jawaban dengan imajinasi saya. “Ini lebih ke perkara bagaimana kita belajar, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengakses pengetahuan, bagaimana kita memilih dan memilah apa pun yang kita yakini sebagai kebenaran. Medsos tidak pernah memberikan itu. Ia mungkin bisa membuat kita menang dalam pertarungan. Menjadikan gagasan kita terwujud, sementara ide kelompok di seberang kita langsung tumbang. Tapi, pada saat yang sama, ia justru membuat kita semakin terperosok dalam ketidaktahuan.”

Barangkali *dubbing*-an jawaban dari saya terlalu absurd. Maafkan saya, Mas Sastrawan. Namun, deretan kalimat kegundahan itu bisa langsung kita verifikasi di lapangan. Lihat, kerumunan-kerumunan yang kita temui memang bukan grup-grup diskusi, melainkan lebih cocok disebut sebagai, anu, Klub Masturbasi Pikiran.

Kita cenderung berkumpul hanya bersama orang-orang yang berpendapat sama. Situasi itu membawa kita pada akses sumber-sumber informasi yang juga sama, sudut pandang yang selalu sama, serta imajinasi-imajinasi yang juga sama.

Kita tidak pernah membaca informasi yang kita butuhkan. Sebab, kita hanya mau membaca apa yang kita “inginkan”. Hasilnya, ketika kita membagi tautan, misalnya, alih-alih membagi kabar yang benar-benar baru, kita bakalan lebih nikmat menyundul-nyundul informasi yang memang sedari awal sudah kita landasi dengan prakonsepsi.

Jadi, ini bukan tentang berbagi informasi, melainkan lebih cocok disebut afirmasi. Segalanya adalah sukaria merayakan afirmasi atas pikiran-pikiran dari otak sendiri.

“Kalau mau tulisanmu viral, gampang,” seorang penulis berbisik-bisik kepada saya. “Jangan tulis gagasan baru yang kreatif. Tulis saja apa pun yang sekadar bersifat membahasakan suara kumpulan banyak orang. Orang-orang itu punya kemarahan, kegelisahan, tapi mereka tidak mampu mengartikulasikan. Wakili saja mereka dengan tulisanmu, meski sebenarnya kau tak setuju. Niscaya ocehan itu akan mereka sebarakan tanpa ragu-ragu.” Hahaha, teori kepenulisan yang kurang ajar sekali. Tapi, meski kurang ajar, sayangnya dia benar.

Pendek kata, kita jadi terbiasa memanjakan imajinasi, memilih informasi hanya bila sesuai dengan apa yang ingin kita percayai, lalu menikmati semuanya sebagai kenikmatan diri sendiri. Kebiasaan itu semakin mencengkeram diri kita manakala berjumpa dengan pandangan-pandangan lain yang berbeda jauh dengan pandangan kita sendiri. Bukannya mengoreksi, tetapi yang kita keluarkan justru solusi yang paling sakti mandraguna: Ajian Blokir Pamungkas. Ciaaat!

Jadi, tak perlu heran ketika kadang kala terdengar kalimat tegas dan gagah semacam ini: “Pokoknya siapa pun yang tidak mendukung kebijakan Presiden Jokowi akan aku tendang dari *friendlist*-ku! Aku tak sudi membuang-buang waktu dan tenaga untuk berdebat dengan mereka!”; “Alhamdulillah, peristiwa Kepulauan Seribu sangat berjasa sehingga aku bisa memilah mana saja teman yang layak dipertahankan dan mana yang tidak. Sebab, para pembela penista langsung bermunculan, dan tak ada gunanya berteman dengan orang-orang munafik macam mereka!”; dan sebagainya.

Lantas apa hasilnya? Ya jelas saja, lingkaran pergaulan semakin menyempit, sudut pandang kian menciut, rekan-rekan dalam bertukar pikiran semakin seragam, dan akhirnya persis seperti yang dibilang Mas Sastrawan: Facebook, atau media sosial pada umumnya, tidak pernah menghasilkan dialog apa-apa. Dialog sih dialog, tapi dialog di antara kumpulan-kumpulan yang seragam rasanya tak akan beda dengan monolog yang dimassalkan. Lantas dari situ, apa yang bisa dilahirkan?

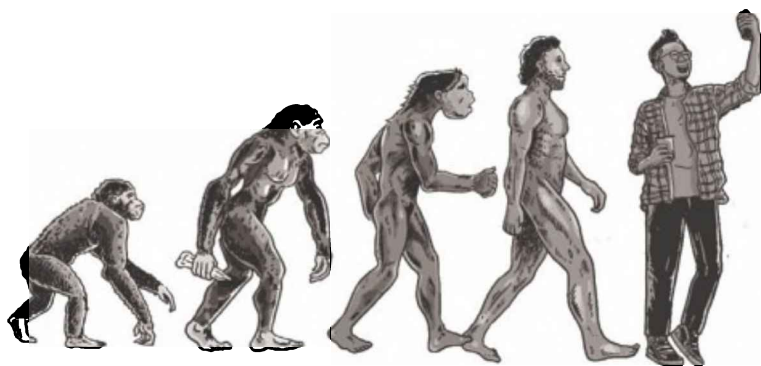
Saya jadi ingat bacaan saya bulan lalu. Dalam buku *Geography of Genius*, Eric Weiner menukil psikolog Irving Janis. Irving meneliti rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden John F. Kennedy, dengan peserta tokoh-tokoh paling cerdas dalam lingkaran kekuasaan utama Amerika. Rangkaian panjang diskusi orang-orang hebat itu justru melahirkan salah satu keputusan terbodoh dalam sejarah negara tersebut, yakni invasi ke Teluk Babi, Kuba, pada 1961. Hampir 1.400 orang buangan Kuba yang dilatih oleh CIA tertangkap dan dibunuh. Lah, kenapa hasil

pemikiran orang-orang tajir malah justru begitu buruk?

Irving menemukan jawabannya. Menurutny, kesalahan-kesalahan dalam penilaian terjadi bukan karena kebodohan, melainkan karena karakter manusia. Saat orang-orang dengan latar belakang yang sama berkumpul, tidak mengenal perbedaan pendapat, maka yang ada hanyalah upaya untuk saling menyenangkan satu sama lain. Hasilnya sangat mudah ditebak, yakni konsensus pada langkah-langkah yang disukai bersama, bahkan meski konsensus itu salah sekalipun.

Berkumpulnya orang-orang dengan pemikiran yang sama akan menumpulkan kreativitas, akan melenyapkan peluang munculnya ide-ide genius dan cemerlang. Pada situasi beginilah harmoni tidak selalu membawa hasil yang gemah ripah.

Untuk terus maju, manusia mutlak membutuhkan kreativitas. Sementara untuk menjadi kreatif, kita perlu memiliki dulu pikiran merdeka. Nah, dengan medsos, mungkin kita memang merdeka dalam bersuara. Tapi, benarkah dalam berpikir kita juga merdeka?[]



## Kepraktisan Abal-Abal

**S**ajak dua tahun terakhir, berkali-kali saya ribut kecil dengan istri saya. Gara-garanya ada satu suara yang selalu menciptakan distraksi atas aktivitas kami masing-masing. Bukan suara teve yang terlalu keras, bukan suara toa masjid yang membangunkan orang untuk sahur, bukan pula suara tangis anak saya. Melainkan suara seseorang di depan pintu rumah kami. Bunyinya: “Pakeeet!”

Lalu, kenapa sampai bikin saya ribut sama istri? Sebab, kedatangan si Babang Paket itu tak pernah benar-benar masuk dalam skema rencana yang jelas. Mereka mirip seorang kawan lama yang pada zaman 4.0 tiba-tiba nongol bertemu tanpa WA dulu, atau tetangga yang mendadak mengetuk pintu dan mengajak saya datang kenduri tanpa mengabarkan undangannya terlebih dahulu.

Dengan jadwal tak jelas itu, kalau toh ada kurir yang berkabar sebelumnya, biasanya bunyi pesannya: “Pak, saya dari Anu Express, ada kiriman buat Bapak Iqbal Aji Daryono dengan alamat bla bla bla. Estimasi kedatangan antara jam 9 pagi sampai jam 5 sore.” *Hellooo*, kenapa estimasinya nggak sekalian antara tanggal 1 sampai 30 saja, Mas?

Nah, dari situ Anda paham, kedatangan paket selalu merupakan kejutan, dan itu jenis kejutan yang wajib direspons dalam hitungan detik. Demi memberikan respons cepat itu, perdebatan pun dimulai. Istri saya

yang mendengar suara Babang Paket, tapi saya yang dia suruh menerima. Saya dongkol.

“Halah mbok kamu aja, tinggal buka pintu, lho!” kata saya.

Tapi, Mbak Istri menyambar, “Wah, aku nggak pake jilbab e, sana kamu!”

Saya nggak mau kalah, “Lah, aku nggak pake baju!”

Jogja gerah sekali. Saya kalau di rumah memang hampir pasti telanjang dada. Istri saya yang kesehariannya berjilbab tentu di dalam rumah tidak memakai jilbabnya. Anak perempuan saya sudah bisa, sih, disuruh-suruh. Tapi, kadang pakaian rumahnya pun kurang pantas untuk ketemu om-om yang tidak ia kenal.

Hasilnya ya salah satu dari kami akan mengalah sambil bersungut-sungut. Begituuu terus, sampai entah kiriman paket keberapa ratus. Itu belum lagi kasus spesifik lain. Misalnya pas saya sedang sendirian di rumah, si Mas Paket datang saat saya sedang tidur, lalu saya geragapan bangun karena suaranya. Atau, ketika anak saya sedang nge-Zoom sekolah di ruang depan, dan pada saat dia harus berkomunikasi dengan gurunya, tiba-tiba *backsound* “Pakeet!” nyelonong begitu saja.

Buat para kurir yang membaca cerita ini, jangan ngambek dulu. Saya tidak sedang memosisikan sikap para kurir sebagai sikap menyebalkan. Sama sekali tidak.

Harap tahu, saya pun pernah dua tahun penuh jadi kurir. Meskipun saya *ngurir* di Australia, beban pekerjaannya tak kalah beratnya. Saya pegang mobil *van*. Per hari minimal lima puluh titik alamat harus saya bereskan. Barang kirimannya jarang yang kecil-kecil, bahkan tak cuma sekali dua kali saya harus naik-turun tangga bolak-balik tiga kali untuk ngedrop berkardus-kardus kiriman cuma buat satu alamat saja.

Dalam situasi begitu, salah satu trik untuk bekerja cepat memang berteriak “*Deliveryyy!*” keras-keras tiap kali saya tiba di sebuah lokasi. Ya biar yang punya rumah lekas-lekas keluar. Tak peduli mereka sedang mandi, tidur, makan, atau aktivitas privat lainnya. Kalau ternyata mereka sedang tak di rumah, dan barang kirimannya tidak rentan pecah, saya lempar saja barang sialan itu ke dalam pagar sambil ngomel-ngomel.

Aduh, malah curhat kenangan kecut. Bukan itu maksud saya. Saya cuma mau bilang, tiba-tiba saya merasa bahwa ada ruang kebebasan yang hilang dengan kedatangan paket-paket itu.



Pada awalnya saya memilih berbelanja *online*, pencat-pencet aplikasi *marketplace*, dengan satu tujuan kepraktisan. Praktis, gampang, bebas dari kerepotan keluar rumah, bebas dari kemacetan, dan semuanya bisa ditunggu sambil rebahan. Artinya, memang ada orientasi bahkan obsesi atas kemudahan dan kebebasan yang saya pancangkan di awal ketika mengambil pilihan sikap berbelanja *online*. Seperti itu juga pertimbangan Anda, kan?

Tapi, ternyata kemudahan dan kebebasan itu mirip ingar-bingar kenikmatan duniawi lainnya: semu belaka. Bahkan, diam-diam yang sesungguhnya terjadi lumayan menyeramkan, yaitu kita telah mengorbankan banyak sekali ruang privasi kita. Kita membeli secuil kebebasan, sambil menyerahkan kebebasan lain dalam potongan yang jauh lebih besar.

Bayangkan, anak-anak saja saya larang keras mengganggu ketika saya tidur siang. Tapi, kurir paket bisa! Saya marah-marah kalau anak atau istri saya keceplosan mengajak saya ngomong waktu saya sedang di kamar mandi. Tapi, jangan cuma ngajak bicara, kurir paket malah bisa memaksa saya membuka pintu kamar mandi, membuat saya tergopoh-gopoh keluar dengan berbalut handuk saja, untuk menerima kirimannya! Dahsyat sekali kekuatan mereka.

Ah, tapi mungkin saya ini cuma telat sadar saja. Sebenarnya pola seperti ini sudah terjadi sejak agak lama.

Saya ingat, dulu ketika masih bekerja kantoran, beberapa kali saya perlu menjumpai bos saya. Datanglah saya ke ruangnya. Tapi, Mbak Sekretaris mencegat. “Mas, Pak Bos lagi nggak bisa ditemui. Lagi *meeting* tuh di ruang sebelah. Eh, atau ditelepon aja ke HP-nya, Mas! Pasti malah diangkat!”

Hahaha. Rapat rahasia yang serius, yang semestinya merupakan wilayah sangat privat dari bos saya, dengan mudah saya interupsi pakai panggilan telepon. Kemudahan berkomunikasi itu telah merampas privasi dia.

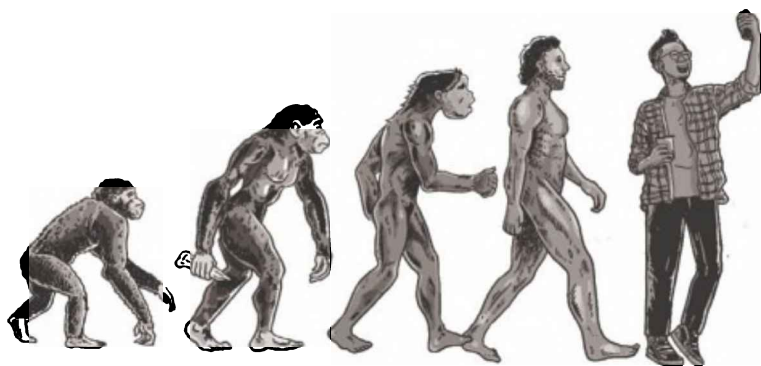
Model demikian terulang lagi dalam skala yang lebih masif belakangan ini. Kita tahu, karena pandemi, banyak karyawan kantor pada bekerja dari rumah. Mereka bebas dari rutinitas perjalanan pagi, bebas dari perjuangan berebut celah sempit di KRL, bebas dari klakson-klakson galak, bebas dari polusi yang menyergap paru-paru. Bahkan, mereka bebas dari tata kepantasan sosial buat mandi pagi, buat berpakaian rapi, buat menyemprotkan minyak wangi.

“Wah, enak banget sekarang ya, kalian kerja dari rumah. Bebaaas! Hemat waktu, hemat tenaga, hemat ongkos, dan tetap gaji Jakarta!”

Tak saya sangka, malah gerundelan yang meluncur dari mulut mereka.

“Kata siapa??? Kalau di kantor kerjaan bisa diberesin dari pagi sampai sore. Lah, kalau WFH, Bos Besar bisa ngajak nge-Zoom kapan saja! Pas lagi pacaran tahu-tahu datang panggilan buat Zoom saat itu juga. Sudah santai-santai, eh diajak nge-Zoom lagi jam delapan malam! Di rumahnya sih di rumah, tapi jam kerjanya malah tambah nggak jelas!”

Saya kepingin tertawa sekeras-kerasnya. Para Bos Besar dan Babang Paket itu ternyata sama perkasanya, dan ruang-ruang kebebasan serta privasi yang kita bayangkan itu ternyata abal-abal belaka. Hahaha![]



## Mabuk Webinar

“A sem, sekarang sering banget aku dapat undangan ngisi webinar, Zoom-Zoom-an, tapi nggak ada amplopnya. Kalau toh ada, cuma separuh dari biasanya.” Seorang teman yang kerap diundang untuk mengisi forum-forum diskusi mengomel demikian. Kontan saja saya ngakak tanpa ancang-ancang.

Saya tertawa bukan karena senasib dengannya, tenang saja. Zoom-Zoom-an saya jarang yang bersifat diskusi, melainkan pelatihan. Dan, kalau pelatihan itu ya pasti mengandung aroma industrialis-kapitalistik, hahaha.

Tapi, bukan itu poin yang mau saya utarakan. Poinnya adalah sekarang ini terjadi semacam *oversupply* forum-forum virtual. Akibat suplai yang berlebihan itu, berjalanlah hukum pasar: semakin banyak penawaran, semakin turun penghargaan. Dan karena harga semakin murah, bahkan banyak yang gratis, ya wajar saja kalau pembicaranya juga gratisan.

Pertanyaannya, kenapa suplai membanjir banyak sekali?

Anda pasti tahu sebabnya. Sejak awal musim wabah ini, manusia lebih banyak ngendon di rumah. Sebagian karena takut kecipratan Corona, sebagian yang lain karena memang jadi bingung kalau keluar rumah lantas mau apa. Kerjaan tidak ada, warung kopi tutup, tempat-tempat nongkrong dilarang menghadirkan kerumunan, dan otomatis

para karyawannya dirumahkan.

Dalam kondisi psikis yang serba-tersekap itu, untunglah kita menjalani semuanya pada masa digital, terlebih lagi pada zaman media sosial. Mau tak mau kita pun melirik warung-warung kopi virtual itu di Facebook, Twitter, dan Instagram. Di sanalah kebutuhan kejiwaan kita untuk bersosialisasi, lebih khusus lagi untuk mengobrol langsung, dapat dipenuhi.

Awalnya memang berat. Kita belum terbiasa. Pada zaman pra-Corona, orang bermain media sosial berbasis teks dan gambar pada satu waktu, kemudian kopdar atau kopi darat alias temu muka pada waktu yang lain. Tapi, saat wabah datang dan pertemuan fisik hampir tidak memungkinkan, sementara naluri bergaul demikian meletup-letup, ruang-ruang yang sebelumnya tak memanfaatkan dengan baik di media sosial itu kemudian dilahap dengan nyaris gila-gilaan.

Sebelumnya, fitur itu hanya digunakan oleh jenis-jenis tertentu dari bangsa manusia yang cukup percaya diri dengan penampilan mereka di depan kamera. Atau, bisa dibilang fitur-fitur itu selama ini hanya dipakai oleh orang-orang “penting”. Tapi, kemudian terjadi suatu gelombang “demokratisasi” atas penggunaan fitur tersebut, siaran *live* oleh siapa saja (ya, siapa saja!), saking banyaknya jiwa yang ingin berbincang-bincang langsung, jiwa-jiwa yang sangat gelisah tapi takut sama Corona di depan rumah.

Dulu, saya sendiri sering pula mengunggah video di Facebook dan Instagram. Rata-rata saya main gitar dan menyanyi. Tapi, video-video itu tak pernah menampilkan wajah saya, paling-paling hanya gitar serta tangan saya, atau maksimal wajah anak saya. Alasannya sama dengan Anda, yaitu saya tak cukup pede kalau muka dan mulut saya bergerak-gerak lalu disimak oleh banyak orang.

Kita selama ini memang lebih banyak hidup bersama foto-foto, gambar-gambar beku yang mungkin merupakan hasil seleksi ketat dari puluhan jepretan. Tapi, video berbeda, dan video *live* jauh lebih berbeda. Dengan video non-*live*, kita bisa berulang-ulang melakukan *take* sampai betul-betul sempurna, tetapi video siaran langsung tidak memberi kita kesempatan untuk mengejar nilai sempurna. Segala kepalsuan hilang di video *live*, dan hanya orang-orang yang sangat percaya diri sekaligus ekstrover-lah yang mau melakukannya.

Demikianlah, saya pun menjadi saksi betapa teman-teman saya yang agak pendiam di medsos tiba-tiba mengunggah siaran langsung mereka. Saya melihat beberapa sahabat saya yang biasanya malu

dengan suara mereka sendiri tiba-tiba dengan gembira menyanyi keras sekali, dan menggelar siaran *live* di IG dengan sangat rajin. Saya melihat amat banyak orang yang berubah menjadi seperti teman-teman yang telah saya sebutkan, dan sungguh mereka tidak sendirian.

Bahkan saya pribadi, yang sama-sama korban dari gelombang zaman, pun tiba-tiba tak malu-malu lagi siaran langsung tanpa ribet lagi dengan kecemasan lama semacam, “Aduh, nanti kalau salah ucap terus di-*replay* orang gimana? Nanti kalau ludah nyemprot dan ketangkap kamera gimana?” Dan sebagainya.

Inilah bulan-bulan ketika para pendiam lupa caranya berdiam, dan para introver mendadak berubah jadi sangat ekstrover.

Saya mengerti, ini sesungguhnya cuma kelanjutan dari pola yang sama belaka dengan apa yang telah terjadi pada masa awal media sosial, ketika manusia bisa memunculkan karakter yang sungguh berbeda dengan diri mereka di dunia “nyata”. Tapi, saat ini rasanya pola itu tengah merayap mencapai puncak paling ekstremnya, hasil dari tekanan psikologis berat yang secara massal mendorongnya.

Ya, semuanya adalah ledakan dari bom waktu kebosanan, perasaan pengap tersekap, kerinduan bersosialisasi dan jalan-jalan, dan entah emosi jenis apa lagi yang stratanya tidak jauh-jauh amat di bawah edan.

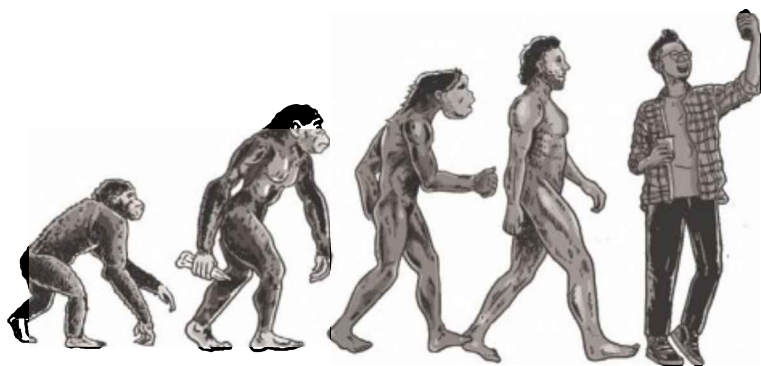
Produk konkretnya adalah obrolan dan diskusi *live* yang limpah ruah, dengan poster pengumuman yang melintas setiap waktu di lini masa. Sampai-sampai saya berpikir, bisa jadi semua ini merupakan gelombang gerakan massa tanpa sadar yang akan meruntuhkan otoritas pengetahuan dan otoritas media.

Mungkin bayangan itu agak berlebihan. Tapi, dengan membanjirnya pilihan-pilihan forum diskusi dan seminar pada masa wabah ini, sosok-sosok baru dan segar bermunculan. Mereka memecah kerumunan di panggung-panggung milik para tokoh lama penguasa kamera, menyedot jenis-jenis perhatian baru yang belum tampak sebelumnya, bersama barisan umat baru yang mungkin separuh lebihnya hanya menjadikan sertifikat digital sebagai tujuannya.

Seiring dengan itu, media-media penyedia panggung gambar bergerak juga semakin kehilangan pelanggannya. Setelah perhatian umat penonton bergeser ke saluran-saluran YouTube, kini saluran baru di laman-laman media sosial telah merebutnya.

“Ya, kamu benar, Bal. Kami memang telah merebut ruang-ruang baru itu. Tapi, ya tetap saja: nggak ada transferannya.” Begitu kata kawan

saya tadi, meski kali ini cuma imajinasi saya. Hahaha![]



## Arogansi Pakar Medsos

**S**ejak media sosial menguasai segenap sendi kehidupan kita, rasanya kita jarang tenang dalam menjalani hidup sebagai warga masyarakat dan warga negara. Ini jauh berbeda dengan, katakanlah, sepuluh tahun silam. Masihkah untuk soal ini diperlukan penjelasan?

Dulu, bahkan sampai ketika bangsa manusia sudah menemukan makhluk bernama Friendster, tak semua mulut bisa terdengar suaranya, dan tak semua jempol bisa menggoyang dunia. Okelah, sudah ada blog. Namun, kesaktiannya masih saja jauh di bawah media sosial pada masa sekarang.

Maka saya membayangkan, betapa pusingnya pemegang kuasa menghadapi gempuran nyaris setiap saat pada waktu ini. Ada langkah sedikit, isu ini-itu bertebaran. Muncul di lapangan peristiwa seiprit, tudingan sana sini muncul berentetan. Jadilah bukan cuma orang-orang di atas saja yang tak pernah nyenyak tidurnya. Kaum jelata pun tak beda.

Akan tetapi, tak mengapa. Biarlah itu jadi takdir karakter wajah bumi pada zaman Kalabendu ini. Kita sebagai masyarakat awam yang berjuang agar tetap waras, mestinya cuma bisa berusaha agar "*ngeli ning ora keli*", kalau orang Jawa mengibaratkan. Ikut arus, tapi tidak terhanyut.

Karena itulah dalam segenap keterbatasan, yang bisa kita lakukan

cuma berhati-hati dan tekun menyimak hingga tuntas setiap perkembangan. Sebab, dari situlah kita bisa menemukan banyak kesempatan untuk belajar.

Mari ambil contoh. Baru saja ada kericuhan di medsos terkait uang baru yang dikeluarkan Bank Indonesia. Ada sebagian pihak (ah, sebenarnya cuma itu-itu saja, sih) yang tiba-tiba menyatakan bahwa eksistensi umat Islam dipinggirkan melalui pemilihan tokoh pahlawan yang dipajang di lembar-lembar uang tersebut. Sontak, “tafsir kreatif” semacam itu segera disambut oleh publik galau, misalnya dengan ungkapan-ungkapan tak pantas dan rasis yang ditujukan kepada sosok yang terpampang di uang Rp10.000,00.

Untunglah, segera muncul beberapa orang yang dengan gamblang, pelan-pelan, dan sederhana, menjelaskan tentang siapa itu Frans Kaisiepo, pahlawan nasional Indonesia dari Tanah Papua. Bahwa ia menjadi wakil Papua dalam Konferensi Malino tahun 1946 saat pembentukan Republik Indonesia Serikat, bahwa ia tokoh yang mengusulkan nama Irian waktu itu, bahwa ia diangkat sebagai pahlawan nasional pada era Orde Baru.

Jujur saja, saya sendiri pun baru tahu semua itu. Kebangetan? Mungkin. Tapi, ada berapa puluh juta orang yang sama kebangetannya seperti saya?

Maka, saya mengatur segenap penghormatan kepada siapa pun yang dengan rendah hati mau menjelaskan dengan bahasa sederhana tentang siapa itu Frans Kaisiepo. Sungguh, hal sekecil itu sangat bermanfaat buat kami, para sudra pengetahuan ini.

Satu saja lah, contoh kasusnya. Anda semua tentu tahu, bahwa ada puluhan kericuhan sejenis, dalam obrolan sehari-hari kita. Ada yang berujung *happy ending* seperti kisah uang bergambar Frans Kaisiepo, tetapi banyak juga yang tak berujung apa-apa selain kerumitan, kebingungan, dan publik awam yang semakin tak paham.

Lalu, dalam situasi ruwet tak berujung begitu, siapa yang pantas digugat? Izinkan saya menuding muka Anda, Anda, dan Anda: para orang pintar, para elite pengetahuan yang aktif beraktualisasi di media sosial, tetapi lebih asyik berbincang riuh rendah dengan kalangan kalian sendiri.

Ambil misal, ketika sedang ribut-ribut pengusuran di Jakarta. Dalam perdebatan terkait hal itu, para fan Ahok selalu mengandalkan mantra legalitas. “Orang-orang itu memang tidak punya legalitas atas tanah



mereka. Lha kenapa mereka dibiarkan? Sah-sah saja, kan, mereka digusur? Di mana salah Pak Ahok?” Begitu kalimat standar mereka.

Saya kira, jalan pikiran demikian itulah yang paling umum, paling lazim, dan paling gampang masuk ke nalar publik. Orang tahunya cuma peraturan, hukum, regulasi. Negeri ini sudah terlalu busuk dalam kegagalannya menjalankan hukum dan peraturan. Maka, ketika ada upaya agar peraturan ditegakkan dan korupsi dilawan, ya itulah yang pertama-tama akan didukung. Ini logika simpel saja yang paling mudah dipahami kalangan awam.

Memang, ada logika lain yang baru akan tampak jika kita menarik segala persoalannya jauh ke belakang. Ini tentang problem struktural. Orang-orang yang menduduki tanah ilegal itu adalah korban ketidakadilan pembangunan. Mereka korban dari puluhan tahun obsesi atas pertumbuhan yang mengabaikan pemerataan. Persis di titik itulah soal legal dan ilegal jadi tidak relevan. Pertanyaannya, ada berapa gelintir kalangan awam yang paham logika demikian?

Malangnya, alih-alih memberikan penjelasan yang gamblang dan sederhana tentang logika struktural tersebut, para intelektual publik di medsos lebih doyan menempelkan label kepada kalangan yang mereka hantam: “Percuma sekolah tinggi-tinggi kalau tahunya cuma legalitas. Kalian ini kelas menengah *ngehek* yang hanya mengejar kenyamanan bagi diri kalian sendiri!” Aduh, Mas ....

Adegan selanjutnya seperti yang biasa terjadi. Mereka riuh berbincang dengan kalangan mereka sendiri, sesama intelektual hebat yang kenyang dengan buku-buku berat, sambil abai bahwa orang-orang yang telah mereka bubuhi label itu sesungguhnya membutuhkan penjelasan yang jauh lebih sederhana, dengan bahasa manusia biasa, tentang di mana salahnya mengandalkan jargon legalitas.

Saya sering menjumpai jenis-jenis orang pintar semacam itu. Kalangan tersebut sangat terampil mengucap, “Nggak usah dilayani debat sama orang seperti dia. Cuma bikin kita *down grade* saja.”; “Tulisan yang itu ramai dikutip orang, padahal dari kacamata ilmu, itu semua tak ada isinya.”; dan sebagainya. Atau yang paling sering bikin tertangkap mata ya ucapan legendaris ini: “Sudah, Bung, sana baca buku duluuu!”

Haha. Mereka lupa, bahwa kesempatan mengakses pengetahuan pun tak dimiliki setiap orang. Para kelas menengah yang mereka tuding-tuding itu pun belum tentu mereka pahami “situasi struktural”-nya. Boleh jadi kelas menengah itu adalah kelompok demografis pekerja kantoran

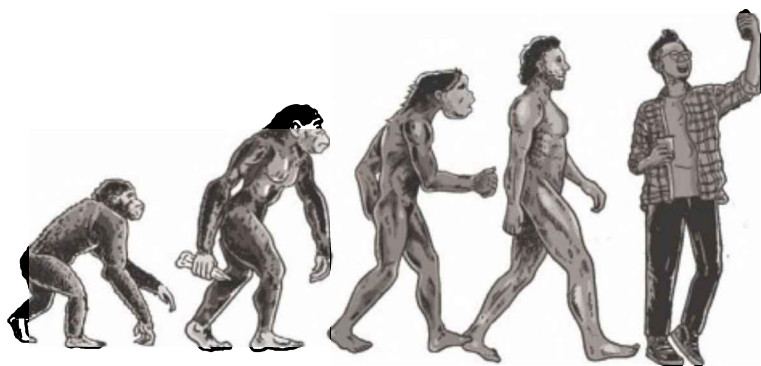
yang pergi subuh dan pulang menjelang tengah malam, yang sering terpaksa lembur karena teror bos mereka, yang hanya memiliki kehidupan riil pada akhir pekan dan itu pun habis untuk keluarga. Kapan mereka punya kesempatan membaca kitab yang berat-berat, apalagi pekerjaan mereka pun tak terkait dengan itu semua?

Barangkali memang benar, para kelas menengah yang dicap sebagai pengejar kenyamanan itu memiliki bawah sadar neolib. Mereka menganggap bahwa kaum miskin tergusur di mana-mana semata karena kalah berkompetisi dalam realitas dunia yang semakin ketat, padahal kenyataannya kompetisi tidak dimulai dari garis start yang sama. Oke, di titik itu saya sepakat.

Akan tetapi, para intelektual publik itu pun lupa bahwa mereka tak kalah neolibnya. Apa dikiranya keberuntungan berupa kesempatan mengakses pengetahuan, takdir yang mempertemukan mereka dengan buku-buku hebat, itu 100% murni karena kerja keras mereka sendiri? Hahaha. Sombong sekali. Sombong sekali.

Saya kira, sudah saatnya kelas intelektual mulai bertobat, berendah hati, untuk memberikan pengajaran publik tentang setiap hal yang terjadi di tengah segala keributan ini. Dengan cara sederhana, dengan bahasa-bahasa orang awam, dengan melupakan keagungan posisi sebagai elite pengetahuan.

Percayalah, itu akan jauh lebih berguna dalam ikhtiar membentuk masyarakat yang rasional, dan jauh lebih mulia ketimbang sekadar “*mengehek-ngehekan*”. Kami orang-orang bodoh ini butuh diterangkan, Tuan. Bukan ditertawakan.[]



## Literasi Media yang Terlupa

**S**alah satu problem di tengah masyarakat kita yang “mabuk digital” saat ini adalah minimnya literasi media. Lebih spesifik lagi adalah kekurangpahaman masyarakat umum, untuk membedakan mana berita yang berkualifikasi jurnalistik dan mana yang tidak. Minimal, seperti itulah kasus yang berkali-kali saya temui.

Di hadapan publik, segenap informasi dianggap sama derajatnya, dan dianggap sama pula perlakuan atasnya. Barulah kemudian publik menyaringnya dengan kecerdasan dasar yang dimiliki, dengan pengetahuan umum yang dipunyai, atau seapes-apesnya dengan preferensi politik yang diikuti.

Kemarin, saya menyimak ada satu berita dari sebuah media, tentang Reuni 212<sup>2</sup>. Dalam badan berita itu dituliskan dua materi pokok. *Pertama*, Habib Rizieq Shihab mengajak agar umat Islam menolak capres pembela penista agama. *Kedua*, Rizieq bertanya, “Siapakah kalian mendukung capres pilihan *ijtima’* ulama?”

Kemudian, berbekal dua unsur materi yang saya sebutkan itu, judul berita dituliskan: “Habib Rizieq Mengajak Umat Islam Pilih Capres Hasil *Ijtim’a’* Ulama”.

Dalam sebuah obrolan media sosial, saya mengatakan bahwa ada *shortcut* dalam penulisan judul berita tersebut. Dalam badan berita di sana, tidak disebutkan bahwa Rizieq mengucapkan kalimat semacam

“Ayo, kita mendukung capres pilihan *ijtima’* ulama!”. Tidak ada kalimat seperti itu. Yang disajikan ya cuma dua hal tadi: bahwa Rizieq mengajak agar umat menolak capres yang *so called* pembela penista, dan bahwa Rizieq bertanya apakah umat siap mendukung capres pilihan *ijtima’* ulama.

Ketika saya mengungkapkan pendapat terkait *shortcut* judul berita tersebut, beberapa kawan tidak sepakat. “Lho, faktanya di lapangan memang Rizieq mengajak untuk memilih capres sesuai *ijtima’* ulama, kan? Dan semua juga tahu, siapa itu yang dimaksud? Prabowo, kan? Siapa lagi? Lalu, di mana *shortcut*-nya?”

Tentu saja saya pribadi paham dan menangkap dengan terang benderang bahwa yang dimaksud oleh Rizieq Shihab jelas-jelas Prabowo. Namun, yang sedang kita hadapi adalah sebuah produk jurnalistik, bukan sekadar obrolan pos ronda. Dengan berbekal logika *common sense* bahwa yang dimaksud Rizieq adalah Prabowo, kita sebagai pembaca tentu saja boleh menafsir demikian. Namun, tidak serta-merta sebuah media berhak menuliskan nama Prabowo, misalnya, ketika Rizieq sebagai sumber yang dikutip tidak secara jelas menyatakan nama itu.

Jadi, meskipun semua orang paham maksud kontekstualnya, akan haram secara jurnalistik apabila media itu menjuduli beritanya, misalnya dengan: “Habib Rizieq Mengajak Umat Islam Pilih Prabowo”.

Di lapangan, dalam berbagai laporan lain memang disebutkan bahwa Rizieq Shihab lewat siaran video mengucapkan secara tegas ajakan untuk memilih capres pilihan *ijtima’* ulama. Namun, dalam berita yang saya bahas tersebut, bagian itu tidak disebutkan sama sekali. Artinya, jelas ada keterputusan alias ketidaksinkronan antara materi berita yang disajikan dengan judul yang dibuat.

Lalu, kenapa banyak orang tidak sepakat bahwa media yang saya baca itu menempuh sebuah jalan pintas proses pembuatan judul?

Saya kira penyebabnya sangat lazim, yaitu secara umum publik memang tidak mendapatkan pendidikan dasar jurnalistik, juga pengetahuan dasar tentang etika jurnalistik.

“Ah, situ lebai. Buat apa semua orang belajar jurnalistik? Toh profesi orang beda-beda. Kamu penulis, nyatanya juga nggak belajar arsitektur macam profesiku. Aku juga nggak perlu belajar linguistik, kan? Kita jalan sendiri-sendiri, yang penting rukun, nggak perlu sok ‘yes’ merasa profesi kita lebih penting dibanding profesi lain. Gitu, kan?”

Betul, di satu sisi itu sangat betul. Tapi begini. Ambillah contoh, kita semua ini pengguna obat-obatan alias produk farmasi. Dalam belantara konsumtivisme, kita harus membekali diri dengan pengetahuan dasar tentang farmasi, atau minimal paham membaca komposisi bahan yang tertera pada kemasan luar sebuah produk obat. Kalau ada zat yang keras dalam obat yang akan kita tenggak, kita dituntut untuk paham dulu bahwa bahan itu keras dan berisiko. Tidak cocok untuk ibu hamil, tidak cocok untuk pengidap asma, mengandung alkohol, dan sebagainya. Itu contoh kecilnya.

Nah, saya rasa, perlakuan kita atas barang-barang konsumsi sangat diskriminatif. Kita paham bahwa obat-obatan, makanan-minuman dalam kemasan, juga kosmetik, adalah barang konsumsi. Sementara itu, kita mengabaikan kenyataan bahwa ada satu barang konsumsi yang kita santap dengan sangat rakus setiap hari, yaitu informasi.

Ya, informasi adalah barang konsumsi. Setara dengan obat-obatan. Meminum obat yang benar bisa membuat badan kita sehat, salah minum obat bisa bikin keracunan. Membaca berita yang benar bisa membuat otak kita cerdas dan waras. Bagaimana dengan salah informasi? Bukankah itu juga bisa bikin kita keracunan, bahkan kesetanan? Hahaha.

Akan tetapi, publik di negeri kita rasanya tidak mendapatkan bekal yang cukup untuk keamanan dan keselamatan diri, agar bisa memilih mana informasi yang layak “santap” dan mana yang tidak, juga mana informasi yang penuh tendensi dan mana yang tidak.

Tidak semua orang harus belajar jurnalistik secara serius. Itu jelas sekali, sebagaimana tidak semua orang wajib kuliah di Fakultas Farmasi. Meski demikian, ada tuntutan pengetahuan minimal yang semestinya menjadi bekal bagi publik di zaman banjir bandang informasi agar bisa menjaga dan menyelamatkan masing-masing diri.

Masalah sekecil pembuatan judul tampaknya remeh. Namun, judul-judul berita di media daring sekarang ini rentan jatuh sekadar menjadi metode *clickbait*, juga menjadi alat *framing* alias pembingkaian.

Oke, jika problem penjudulan berita dirasa kurang meyakinkan sebagai dasar asumsi minimnya literasi media, saya masih punya contoh lainnya.

Beberapa kali saya berkumpul dengan para anak muda dalam forum-forum diskusi, baik tentang kepenulisan maupun dunia digital. Meskipun mereka bukan jenis anak muda apatis atau dari kalangan yang

kekurangan akses informasi, ternyata banyak sekali yang tidak paham syarat kelengkapan berita sebagai sebuah produk jurnalistik.

Bayangkan, tentang 5W + 1H, juga tentang *cover all sides*, mereka tidak pernah mendengarnya sama sekali. Ini beneran.

Dari situ, saya membayangkan lebih jauh. Jika tentang syarat sehatnya sebuah berita saja mereka tidak tahu-menahu, lantas bagaimana mereka menyikapi berita-berita di media daring yang mereka konsumsi? Pada zaman ini, bagi media-media daring, sangat sulit untuk menjejalkan keseluruhan unsur pelengkap itu ke dalam satu badan tulisan. Semua berebut adu cepat, juga adu ringkas, sehingga unsur-unsur kelengkapan berita tadi dipecah ke dalam beberapa unggahan.

Dengan pemahaman tentang syarat kelengkapan berita, tentu anak-anak muda itu tidak akan puas hanya dengan membaca satu unggahan viral, jika unsur-unsur yang dibutuhkan belum tersaji sepenuhnya dalam tautan berita tersebut. Namun, karena tidak paham, akibatnya ya mereka akan merasa baik-baik saja hanya dengan membaca sebagian sisi. Adapun sisi lainnya terbang entah ke mana, dan mereka tidak berusaha mencarinya. Kira-kira begitu.

Dengan situasi yang mewabah sedemikian, akibatnya bisa melebar ke mana-mana. Salah satunya adalah publik tidak punya cukup kemampuan untuk membedakan antara informasi produk pers dan bukan produk pers. Walhasil, banyak dari mereka tanpa sadar lebih memilih melabuhkan harapan “pencerahan” pada informasi-informasi liar non-pers, misalnya bisikan-bisikan siluman dari rimba raya media sosial.

Kenapa begitu? Ya karena memang tidak ada kemampuan yang inheren dalam diri publik untuk membedakan antara informasi yang layak santap dan yang tidak. Informasi adalah informasi. Titik. Ditambah lagi, ketidakpercayaan publik kepada media-media pers makin memuncak, karena banyak media terlibat dalam keberpihakan telanjang kepada kubu-kubu politik.

Nah, semua keruwetan itu kian sempurna dengan kemampuan media sosial untuk menyusup secara sangat lincah ke relung-relung sempit perbincangan publik. Nyaris tidak ada kontrol yang kuat dalam dunia media sosial selain UU ITE. Itu pun masih jauh lebih banyak yang tidak terkontrol ketimbang yang berhasil dikontrol.

Dalam situasi gelap seperti ini, sependek yang saya tahu, tidak ada materi literasi media ataupun sekadar ilmu jurnalistik dasar dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah. Belum pernah saya

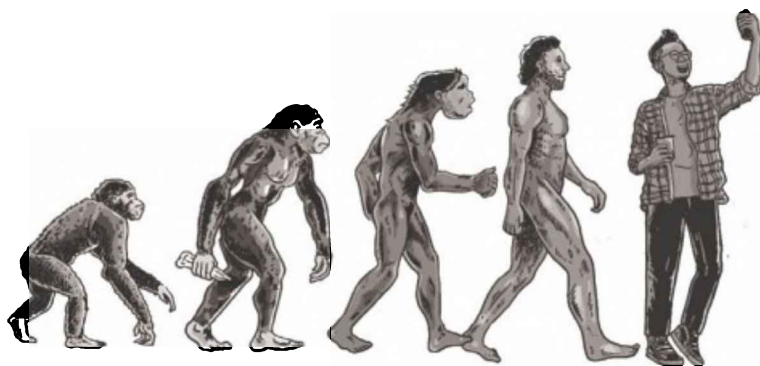
mendengar hal-hal demikian dibahas dalam pelajaran Bahasa Indonesia, misalnya. Materi pelajaran Teknologi Informasi pun lebih dititikberatkan pada bagaimana cara menggunakan alat-alat, alih-alih bagaimana menata paradigma dalam menyikapi produk yang dihasilkan oleh alat-alat tersebut.

Literasi media, pada zaman sekarang ini, sudah menjadi sebetulnya *life skill* wajib yang akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Ia harus disediakan sebagai bagian dari hak warga negara atas pendidikan. Saya berdoa, semoga pemerintahan yang terpilih secara sangat serius mau memikirkannya, dan menindaklanjutinya dengan langkah-langkah nyata.

Anda setuju dengan doa saya? Ketik “Amin”![]

-----

<sup>2</sup> Reuni bagi para peserta aksi yang berlangsung pada 2 Desember 2016 untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu merupakan tersangka atas kasus dugaan penistaan agama.—peny.



## Orang Pintar, Menulislah di Ruang Digital!

**J**udul tulisan ini beraroma mulut *trainer*. Biasanya kalimat senada dilontarkan pada pelatihan-pelatihan kepenulisan, sebagai motivasi agar para peserta bersemangat menulis sampai kesetanan. Menulislah maka Anda akan kaya!

Haha. Maaf, bukan itu yang saya maksud. Ini sesederhana permohonan agar orang-orang sekolahan mengisi lalu lintas dunia maya dengan gagasan dan perspektif bermutu, ikut mendidik masyarakat luas yang telah melahirkannya.

\*\*\*

Pada era ini, informasi di lini masa selalu menggerakkan kita. Menggerakkan persepsi kita, menggerakkan imajinasi-imajinasi kita, menggerakkan cara kita menyikapi peristiwa demi peristiwa. Bahkan, pada satu titik ia mampu menggerakkan fisik kita dalam tindakan-tindakan kasatmata.

Semangat masyarakat dalam membaca terbukti melonjak luar biasa. Membaca celotehan di grup WhatsApp, membaca unggahan di



Facebook, membaca *caption* Instagram, termasuk membaca tulisan-tulisan dari situs-situs web yang akurasiya ada pada level *wallahualam*. Lho, ini bukan sarkas. Semua kegiatan itu tetap merupakan aktivitas membaca, *to*?

Keriuhan dunia baca-membaca pada zaman ini dihidupi oleh siapa pun. Revolusi media sosial menyajikan parade kebebasan bersuara ala demokrasi superliberal dalam layar kecil di genggam tangan kita. Mulai profesor hukum hingga anak geng motor yang menyentuh buku saja seumur-umur belum pernah, semua bisa menyajikan cerita. Semua orang sekarang bisa menulis, dan semua jenis tulisan bisa terbaca!

Luar biasa, bukan? Indonesia adalah gudangnya penulis produktif! Ini harus kita rayakan! *Cheers!*

Nah, setelah bersulang, mari duduk sebentar. Kita lihat dulu, sebagian besar tulisan yang tersebar hingga WAG Karang Taruna itu tulisan yang seperti apa? Betulkah sebagian besar tulisan-tulisan itu mencerdaskan, memberikan data akurat dan bertanggung jawab, atau minimal mengajarkan pembenahan cara berpikir dan bersikap?

Tidak? Kenapa begitu? Ya karena yang lebih tekun menulis adalah populasi “penulis lepas” dan “penulis liar” yang memang tidak melandasi aktivitas mereka dengan pertanggungjawaban ilmiah apa pun. Contohnya: saya sendiri.

Bukan, ini bukan omongan genit sok rendah hati. Tapi, saya memang tidak memiliki kualifikasi keilmuan tertentu. Saya menulis asal sesuai dengan apa yang terlintas di pikiran, asal merasa bahwa yang saya pikirkan itu benar. Itu *tok*, tanpa landasan ilmiah yang sepantasnya. Dan malangnya, spesies seperti saya inilah populasi terbanyak penulis dunia maya!

Sampai di sini, muncul pertanyaan pentingnya: lalu di mana para sarjana kita? Seberapa mereka aktif melakukan pendidikan publik kepada masyarakat yang hidup di sekelilingnya? (Ketika saya menyebut istilah “sarjana”, maksud saya tentu tidak sesederhana lulusan S-1 perguruan tinggi, melainkan mereka yang memiliki kualifikasi akademis hebat, hingga level master dan doktor sekalipun.)

Memang, sih, lumayan juga ada beberapa orang berpendidikan tinggi yang mengisi keriuhan dunia maya. Namun, bisa dibilang cuma itu-itu saja, dan terlalu sedikit jika dibandingkan dengan angka jumlah sarjana atau master atau doktor kita secara keseluruhan. Nggak usah jumlah sarjana S-1, lah. Di antara para doktor Indonesia yang jumlahnya cuma

31 ribu orang itu, cuma ada berapa biji yang mendominasi percakapan di dunia maya?

\*\*\*

Saya menduga, penyebab minimnya jumlah sarjana aktivis dunia maya setidaknya ada tiga.

*Pertama*, para sarjana terlalu membatasi diri dengan menulis jurnal ilmiah. Harga diri intelektual mereka ditancapkan semata dengan jurnal.

Tentu saja itu tidak salah, sebab menulis jurnal wajib hukumnya, dan memang itulah salah satu tugas utama yang harus dipenuhi oleh para akademisi. Namun, jika berhenti di situ saja, gagasan mereka hanya akan disantap oleh sesama kalangan elite pengetahuan. Tidak bisa lebih dari itu.

Dalam bahasa yang lebih kejam, para sarjana yang semata menulis jurnal sekadar mengabdikan pada dunia keilmuan, tapi lupa mengabdikan kepada masyarakat dari mana mereka dilahirkan.

Maka, saya agak merasa *nganu* ketika beberapa tahun silam seorang profesor ternama yang mengajar di sebuah universitas di luar negeri berceramah di hadapan para akademisi UGM Yogyakarta. “Kalau kalian akademisi, ya jangan nulis di koran. Itu jatahnya para penulis. Akademisi ya nulis jurnal ilmiah!”

Saya serasa mendengar sejenis kesombongan, bahkan kampanye sikap antisosial.

Mungkin saya salah, atau cuma lagi PMS saja. Tapi, belakangan muncul di beranda Facebook saya tulisan Asit Biswas, profesor di National University of Singapore, dan Julian Kirchherr, peneliti di University of Oxford. Keduanya membuat pengamatan dan estimasi bahwa sebuah tulisan di jurnal ilmiah rata-rata hanya dibaca hingga tuntas oleh 10 orang. Ya, sepuluh orang!

Bayangkan, betapa elitisnya wacana yang dibagikan dalam jurnal-jurnal, dan betapa terbatas jangkauannya. Lalu, bagaimana gagasan orang-orang pintar di universitas memberikan faedah berlimpah bagi para jelata sudra pengetahuan macam kita-kita?

*Kedua*, kalau toh menulis untuk tujuan pendidikan publik, banyak sarjana yang masih berpikir bahwa media cetak tetap lebih berwibawa. Maka, mereka terus menulis di media cetak sembari tak percaya media

*online*. Ini riil, saya pernah menjumpai beberapa di antaranya. Mungkin satu-dua masih membawa jargon klasik, “Ah, rasanya bau kertas tetap romantis, dan tak tergantikan oleh bau layar sentuh semutakhir apa pun.”

Mereka tak sadar, bahwa salah satu koran cetak terkuat di Indonesia saja oplahnya konon sekarang cuma 200 ribu eksemplar. Anda menulis opini di koran tersebut, belum tentu terbaca oleh separuh dari ke-200 ribu pelanggan. Sebab, terlalu banyak pelanggan yang tak punya waktu untuk membaca halaman opini.

Bandingkan dengan tulisan di dunia maya. Sebuah tulisan laris sangat mungkin dibaca oleh lebih dari sekadar 300 ribu orang. Sebab, ada satu mekanisme di dunia *online* yang tidak dimiliki dunia cetak, yakni viral. Secara teknis, membagi sebuah tulisan di dunia maya sangat mudah. Dalam hitungan menit, sebuah gagasan tertulis bisa tersebar kilat ke puluhan grup WhatsApp, grup BBM, juga dibagi di laman-laman media sosial.

Anda tak mungkin menjalankan mekanisme viral pada tulisan di koran cetak, bukan? Atau, Anda punya waktu untuk memfotokopinya, lalu menyebarkannya di masjid-masjid bersebelahan dengan buletin jumatatan?

Kadang saya malah geli kalau ada penulis yang memaksa diri memviralkan tulisan cetak dengan cara memotretnya, mengunggahnya di akun Facebook, lalu orang-orang membacanya sambil memicing-micingkan mata, hehehe.

*Ketiga*, karakter dunia maya yang cair agaknya membuat martabat intelektual para sarjana terluka. Tulisan-tulisan dunia maya sering diracik dengan enteng, lentur, kadang sangat dipengaruhi warna tradisi oral. Sementara banyak sarjana yang masih percaya bahwa tulisan bermutu adalah tulisan yang bisa membikin strok pembacanya, dengan tumpukan istilah ilmiah, kutipan-kutipan hebat, serta nukilan referensi yang menggetarkan hati.

Dunia maya pun terlalu nista untuk dijadikan wadah gagasan adiluhung mereka.

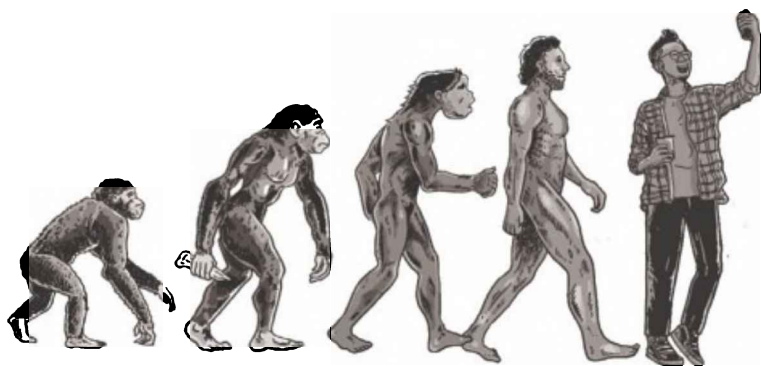
\*\*\*

Masyarakat kita ini, saya rasa, membuat lompatan peradaban yang tidak

taat silabus. Kita belum selesai dengan budaya literasi cetak, tahu-tahu tradisi literasi *online* sudah berkuasa dengan begitu cepatnya. Fondasi kita belum cukup kuat untuk menyaring banyak hal dan menyingkirkan sampah-sampah yang terlalu cepat memenuhi ruang-ruang akses informasi kita.

Maka, di sinilah para akademisi, para sarjana, para orang pintar yang jelas kualifikasi keilmuannya, ditantang untuk *ngeli ning ora keli*, kalau orang Jawa mengungkapkan. Menghanyutkan diri tapi tidak terhanyut. Menunggangi arus yang sudah sedemikian tak terlawan, masuk ke dalam pusaran keributan-keributan dunia maya, tetapi sembari berjuang agar di atas rapuhnya fondasi literasi tersebut semua orang bisa terus belajar.

Yaaa, kecuali Anda-Anda ikhlas pergulatan wacana di tengah publik berhenti di level begini-begini saja, dan itu artinya Anda-Anda lupa mendidik masyarakat yang sejatinya telah melahirkan Anda semua.[]



## Bu Guru Penggemar Viral

**S**eorang anak laki-laki kelas 1 atau 2 SD, berseragam Pramuka, tampak kebingungan sambil setengah menangis. Dia diminta gurunya menghitung  $5 \times 3$ . Anak itu bingung. Sekali waktu dia menjawab “Sebelas!”, kali lain menjawab “Ti ... ga ...” dengan ragu-ragu.

“Ini di tangan kananmu ada lima, di tangan kirimu ada lima, di jidatmu ada lima lagi. Ayo dihitungkan, lima kali tiga itu, lima ditambah lima, ditambah lima,” begitu kata Mbak Guru sambil terkekeh-kekeh geli.

Si anak bingung lagi, lalu menangis lagi. Di belakangnya, puluhan meja kursi di kelas tampak kosong, kemungkinan semua temannya sudah pada pulang. Anak yang bingung menghitung itu pun sudah menggendong tas punggungnya, tapi ditahan oleh Mbak Guru karena belum selesai menuntaskan tugas menghitung  $5 \times 3$ .

Si anak sepertinya sudah putus asa, dan mau keluar kelas menyusul teman-temannya. Tapi, Mbak Guru lagi-lagi menahannya, sambil melakukan satu hal yang agaknya paling penting dalam tugas pedagogisnya: memegang HP sambil mengarahkan kamera ke wajah muridnya yang berleleran air mata. Tentu, sambil sesekali tertawa.

Video itu saya temukan sedang ramai di Twitter. Di bawah unggahan video itu ada banyak komentar. “Lima satunya ilang ke manaaa?”; “Pulang dulu *to*, Leee!”; “Itu yang di jidatmu nggak kelihatan *po* lima-nya? Hahaha!”; “Ruweeet, ruwett!”.

Saya tercenung. Kemudian muncul pertanyaan kecil yang sangat teknis di kepala saya, yaitu kenapa Mbak Guru itu tidak meletakkan saja HP di tangannya, lalu mengambil kerikil atau lidi atau apa, jumlahnya 15 biji, lalu membaginya jadi 5 dan 5 dan 5 lagi, kemudian meminta muridnya itu menghitung satu per satu kerikil-kerikil itu?

Dalam bayangan saya yang tidak pernah jadi guru ini, dan yang sangat beloon dalam matematika ini, langkah semacam itu cukup mudah dipahami. Lima dikali tiga adalah lima biji kerikil yang digenggam jadi satu, jumlahnya ada tiga genggam. Seperti itu, bukan?

Belum lama berselang, saya pun terpaksa menjadi guru Matematika untuk anak saya yang kelas 5. Anak perempuan saya itu tak kunjung paham dengan FPB dan KPK (kelipatan persekutuan terkecil, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi). Saya sendiri sudah lupa, atau memang dulu tak pernah paham dengan materi pelajaran yang satu itu. Tapi, kemudian saya mencarinya di YouTube, dan ketemulah penjelasannya.

Akhirnya, saya menderetkan kelipatan-kelipatan dari tiga bilangan, berjajar-jajar panjang sekali. Sampai kemudian ketemulah satu bilangan yang sama untuk ketiganya, dan menjadi bilangan kelipatan “persekutuan”. Anak saya paham, saya sendiri pun jadi lebih paham, dan kami berdua bahagia selamanya.

Maka, saya agak heran, kenapa Mbak Guru lebih suka memegang kamera HP alih-alih mengambil kerikil-kerikil? Bukankah bagi si murid menghitung kerikil akan lebih mudah dimengerti daripada membayangkan lima titik di jidatnya sendiri?

Saya tidak punya informasi kapan video itu diambil. Bisa baru saja, atau sudah produk lama. Tapi, mari bayangkan suasana kita pada hari-hari ini. Kita sudah cukup lama, hampir setahun penuh, terjebak dalam situasi yang menyebalkan. Segenap tugas kehidupan yang sewajarnya dijalankan secara maksimal terpaksa dilakukan dalam mekanisme kompromis berupa sistem daring.

Saya tahu, ada banyak hal yang dapat diadaptasikan. Toh, tak sedikit wilayah aktivitas yang justru lebih efektif jika dijalankan secara jarak jauh. Misalnya aneka jenis pertemuan dan diskusi, pekerjaan-pekerjaan berbasis *online*, dan sebagainya. Tetapi, ternyata beberapa hal tetap menanti sentuhan suasana pertemuan antarmanusia, dalam interaksi-interaksi yang lebih “bernyawa”. Dunia pendidikan, salah satunya.

Beberapa kawan saya yang berprofesi guru pun mengkhawatirkan soal-soal begitu. Betul bahwa materi-materi pelajaran yang bersifat

kognitif bisa ditransfer dari guru kepada murid, sebisa-bisanya. Namun, bagaimana dengan pendidikan karakter? Karakter adalah wilayah yang *so human*. Ia bisa diajarkan secara maksimal hanya jika ada interaksi dan komunikasi yang juga maksimal, dan interaksi serta komunikasi yang maksimal rasa-rasanya cuma akan tercapai melalui perjumpaan.

Karena itulah, para orang tua murid dan para guru sendiri menyimpan kerinduan akan kembalinya sekolah tatap muka, di tengah situasi pandemi yang masih saja tak jelas juntrungannya. Dan, dalam suasana galau begini, bisa-bisanya malah tersebar video seorang guru yang lebih suka memviralkan kekurangan muridnya, daripada berjuang keras membuat muridnya mengerti sesuatu yang tak kunjung dipahaminya.

Tenang, Saudara. Saya tahu pasti, Mbak Guru yang saya ceritakan di atas itu sama sekali bukan representasi para guru di Indonesia. Ia cuma kasus, atau oknum kalau istilah Orba-nya. Dan, saya yakin dia pun bukan sejenis guru yang jahat atau semacamnya. Ia cuma kurang sensitivitas, dan bisa jadi merupakan salah satu tipe saja dari “korban suasana”.

Akan tetapi, dari situ kita bisa melihat bahwa apa yang saya sebut “suasana” itu telah sangat menguasai kita. Selama bulan-bulan pahit yang kita lalui belakangan ini, ke-daring-an telah begitu menyatu dengan alam bawah sadar kita. Apa yang semula kita rencanakan sebatas sebagai sarana, malah kemudian terlalu menubuh bersama diri kita.

Maka, seorang kawan lain bercerita bagaimana sarana belajar daring membuat banyak muridnya dilaporkan terjebak candu *game online*, bahkan terseret video-video porno yang (ternyata) sangat mudah ditonton di akun-akun Twitter. Kendali yang tak mudah atas akses informasi (karena HP dan internet sudah dipegang sehari-hari) membuat banyak anak ibarat ular-ular kobra yang berhamburan lepas dari sarangnya.

Dan, hari-hari minim kontrol di tengah situasi serbadaring ini telah dengan sangat drastis menggeser alam pikiran siapa saja. Mulai murid, gurunya, dan kita semua.

Maka, tak usah heran-heran amat melihat para pejabat publik lebih sibuk mengurus konten akun medsosnya, mengisinya dengan aksi-aksi *viralable*, ketimbang menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan kepentingan publik yang menjadi tanggung jawabnya. Sebelum pandemi, dunia daring memang telah menguasai kita, tapi pasar konstituen daring selama pandemi semakin menggiurkan saja.

Bedanya, para pejabat dan tokoh publik mana pun memang membutuhkan amplifikasi atas secuil sisi diri mereka. Ada sisi gelap, ada sisi terang, sebagaimana layaknya manusia biasa. Nah, yang mereka viralkan tentu saja sisi-sisi terangnya, atau sisi gelap yang dibikin seolah-olah terang. Hasilnya adalah persepsi dominan di mata publik luas: si tokoh akan lebih dikenal karakter terangnya, sedangkan sudut gelapnya berhasil disembunyikan entah di mana.

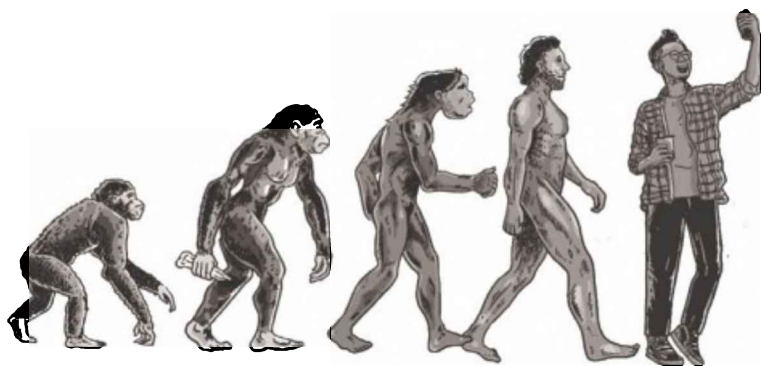
Tetapi, bagaimana dengan seorang anak yang diviralkan? Sisi apanya yang diviralkan?

Beruntung sekali jika ada anak ajaib yang menjadi objek amplifikasi saat dia sedang berada dalam performa terhebatnya. Tapi, bagi anak-anak dari jenis yang bingung dengan perkalian  $5 \times 3$ , dia akan lebih dikenal sebagai anak bego, dengan inteligensi kurang, dan sulit diharapkan. Lalu video itu tersebar luas, merayap cepat di lini masa, menerobos sekat-sekat grup WhatsApp dan Telegram, lalu ditonton oleh kedua orang tuanya, teman-temannya, tetangga-tetangganya. Kemudian hancurlah kepercayaan dirinya, dan potensi dia yang sesungguhnya akan *nyungsep* nun di bawah sana.

Ah, mungkin saya cuma lebai dan sok heroik. Tapi, kalau naluri untuk bikin konten viral memang jadi godaan bagi siapa saja, rasanya lebih pas kalau jangan sekali-kali mengambil kelemahan anak-anak sebagai materinya. Itu pamali terbesar.

Kalau masih saja keinginan untuk viral itu sulit ditahan, mending main TikTok saja. Goyang-goyang dikit, viral. Goyang-goyang dikit, viral.[]





## Lagi-Lagi Kebelet Viral

**S**aya sudah menonton video heboh itu. Seorang anak kecil tertangkap kamera sedang membuka ponsel. Di sebelah kirinya duduk seorang perempuan dewasa berkerudung. Si pembuat video amatir beberapa kali memfokuskan kameranya pada wajah si anak, lalu wajah si perempuan berkerudung, dan terutama pada layar ponsel di tangan si anak. Ya, sebab yang sedang ditonton anak itu di layar ponsel adalah sebuah video porno!

Karena video amatir itu sudah telanjur viral, kemungkinan besar Anda juga sudah melihatnya. Jika memang iya, lantas apa yang Anda pikirkan? Apakah persis seperti pikiran saya?

Ini yang seketika terlintas di otak saya. Si anak kecil itu duduk menunggu sesuatu. Sepertinya mereka sedang mengantre di sebuah kantor layanan publik. Perempuan dewasa berkerudung itu pasti ibunya. Agar si anak tidak rewel karena bosan dalam penantian, si ibu meminjamkan ponsel kepada anaknya. Si anak pun menonton. Lalu, ternyata yang ia buka adalah YouTube. Dan, di YouTube itu tanpa sengaja ia membuka video porno. Begitu.

Eh, tunggu, tunggu. Video porno di YouTube? Bukannya video-video semacam itu sudah diblokir oleh Kemenkominfo? Selain memblokir konten-konten radikalisme, perjudian, dan situs-situs hoaks, pasukan penyapu ranjau di Kemenkominfo juga menghabiskan konten-konten

berbau pornografi di internet. Artinya, tidak mungkin si anak itu menonton video dari YouTube. Arti selanjutnya: video porno di ponsel yang ia pegang itu adalah koleksi pribadi ibunya! Ya, catat ini sekali lagi: koleksi pribadi ibunya!

Lalu, kita mengingat wajah sang ibu. Kita pun tentu saja mengingat wajah si anak. Karena bukan hanya saya yang berpikir seperti ini, praktis ini menjadi ingatan publik. Akibatnya, imaji atas tokoh-tokoh di video itu sudah berkembang menjadi imaji massal.

Pertanyaannya, betulkah bayangan kita semua itu? Seberapa akurat kesimpulan kita hanya dengan bekal video itu? Bagaimana jika yang terjadi sesungguhnya jauh dari apa yang diam-diam kita simpulkan? Bagaimana jika ternyata si ibu berjilbab itu bukan orang tua si anak, dan orang tua si anak sedang ada di depan mendatangi loket pelayanan?

Bagaimana pula jika video porno itu ternyata cuma hasil kiriman di sebuah grup WhatsApp, dan orang tua si anak belum tahu? Jadi, kiriman itu tadinya belum sempat diunduh, tapi kemudian si anak membuka WhatsApp sambil duduk menunggu orang tuanya, lalu ia memencet tanda kiriman itu dan otomatis video itu terunduh, lalu si anak menontonnya, sementara si pembuat video amatir tidak tahu dan tidak merekam proses-proses sebelumnya.

Mungkinkah yang demikian itu terjadi? Atau, semustahil apa itu terjadi?

Ah, entah ada berapa puluh kemungkinan yang jauh dari bayangan kita—para penonton video viral—padahal kita sudah telanjur mengetok palu dan mengambil kesimpulan-kesimpulan. Baik sekadar kesimpulan atas deskripsi peristiwa tersebut, maupun kesimpulan atas moral orang lain.

Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan ini semua?

\*\*\*

Terlalu banyak informasi yang kabur dalam sebuah video amatir, pada saat warganet sangat canggih menjalankan peran sebagai juru tafsir yang meracik makna-makna di balik video. Sementara itu, para pembuat video amatir terlalu gegabah mengaku produk yang mereka bikin itu sebagai karya *citizen journalism*, atau minimal sebagai karya yang menjalankan peran kontrol sosial dalam sebuah masyarakat.

Di sini tampak bahwa akar masalahnya terjulur ke mana-mana. Inilah yang saya pikirkan kemudian.

Yang paling dasar, ada masalah dalam dunia jurnanisme kita. Masa transisi dari media cetak ke media digital membuat kita gagap dan belum cukup percaya diri dalam mendefinisikan jurnanisme pada era disrupsi. Literasi masyarakat yang semula memang belum cukup mapan terus bergoyang-goyang dalam ketidakjelasan nasib, karena gempuran informasi jagat maya yang tiada henti.

Dalam situasi masyarakat berliterasi rendah, semua orang tiba-tiba ingin memosisikan diri sebagai agen informasi. Semua orang punya alatnya, semua orang bisa menyebarkannya. Hanya dengan peranti-peranti itu, kita tiba-tiba merasa cukup punya otoritas untuk menyebarkan informasi apa pun. Bagaimana dengan standar-standar penyampaian informasi? Ah, sudah lupa. Atau memang belum tahu. Kenapa belum tahu? Ya karena standar jurnanisme pada masa ini pun semakin tidak menentu.

Masyarakat kita memang belum tuntas dengan literasi. Tiba-tiba internet muncul, dan air bah informasi menghajar kita setiap detik. Stamina membaca kita tak punya, tetapi tiba-tiba kita disodori berjibun pilihan “berita”.

Walhasil, antara produsen dan konsumen informasi saling bersambut, sehingga karakter media daring pun mengikuti selera publik. Maka, produsen berita memberikan apa yang dimaui oleh publik konsumen berita. Jadilah berita-berita muncul singkat apa adanya, tanpa memenuhi standar kelengkapan berita yang semestinya. Singkat, menggoda, dan tidak memakan tenaga untuk membaca atau menontonnya.

Di satu sisi, publik jadi tidak percaya pada kualitas media. Di sisi lain, selera dan definisi publik atas informasi turut terbentuk. Informasi atau berita yang bagus adalah berita yang ringkas, sekilas, memancing rasa penasaran, bombastis, dan berpotensi viral!

Di tengah iklim ketidakpercayaan publik kepada media, sekaligus publik yang merasa memiliki alat dan kualifikasi setara dengan para produsen berita, akhirnya segenap anggota masyarakat pemegang pusaka telepon pintar termotivasi untuk turut menciptakan berita-berita. Apalagi kalau samar-samar mereka pernah mendengar tentang jurnanisme warga dan demokratisasi informasi. Wah, lengkaplah sudah. Masyarakat kita tumbuh menjadi masyarakat yang menjadikan predikat “viral” sebagai sebarang eksistensi dan cita-cita! Hahaha.

Seperti itulah bayangan saya tentang situasi yang melatari video viral si anak penonton video porno. Si pembuat video amatir ingin unggahannya segera bikin heboh. Dia ingin dikaruniai predikat sebagai agen pendobrak kesadaran publik. Dia merasa punya kualifikasi yang cukup untuk menyebarkan kabar, meski tidak paham standar-standar berita yang layak.

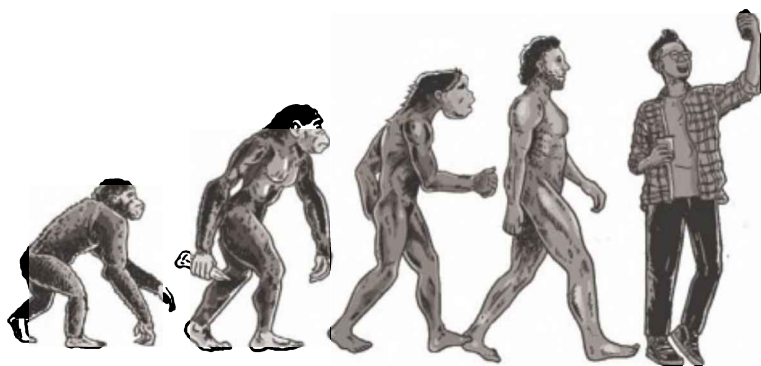
Maka, jangan bertanya kepada si pembuat video amatir tentang keberimbangan. Jangan bertanya tentang etika penyebaran berita. Jangan bertanya tentang akurasi atau duduk perkara peristiwa yang sesungguhnya. Jangan bertanya tentang di mana tanggung jawab moralnya, padahal secara langsung tanpa merekam dia bisa mengentikan sesuatu yang buruk, cukup dengan berkata: "Nak, jangan!". Lebih jauh lagi, jangan pula bertanya tentang bagaimana efek buruk secara sosial dan secara mental, yang sangat mungkin menimpa ibu itu berikut anaknya.

Abaikan itu semua. Abaikan saja. Yang penting unggahannya segera menembus 100 K *share*!

Kasus dengan pola seperti video anak penonton film porno itu rasanya tak cuma satu. Belum lama berselang, ada juga video viral tentang seorang ibu yang mengamuk dan menggigit tangan seorang polisi. Saat belakangan muncul informasi tambahan bahwa si ibu itu memang memiliki riwayat tekanan kejiwaan, informasi itu tidak tersebar semasif videonya. Apa Anda kira sebuah klarifikasi bisa lebih ramai daripada berita awalnya? *Nehi, nehi*. Tidak pernah ada ceritanya.

Kenapa?

Sebab, kita memang lebih suka bergembira dalam mengumpat dan tertawa, daripada berpikir dan mencerna. Jadi, agaknya bukan hanya si ibu penggigit polisi itu yang punya masalah jiwa. Sebab, masing-masing kita pun terjerat problem yang sama, tanpa kita pernah menyadarinya.[]



## **“Terforsir Aplikasi” dan Jiwa Kehumasan Kita**

**“A**da temanku yang meninggal gara-gara terforsir aplikasi, lho, Mas.” Tiba-tiba, muncul kalimat ganjil itu dari mulut Mas Dayat, anggota Brimob kebanggaan kampung kami yang sekaligus juga rekan saya segrup ronda.

Ceritanya, malam Minggu lalu, Pak Parjono memasak rica-rica entok untuk kami, dan menghidangkannya di pos ronda sebelah timur desa. Sembari melahap menu istimewa itu, kami mengobrol tentang bahaya makan tengah malam dan gelambir perut yang semakin sulit menyusut.

Saya tahu, rica-rica jadi kurang nikmat jika disantap bersama obrolan bertopik keluhan kesehatan usia paruh baya. Tapi, jauh lebih tidak nikmat lagi jika daging empuk entok dan bumbu gurih pedasnya itu berpadu dengan kabar kematian yang menimpa seseorang.

Meski demikian, agaknya kabar duka itu terpaksa disajikan Mas Dayat, sekadar untuk menyampaikan bahwa lemak tidak selalu lebih buruk dibanding olahraga, terlebih lagi bila olah raganya membuat seseorang “terforsir aplikasi”.

Waduh. Terforsir aplikasi? Apa-apaan itu? Saya sebagai pengamat bahasa yang levelnya cuma lima senti di bawah Ivan Lanin ini (ehem!) segera memindainya sebagai istilah baru yang wajib dipantau.

Usut punya usut, teman Mas Dayat itu adalah seorang pesepeda yang rajin, dan sangat kecanduan aplikasi. Entah aplikasi di HP entah di jam tangan pengukur porsi olahraga. Setiap kali bersepeda, yang ia kejar adalah target-target yang nantinya tercatat pada aplikasinya. Akibatnya, dorongan aplikasi itu membuat dia lupa mengukur batas kemampuan, sehingga tubuh dipaksa terus bergerak meski sudah sangat kepayahan.

Pendek kata, aplikasi menjadi ekstasi yang tak henti mendorongnya mengayuh dan mengayuh, apalagi kalau ia sedang menempuh rute-rute penuh tantangan. Lha kenapa terus memaksa diri? Kata Mas Dayat, sebab catatan jarak, kecepatan, berapa ribu kalori yang terbakar, dan sebagainya di aplikasi itu nantinya akan bisa menjadi tayangan kebanggaan. Gambarnya bisa melintas di *story* WhatsApp, atau nongol di unggahan Instagram.

Saya langsung membatin, urusan kepraktisan dan kesenangan sepertinya bergeser semua jadi perkara kehumasan. Gerak badan itu, kan, hal praktis untuk menjaga kesehatan, atau dalam sisi tertentu menjadi hobi yang membawa kegembiraan. Tapi, semua itu seketika berubah menjadi tuntutan *public relation*, alias urusan pengumuman. Kebutuhan berolahraga akhirnya jadi nomor dua, sedangkan posisi prioritas direbut oleh orientasi “diseminasi informasi” bagi massa.

Sampean mungkin menuduh saya sangat tidak berakhlak karena membicarakan sisi buruk orang yang sudah meninggal (astagfirullah), tetapi sesungguhnya saya tidak sedang menyalahkan sepenuhnya teman Mas Dayat. Sebab, jebakan semacam “forsir aplikasi” dan orientasi kehumasan itu benar-benar memerangkap hampir semua kita.

Coba, baru beberapa hari yang lalu kita melihat parade buku-buku yang dijejerkan di laman medsos teman-teman kita, sebagai salah satu bagian terpenting dari kaleidoskop mereka. Beberapa di antaranya dipadu dengan kalimat pilu yang amat membangkitkan rasa haru, semacam, “Aduh, sayang sekali tahun ini aku cuma berhasil merampungkan 33 buku. Ini sebagian di antaranya.” Lalu, kita memandang foto tumpukan buku-buku tebal yang bikin terpukau dan berdecak kagum, sembari menahan diri untuk tidak berkomentar, “Gile bener, ni orang pinter banget, sih, makanannya buku-buku berat dan tebal-tebal gini.”

Saya percaya saja mereka telah membaca semuanya. Tapi, hati nurani saya yang julid ini tergoda untuk membayangkan, andai tidak ada Facebook atau Instagram atau Goodreads untuk memajang deretan

buku-buku itu, seberapa besarkah semangat bisa dikobarkan untuk meluangkan ratusan jam dalam kesunyian demi mengeja ribuan halaman dan jutaan kata hingga khatam semua?

Jujur, saya ragu. Membaca memang merupakan satu bentuk kesenangan, dan saya sendiri pun kadang kala merasakan. Tapi sekarang, kesenangan itu sudah mendapatkan dukungan berupa kesempatan kehumasan. Nah, lambat laun, apa yang berposisi sebagai dukungan dan kesempatan itu bermetamorfosis menjadi cita-cita alias tujuan.

Maka saya curiga, bagi banyak sekali orang, aktivitas membaca sudah lama tidak berdiri sebagai membaca untuk membaca itu sendiri. Ia bergeser menjadi membaca untuk berbicara, membaca untuk menulis, kemudian ujungnya membaca untuk diumumkan kepada dunia!

“Ah, itu kan sama dengan jargon ‘apa-apa demi konten’ *to, Bro?*”

Oh, beda, Mas. Kalau “demi konten” itu kita rela melakukan apa pun demi membikin konten. Wujudnya, ada orang dengan sengaja membongkar privasi dirinya sendiri cuma biar bisa *posting* di Instagram, nge-*prank* pakai sampah sambil bilang itu sedekah cuma biar bisa bikin video YouTube, atau melakukan segala jenis hal nista tiada guna lainnya semata-mata biar bisa terus memproduksi konten untuk kanal-kanal medsosnya. Tapi, yang saya bicarakan ini adalah betapa banyak hal yang pada fitrah dan *khittah*-nya sangat berguna, atau bisa kita jalankan secara praktis-pragmatis demi sebuah nilai kemanfaatan, tiba-tiba berubah nilainya karena orientasi kehumasan.

Walhasil, olahraga yang sangat berguna berubah menjadi bukan olahraga itu sendiri, membaca yang sangat bermanfaat untuk kewarasan menjadi bukan membaca itu sendiri, dan ... apa lagi, ya?

Oh ya. Kemarin, saya yang sedang disergap kerinduan pada jalan-jalan ini bertanya kepada teman-teman Facebook saya, “Gaesss, kalau sekarang saya mau piknik di masa non-liburan, bukan di akhir pekan, di daerah yang agak sepi dari kerumunan, itu masih amoral secara per-Covid-an enggak, ya?”

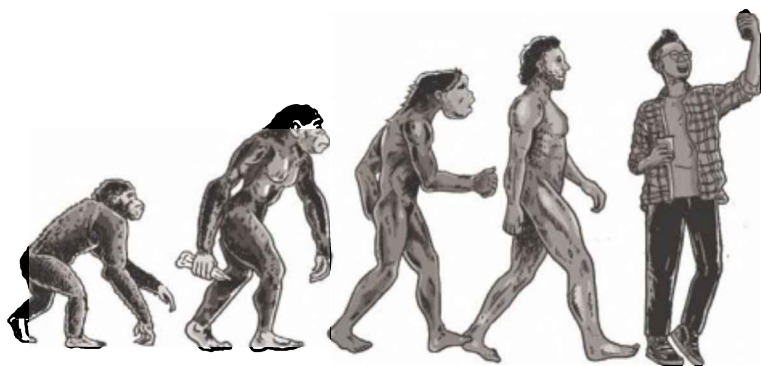
Ternyata, pertanyaan itu mendatangkan sekian komentar dengan satu nada yang sama: “Boleh saja, tapi mending foto-fotonya nggak usah di-*posting*.”

Dan, tidak saya sangka, dari lubuk terdalam perasaan saya secara mengejutkan menyembul satu gugatan: “Ha? Nggak usah di-*posting*? Serius? Piknik macam apa itu yang nggak di-*posting*?”

Seketika saya sadar, saya pun kepingin jalan-jalan bukan semata untuk rileks, untuk kegembiraan diri, atau untuk jalan-jalan itu sendiri. Saya terjebak orientasi kehumasan, tak bedanya dengan siapa pun yang jalur-jalur kesenangan hidupnya semakin tergadaikan.

Saya sudah terforsir aplikasi! *OMG!*☹





## Ketika Gambar-Gambar Diblokir

**D**iblokirnya fitur gambar dan video di media sosial pada sekitaran kerusuhan 22 Mei 2019 lalu semestinya membuat kita sadar: ada banyak sekali yang hilang dari kemampuan kita sebagai manusia.

Rentang waktu pemblokiran kemarin itu hanya tiga hari, lebih kurang. Tapi, apa yang kita derita? Sebagai praktisi Facebook penuh waktu, saya merasakan ada *krowak* yang besar dari eksistensi saya. Apalah artinya main Facebook kalau tidak bisa pamer foto menu sahur dan buka, tidak bisa memajang citra palsu intelektual dengan foto buku terbaru yang sedang saya baca, tidak bisa menghadirkan senyum anak saya dalam rangka peneguhan identitas sebagai papah idaman sedunia.

Demikian pula, di mana afdolnya ketika saya berbincang dengan teman-teman tapi tidak bisa memandang *profpic* mereka, tidak bisa pula melihat aktivitas pamer mereka dari jenis yang lebih rupa-rupa?

Itu baru di Facebook. Instagram lebih mampus lagi, tentu saja.

Menginstal VPN memang bisa jadi solusi instan. Tapi, itu bisa kita jalankan kalau kita cuma ingin bermedsos dengan diri kita sendiri. Padahal, sesungguhnya hajat paling dasar yang ingin dituntaskan oleh umat manusia dengan media sosial bukanlah “melihat”, melainkan “dilihat”. Anda sadar itu, bukan? Lalu, buat apa saya dan sebagian kecil teman menginstal VPN, sementara ribuan *follower* tidak?

Pendek kata, ada kesakitan psikologis kolektif yang luar biasa hanya dengan pemblokiran gambar dan video. Ini situasi yang amat lucu.

Dulu, ketika saya masih memakai Siemens C35, yang tidak mengenal sama sekali fitur foto dan video itu, saya merasa hidup ini baik-baik saja. Saya bahkan menemukan keajaiban dengan kesempatan berkirim kabar kepada pacar, sementara posisi kami berjauhan. Saya merasa betapa mudahnya kehidupan, karena bisa dengan gampang membikin janji dengan kawan untuk bertemu di mana jam berapa.

Tentu bukan cuma saya yang begitu. Semua orang juga begitu. Tidak ada ketergantungan pada gambar-gambar dan video pada saat itu. Kita bisa menjalani hidup yang sempurna hanya dengan teks dan kata-kata, juga sedikit suara.

Akan tetapi, lambat laun, saat memegang Siemens C35 itu pula, saya heran melihat masa yang lebih lalu. Sebelum mengakses ponsel hitam kecil itu, saya bisa membikin janji dengan siapa pun untuk ketemu di mana dan jam berapa, tanpa alat apa pun, sekaligus tanpa kecemasan akan kegagalan berjumpa. Tanpa ponsel, waktu itu toh semua juga baik-baik saja.

Sebelumnya lagi, saya dan beberapa kawan menempuh perjalanan bermotor bersama dari Jogja ke Bali, tanpa secuil pun kekhawatiran, “Waduh, nanti kalau terpisah di jalan gimana kita ketemu?” Kekhawatiran semacam itu tiba-tiba muncul besar sekali saat orang-orang sudah memegang HP. Bahkan, hari ini saya benar-benar tidak bisa menalar, bagaimana bisa saat perjalanan itu kadang kami terpisah jauh di atas motor masing-masing, tapi kok tetap bisa bertemu lagi?

Semuanya lebih absurd lagi pada hari ini. Dan, saya pernah merasa hidup ini begitu tak berguna, ketika pada suatu tengah malam saya menghabiskan waktu hampir dua jam putar-putar bolak-balik di satu area untuk mencari rumah kawan saya, padahal sebelumnya sudah beberapa kali saya ke sana.

Alasannya manis sekali. Selama ini, saya menggantungkan takdir perjalanan saya pada Google Maps untuk tiba di sana. Saya pasrah total kepada suara Mbak-Mbak yang “*Turn left, and your destination will be on the right.*” Dan, karena malam itu baterai HP saya drop, *charger* pun lupa terbawa, saya benar-benar terjerumus pada kesesatan yang nyata.

Mari kita hitung, ada berapa kemampuan alami kita yang lenyap seiring perkembangan teknologi. Dari potongan-potongan cerita kecil yang saya tuliskan itu saja, sudah tampak beberapa kehilangan yang mungkin baru detik ini kita sadari.

Kemampuan pandangan mata kita yang jeli telah hilang. Kita sulit menemukan penampakan satu sosok kawan kita di tengah kerumunan. Dulu kita sangat ahli dalam bidang itu sehingga janji di tempat riuh pun tak jadi soal, membidik tampilan visual seorang kawan dari jarak yang jauh pun bukan hambatan.

Kemampuan otak kita mengingat rute jalanan yang berkelok-kelok lenyap sudah. Kepasrahan kita pada kendali GPS dan Google Maps membuat kita melemparkan jauh-jauh kemampuan purba tersebut, seiring dengan tergerusnya keterampilan untuk berkomunikasi dengan warga lokal. Tak ada lagi “Maaf, Bu, numpang tanya. Arah ke Magelang mana, ya?”

Tak terkecuali dengan video dan gambar-gambar yang sempat diblokir itu. Seberapa jauh kita kehilangan *skill* komunikasi efektif tanpa gambar-gambar? Apakah sekarang otak kita mulai tumpul dan tidak peka dalam memahami deretan kata-kata? Selama tiga hari pemblokiran itu, ingatkah Anda pada kesan ketidaksempurnaan informasi jika citra visual tidak menyertai kata-kata?

Ini bukan cuma tentang informasi yang benar. Pada masa kejayaan foto dan video, bahkan hoaks pun ternyata jadi sulit disebar. Ledakan emosi massal ternyata sangat tergantung pada foto-foto. Seolah kita tiba-tiba lupa bahwa dulu kala kabar burung bisa menyebar sangat luas dan cepat hanya dengan ucapan dari mulut ke mulut, atau dari kertas fotokopian berisi kisah mimpi Imam Masjidil Haram yang harus kita perbanyak hingga 40 lembar itu.

\*\*\*

Betulkah perkembangan teknologi membuat hidup kita lebih mudah? Atau, sebenarnya derajat kemudahan hidup kita tetap sama saja sepanjang masa, karena setiap kali hadir satu kemudahan sudah pasti lahir pula satu kesulitan?

Steven Pinker, dalam bukunya *Enlightenment Now* yang kondang itu,

tetap ngotot bahwa peradaban terus bersifat progresif. Ia melihat, bagaimanapun kondisi sekarang jauh lebih baik daripada masa lalu. Kemiskinan ekstrem berkurang 90%, buta huruf diberantas habis-habisan, harapan hidup jauh lebih panjang, dan sebagainya.

Semua itu disempurnakan dengan segala fasilitas modern, mulai listrik, jaringan transportasi, televisi, antibiotik, dan tentu saja internet. Tingkat hidup rakyat kelas menengah bawah sekalipun akan membuat cemburu Raja Inggris dan Kaisar Prusia pada abad ke-18, kata Pinker.

Akan tetapi, apakah Pinker juga ikhlas melepas segenap kemampuan *survival* dasar manusia seiring dengan segala kelengkapan dunia modern yang dia banggakan itu?

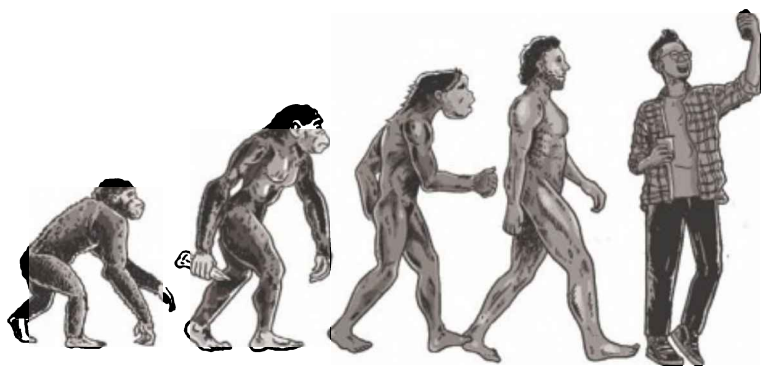
Saya ambil contoh. Jika situasi ketergantungan pada Google Maps berjalan 100 ribu tahun lagi, bukankah hukum evolusi bisa jadi akan menggilas habis gumpalan pengolah kecerdasan spasial di otak kita? Lalu, apa yang akan terjadi jika pada hari itu tiba-tiba teknologi penunjuk jalan hancur berkeping-keping?

Kita akan terus disuguhi bukti-bukti bahwa pada awalnya manusia memang menciptakan teknologi, tapi kemudian teknologilah yang “menciptakan” manusia. Pada saatnya nanti, akan lahir manusia-manusia dengan spesifikasi tertentu: yang tidak kuat berjalan lebih dari 10 meter, yang tidak bisa membaca peta, yang tidak mampu membuka mulut untuk berkomunikasi secara lisan dengan makhluk satu spesies di kiri-kanannya. Dan, itu bukan cuma isu kemampuan sosial. Bahkan, kemampuan biologis!

Ah, tapi itu terlalu jauh. Kita bayangkan hal buruk yang dekat saja. Andai malam nanti beberapa bongkah benda luar angkasa menghantam instalasi-instalasi listrik kita, membuat kita tidak bisa menerangi kamar-kamar kita, tidak bisa mengisi bak-bak mandi kita, tidak bisa menonton televisi bersama keluarga, tidak bisa mengakses kabar kabur dari telepon genggam di tangan kita, dan itu berlangsung satu bulan saja, akan ada berapa orang yang jatuh depresi bahkan bunuh diri?

Saat saya berumur 5 tahun, sebelum Bapak-Bapak PLN datang ke kampung kami untuk mulai membangun jaringan listrik, kami jelas tidak perlu membayangkan ada orang depresi hanya karena rumahnya gelap atau tidak bisa mengakses berita.

Lalu, yakinkah Anda bahwa manusia berkembang semakin hebat, dan bukan malah semakin rapuh?[]



## Share Loc yang Mengubah Wajah Kita

**S**alah satu agenda utama saya setelah meninggalkan Perth dan pulang ke Bantul adalah sowan kepada anak-anak muda yang tajam dan penuh semangat, Agus Mulyadi dan Prima Sulistya.

Malam itu saya minta mereka memberi ancar-ancar di mana kami bisa berjumpa. Ekspektasi saya dengan pertanyaan itu sederhana saja. Yakni Prima akan mengetik via WhatsApp, “Jalan Kaliurang sebelum Ull ada lampu merah, belok kanan, sekitar dua kilo sehabis jembatan ada jalan kecil sebelah kios bensin, belok kiri teruuus. Nanti ketemu satu-satunya pertigaan di sebelah kanan, masuk, terus ada banyak motor parkir di sebelah kanan jalan. Itu tempatnya, Mas.”

Tapi, ternyata bukan itu yang saya dapatkan. Prima cuma memencet *share location*, dan selesai perkara. Jadi, saya pun berangkat menyetir kendaraan sambil *tengak-tengok* HP, melihat ke tanda panah biru di Google Maps yang mengantarkan saya hingga ke rumah di lereng Merapi itu.

Ini sedikit mengejutkan buat saya. Ada semacam gegar dan gagap budaya, segagap saya mendengar kata Go-Jek, Go-Car, Grab, Go-Food, Go-Massage, dan go-go lainnya yang bermunculan dalam obrolan sehari-hari bahkan hingga di sudut-sudut kampung.

Di Perth, pemakaian aneka aplikasi semacam itu kalah masif ketimbang di Jogja. Taksi Uber memang merajalela, dan mulai mencekik taksi konvensional. Tapi, taksi motor tidak ada. Orang juga tetap lebih banyak masak di rumah atau nongkrong di kafe ketimbang pesan makan malam lewat aplikasi. Barangkali karena Perth tidak semacet Jogja, sehingga jalan sendiri masih tetap mudah.

Untuk mendatangi suatu alamat, orang Perth memakai GPS. Saya sendiri memakai Google Maps dalam menjalankan pekerjaan saya di jasa pengiriman, tanpa pernah memencet tombol *direction*. Itu karena buat saya lebih asyik membaca Google Maps sebagai peta, bukan sebagai suara aba-aba.

Akan tetapi, seumur-umur di Perth sebagai kurir, belum pernah satu kali pun ada orang mengirim *share location* ke saya.

Bisa jadi ada dua sebabnya. *Pertama*, karena orang Perth sangat sedikit yang memakai WhatsApp (mayoritas mereka masih pakai SMS!). *Kedua*, karena alamat-alamat sudah tertata rapi dan jelas, lengkap dengan nomor rumah masing-masing. Dengan begitu, penggunaan GPS masih tetap jadi pilihan paling gampang.

Saya tidak hendak membicarakan pemakaian terobosan IT dan alat-alatnya yang terasa lebih marak di Jogja ketimbang di Perth. Yang lebih membuat saya galau adalah sejenis rasa rindu.

\*\*\*

Selama di Perth dan menghamba pada GPS serta Google Maps, saya sangat ingin kembali ke Bantul dan menjalani pengalaman-pengalaman sosial sederhana seperti berhenti di warung lantas bertanya, “Bu, *ndherek tanglet*, numpang tanya, Kampung Karangpule arah mana ya, Bu? Oh, sini sudah Karangpule? Rumahnya Mas Kelik sebelah mana, *nggih?*”

Dengan mekanisme pencarian alamat model tradisional begitu, keterampilan berbahasa lokal tetap hidup. Saya ingat, dulu kalau pergi berdua dengan kawan saya Nana Juansa yang orang Sunda dan cuma bisa berbahasa Jawa ngoko alias Jawa kasar itu, tiap kali bertanya alamat selalu sayalah yang dia suruh-suruh.

Selain peluang konservasi bahasa lokal, salah satu ceruk untuk menerapkan *unggah-ungguh* alias tata krama juga tetap eksis. Orang

numpang tanya ke orang lain yang tidak dikenal tentu tak bisa sembarangan, bukan? Apalagi kalau harus bertanya kepada PKS, alias pemuda kampung setempat. Standar-standar etiket pun mesti dijalankan dengan lebih berhati-hati.

Dengan ceruk kesempatan penerapan model-model tata krama tersebut, berlaku juga *social punishment* sebagai alat kontrol.

Bertahun silam, seorang lelaki bermotor berhenti di dekat rumah saya untuk numpang tanya arah tempat. Malang, yang dia tanyai pemuda dusun sebelah, Bambang namanya. Dengan penuh semangat Bambang menunjukkan arah yang jelas. “Ini teruuus saja ke timur, sampai lampu merah, belok kanan, teruuuuuus saja sampai ketemu gapura gede. Nanti tanya lagi di situ, Mas.”

Gapura yang disebut Bambang itu jauhnya sekitar tiga kilo di arah yang berlawanan dengan lokasi yang mau dituju si mas-mas bermotor.

Kurang ajar sekali si Bambang itu, bukan? Tapi, Bambang memang sengaja *mblasukke*, kalau istilah Jawa-nya. Menyesatkan, meski tidak harus dikaitkan dengan kata “menyesatkan” di masa ini yang agak dekat dengan “penistaan”.

Bambang sengaja *mblasukke* karena si lelaki bermotor berhenti tanpa turun dari kendaraan, tanpa mematikan mesin, dan tanpa membuka helm. Itu sikap yang secara nilai-nilai lokal dianggap tidak pantas dan keluar dari standar sopan santun. Maka, hukuman sosial pun dijalankan.

\*\*\*

Sekarang, ternyata *share location* menghilangkan semua romantika itu. Penduduk suatu kota, baik asli maupun pendatang, tidak merasa perlu sekadar belajar bahasa setempat untuk keperluan bertanya alamat. Keterpaksaan sosial untuk sedikit belajar tata krama ketika berjumpa dengan orang asing juga berkurang. Konsep-konsep kearifan (atau kenakalan?) lokal seperti *mblasukke* tak lama lagi juga akan lenyap.

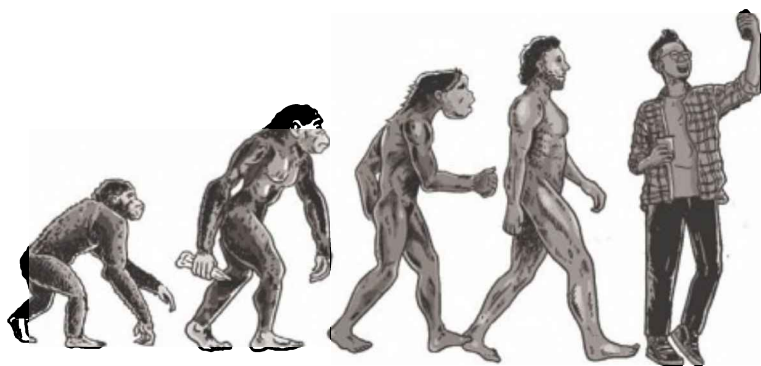
Beginilah teknologi datang kepada kita. Ia menawarkan efektivitas dan efisiensi, tetapi melenyapkan hal-hal lama yang kadang membuat kita menikmati takdir sebagai manusia. Lalu, dengan keterikatan dan ketergantungan pada teknologi, masihkah kita utuh dalam kemanusiaan kita?

Pertanyaan yang lebih mendasar lagi bisa saja diajukan: Apakah itu manusia? Benarkah komputer lebih rendah derajatnya daripada manusia, sehingga kita mesti resah dengan perubahan nilai dan segenap gejalanya? Atau, jangan-jangan kita ini juga cuma robot, yang bisa menciptakan robot-robot lain yang bakalan mengganggu eksistensi para robot lama?

Mari renungkan dalam-dalam. Namun, kali ini tak bisa kita sekadar mengandalkan Google. Kita harus berbincang berpanjang-panjang, tertawa bersama, berdebat dengan gembira, berjumpa satu sama lain sebagai sesama manusia.

Baik, untuk keperluan ini, saya akan berangkat menjumpai Anda semua. Jangan lupa *share location*, ya.[]





## Nggak Viral, Nggak Ditindak?

**A**nda tidak ada Facebook, Twitter, dan WhatsApp, dan di zaman ini komunikasi masif jarak jauh kita masih memakai media cetak, apakah para penegak hukum akan serajin yang kita lihat?

Pertanyaan seperti itu nongol di kepala saya gara-gara dalam beberapa pekan terakhir saya terlibat dalam dua kasus pelecehan seksual. Tenang dulu, “terlibat” di sini bukan sebagai pelaku. Posisi saya tidak begitu jelas. Sebagai saksi bukan, sebagai korban bukan, tapi saya dekat dengan kedua kasus itu.

Yang pertama adalah kasus Bambang “Swinger”. (Yang belum paham peristiwanya seperti apa, silakan *googling* dulu, jangan malesan.) Menurut kabar terakhir, ada 50 korban Bambang yang dikirim pesan mesum memamerkan imajinasi dia bertukar pasangan, dan itu berlangsung dalam jangka waktu bertahun-tahun.

Nah, jauh sebelum ramai kasus Bambang yang beraksi dengan modus *chatting* medsos, 16 tahun lalu, orang itu pernah melakukan pelecehan secara fisik. Korbannya adalah perempuan yang hari ini menjadi istri saya. (Pada waktu kejadian, perempuan itu masih berstatus teman saya, belum pacar, apalagi istri.) Tapi, saat itu saya ikut datang ke pos satpam tempat Bambang ditahan, ikut melontarkan sedikit

“nasihat jasmani” ke wajahnya, bahkan saya juga ikut mengantarkan korban sekaligus pelaku ke kantor polisi.

Dari situlah saya tahu pasti bahwa kemudian kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan langkah apa pun. Tidak ada saksi, kata polisi. Itu posisi yang konon sangat sulit untuk sebuah kasus pelecehan seksual. Entahlah, saya juga tidak paham soal-soal hukum semacam itu. Tapi faktanya, sampai 16 tahun setelah kejadian, tidak ada progres apa-apa. Bahkan pahit sekali, kasus tersebut sudah tak mungkin diangkat lagi karena kedaluwarsa.

Itu berbeda dengan kasus belakangan, ketika Bambang menjalankan modus digital berupa *chat-chat* mesum. Saya tidak tahu apakah dia ditahan atau tidak. Namun, respons dukungan berdatangan dari banyak sekali orang. Bahkan, seorang pejabat polisi lokal mengontak saya, menanyakan detail peristiwa lama itu, dan sampai sekarang masih menunggu saya untuk “memobilisasi” para korban Bambang yang lain dari wilayah Yogyakarta.

Lalu, kenapa kasus yang belakangan ini bisa naik cepat, sementara yang dulu tidak? Tentu saja karena medsos! Karena ada korban yang bersuara lewat Facebook-nya, dalam waktu singkat disambar suara-suara korban lainnya, jadilah itu barang. Maka, suara-suara berkumpul, menggumpal, mengeras, mengentak, dan naga-naganya itulah yang membuat pihak berwenang segera bertindak.

Kasus kedua yang melibatkan saya terjadi beberapa hari lalu. Ceritanya, saya punya kelas menulis *online*. Salah seorang peserta kelas saya yang tinggal di Makassar, sebut saja namanya Mbak Neni, pamit tidak aktif. “Saya sedang sangat sibuk membantu anggota keluarga yang terkena pelecehan seksual dari guru ngajinya, Mas,” katanya. Korban masih berumur 9 tahun, dan persis di situlah saya ikut emosi sambil mengumpat-umpat ngeri. Ya Tuhan, anak itu lebih kecil daripada anak perempuan saya!

Lalu, saya mengintip Facebook Mbak Neni. Saya menyimak unggahan tiga hari sebelumnya, dan di situ disebutkan bahwa sudah lima hari laporan mereka ke polisi belum ditindaklanjuti. Saya kaget. Lima hari ditambah tiga hari, berarti sudah delapan hari laporan itu dicueki.

Lekas saya teringat saran seorang kawan, wartawan senior yang sempat ngobrol dengan saya terkait kasus Bambang. “Seharusnya kamu dulu ngajak wartawan, Bal,” katanya. Maka, saya pun membagi unggahan Facebook Mbak Neni, sambil mengatakan, “Tolong siapa pun

di antara teman-teman yang kenal dengan wartawan di Makassar, sampaikan kabar ini.” Begitu saja.

Tak saya sangka, unggahan saya viral. Saya dikontak oleh banyak sekali wartawan, baik dari Makassar maupun Jakarta, dari koran *online* sampai televisi. Kasus itu langsung melejit dalam hitungan jam. Mbak Neni mengabarkan bahwa petugas langsung berdatangan, bantuan dan dukungan bermunculan, wartawan berbondong-bondong menyambangi kediamannya, dan apa yang dia keluhkan soal kelambanan pelayanan segera mendapatkan gantinya.

Tentu saya turut senang. Namun, seiring itu, saya jadi galau sendiri, dan muncullah pertanyaan sebagaimana di awal tadi: “Andai tidak ada medsos, dan komunikasi masif jarak jauh kita masih memakai media cetak, sementara di koran-koran kertas tak ada mekanisme viral, apakah para penegak hukum akan serajin yang kita saksikan?”

Ini bukan pertanyaan tanpa dasar, dan para polisi semestinya tidak perlu tersinggung dengan kata-kata saya. Sebab, saya menyaksikan sendiri dan bisa membandingkan “langsung” antara dua (bahkan bisa disebut empat) kasus.

Coba simak. Pada kasus Bambang “Swinger” yang pertama, tahun 2004, belum ada medsos, dan teman saya yang belakangan menjadi istri saya itu tidak mendapatkan dukungan maksimal dari polisi. Adapun pada kasus berikutnya, dengan pelaku yang sama, respons dukungan datang membanjir, setelah kabar soal *chatting* mesum itu tersebar luas di Facebook, Twitter, dan WhatsApp.

Itu persis dengan kasus Mbak Neni di Makassar. Selama delapan hari Mbak Neni menunggu tanpa kepastian, padahal jelas-jelas kejadiannya ada, korbannya anak-anak pula. Begitu kasus itu viral, peta seketika berubah dalam hitungan jam. Padahal tidak ada perbedaan kasus, belum ada laporan resmi korban-korban baru, dan modus pelecehannya juga tidak bergeser dari delapan hari sebelumnya.

Setelah menyimak perbandingan situasi-situasi tersebut, bayangan di kepala saya semakin berkelebat susul-menyusul.

Begini. Andai para korban *chatting* Bambang “Swinger” itu bukan kalangan yang punya jaringan pertemanan luas, dan cuma mengandalkan lingkaran medsos yang seadanya, apakah dukungan dari para penegak hukum juga akan hadir sedemikian rupa? Saya bisa bertanya seperti itu karena mengingat bahwa enam belas tahun silam kasusnya lebih parah, tapi medsos belum eksis di muka bumi. Dan jelas,

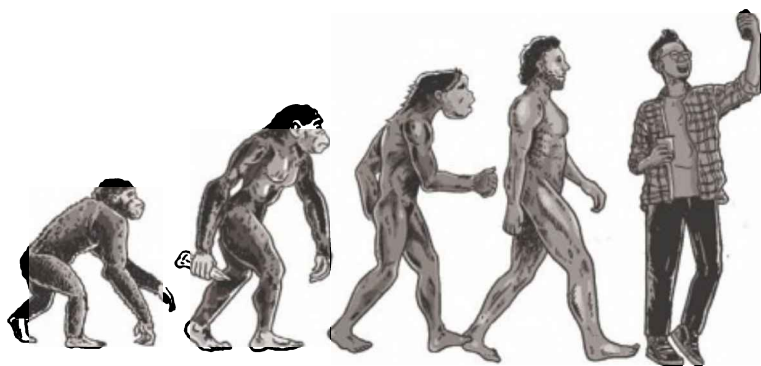
dukungan ramai tak pernah ada. Saya pun melihat bahwa unggahan Mbak Neni sebelum saya *share* juga relatif sepi, padahal sudah tiga hari nongkrong di Facebook.

Artinya, ada ketimpangan nasib di hadapan hukum, dan yang diuntungkan adalah “elite-elite media sosial” yang kebetulan punya jaringan perkawanan. Lalu, bagaimana dengan korban-korban yang cuma sedikit *friendlist* dan *follower*-nya? Bagaimana nasib mereka? Apa yang akan mereka dapatkan jika kemampuan maksimal mereka hanyalah menyebarkan kabar di grup WhatsApp karang taruna? Lebih ngeri lagi, bagaimana jika korban pelecehan seksual datang dari kalangan yang tidak bermedsos? Apakah laporan mereka akan didengarkan dan ditindaklanjuti?

Kegelisahan itu terus berlanjut. Apakah hukum hanya akan dijalankan sebagai layanan untuk mereka yang mampu membikin viral sebuah kasus? Jika kita pahami bahwa viral artinya melibatkan banyak sekali orang, dan banyak orang sama maknanya dengan kekuatan massa, apakah hukum hanya akan dijalankan jika ada tekanan massa? Lalu, apa bedanya kekuatan viral dengan kekuatan orang yang bisa membayar massa?

Pertanyaan-pertanyaan itu terus bermunculan, memusingkan kepala saya. Saya meratap, kenapa enam belas tahun silam saya belum punya *follower* (waktu itu baru ada Friendster, dan kita belum kenal apa yang disebut viral). Di sisi lain saya sadar pada zaman ini saya hanya agak beruntung saja, karena saya punya *privilege* berupa *follower*, sementara jutaan orang lainnya tidak bisa mengakses kemudahan itu sebagaimana saya.

Ah, tiba-tiba saya merasa nista ....[]



## Membela Buzzer

**S**aat ini, mendengar istilah *buzzer* saja sudah bisa bikin banyak orang mencibir jijik. Itu istilah yang seolah-olah sama dan sebangun dengan ketololan, kerusakan moral, kejahatan terbesar pada kemanusiaan. Bahkan, tuduhan *buzzer* yang dialamatkan kepada seseorang sudah mirip-mirip tuduhan PKI pada zaman Orde Baru: sekali si tertuduh kena label *buzzer*, segenap stigma lain akan sangat sulit lepas darinya.

Bersama itu, orang-orang lupa bahwa fenomena *buzzer* adalah keniscayaan dalam zaman yang sudah berubah, teknologi yang juga berubah, dan metode persebaran informasi yang juga turut berubah.

Mari kita melompat ke ratusan tahun silam. Dahulu kala, kalau otoritas ingin menyebarkan informasi, yang dapat dilakukan adalah mengumumkan secara lisan. Punggawa kerajaan memukul kentongan, para kawula berkumpul, dan *woro-woro* disampaikan.

Ketika kemudian orang sudah menemukan kertas, tulisan, dan lebih-lah lagi mesin cetak, kabar itu disebarkan dengan lebih cepat dan efektif. Tanpa menunggu orang-orang berkumpul, ribuan lembar selebaran bisa dicetak massal, lalu disebarkan di titik-titik potensi keramaian.

Model selebaran itu kemudian dibuat lebih kompleks, sehingga muncullah surat kabar. Ibaratnya, koran-koran adalah bundel yang

menggabungkan puluhan selebaran. Dan, karena lambat laun publik semakin membutuhkan jaminan akurasi atas kabar-kabar, lahirlah jurnalisme.

Lalu radio datang. Lalu televisi muncul. Dan kemudian internet hadir, sampai kemudian ia melahirkan media-media *online*. Semua media itu, selain menyajikan hiburan-hiburan, juga menyajikan berita-berita resmi yang berada dalam koridor jurnalisme, di bawah kontrol kualitas akurasi informasi, dengan standar-standar dan tanggung jawab tertentu.

Meski demikian, bukan lantas jalur-jalur non-jurnalisme seketika lenyap. Jalur itu tetap ada, selalu ada, sejak dulu dan mungkin selamanya. Ketika ada punggawa membawa canang dan lembar kabar negara, jalur desas-desus lisan tetap berjalan. Bahkan, jalur itulah yang sebenarnya menjadi sarana persebaran paling efektifnya. Ketika ada koran, bukan berarti selebaran mati. Ketika ada televisi dan radio, tetap ada orang *brik-brikan* lewat radio amatir.

Sama saja dengan zaman internet. Internet memang melahirkan media massa *online*. Namun seiring dengannya, tetap ada *email*, *mailing list*, dan gong terbesarnya adalah media sosial.

Melalui jalur-jalur non-jurnalisme itu, mulai mekanisme dari mulut ke mulut, lalu selebaran, lalu *brik-brikan*, lalu *mailist*, dan medsos, informasi disebarkan tanpa standar ketat. Sangat cair, sangat mudah merembes ke mana-mana, bahkan sering kali dengan gampang dapat dikreasi semau-maunya.

Tetapi, memang ada perbedaan antara desas-desus lisan dan medsos. Perbedaannya bukan pada kualitas akurasi, melainkan pada kualitas kemasan alias penyajian wujud informasi, juga kecepatan produksi dan diseminasi. Tentu saja demikian, sebab medsos digerakkan dengan telepon pintar, telepon pintar digenggam oleh semua orang (yang tidak semuanya pintar itu), di dalam telepon pintar ada fitur-fitur berteknologi tinggi untuk olah visual dan lain-lain, dan dengan jaringan internet sebuah informasi bisa disebarkan ke jutaan orang dalam hitungan detik.

Dengan kecepatan produksi dan persebaran tersebut, informasi kemudian bukan hanya disebarkan, melainkan juga dikreasi, bahkan difabrikasi. Karena saking cepatnya fabrikasi dan diseminasi, para penerima informasi tidak cukup punya waktu untuk mencernanya, tidak punya cukup sumber daya untuk menelaahnya. Apalagi situasi zaman yang sudah dikuasai ponsel-ponsel selalu menuntut para penggenggam ponsel untuk menjunjung tinggi obsesi akan kecepatan.

Akibatnya kita tahu. Bangsa manusia semakin lama tumbuh jadi semakin reaktif, *grusa-grusu*. Karakter komunal yang *grusa-grusu* itu ibarat padang rumput kering yang sangat gampang disulut api, terbakar seluruhnya dengan kecepatan tak terduga.

Akan tetapi, jangan salah. Yang saya ibaratkan dengan “api” di padang rumput kering itu tidak selalu berbentuk hal-hal busuk sebagaimana yang telanjur Anda bayangkan. Intinya, ia adalah informasi. Dan, sama saja dengan desas-desus dari mulut ke mulut dan selebaran, yang namanya informasi bisa berupa apa saja. Memang bisa dalam bentuk kabar dusta, adu domba, propaganda. Tapi, ia bisa juga dalam bentuk dakwah, ajakan kebaikan dan kepedulian, dan yang pasti: pemasaran komoditas macam-macam.

Yang namanya komoditas alias barang dagangan, ia pun bisa berwujud apa saja. Bisa sepatu, bisa *skincare*, bisa buku-buku, bisa sambal dan bumbu-bumbu, dan bisa juga isu-isu.

Pendek cerita, sejak era analog sampai era digital, sesungguhnya jalur-jalur cair itu selalu hidup, dan dagangan yang disebarkan lewat jalur-jalur itu selalu ada. Ketika sekarang jalur itu miliaran kali lebih menawarkan efektivitas sebagai hasil konkret dari revolusi teknologi, semua pedagang pun menggunakannya. Hanya pedagang bodoh yang menolak menggunakannya. Mulai pedagang sepatu, hingga pedagang isu.

Maka, ketika ada orang berjualan sepatu maupun isu, dan dia ingin proses *marketing* yang dia jalankan meraih efektivitas maksimal, mau tak mau dia harus memperbanyak staf *marketing*-nya itu. Siapakah staf-staf *marketing* itu? Jawabannya sudah bisa Anda tebak: para *buzzer*!

Jadi, yang namanya *buzzer* itu pendengung, tugasnya mendengungkan sesuatu, dan apa yang ia dengungkan itu tidak melulu hal-hal yang busuk dan berbau. Para *buzzer* sebagai pelaku marketing bisa mendengungkan dagangan daster, bisa juga paket-paket layanan kesehatan, bisa juga mendengungkan kabar-kabar. Dan, sebagaimana ada daster bagus dan daster jelek, kabar-kabar pun demikian. Ada kabar baik, ada kabar-kabar buruk, ada kabar-kabar palsu.

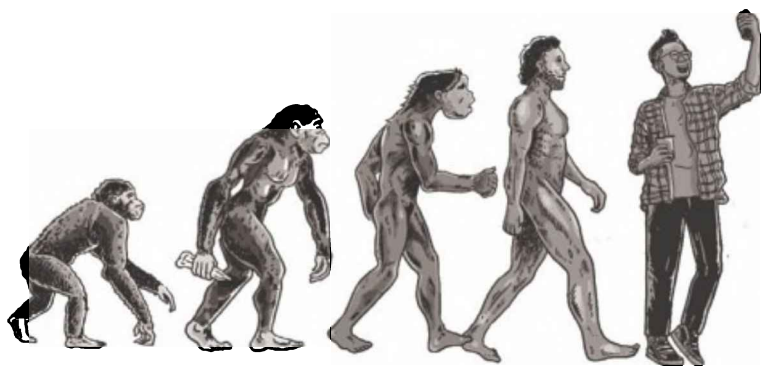
Para *buzzer* itu pun bisa bekerja kepada siapa saja. Apalagi, pada zaman revolusi diseminasi informasi seperti sekarang ini, hanya pedagang kecil atau pedagang bodoh saja yang tidak sudi menggunakan *buzzer*. Dan, ketika pedagang daster disebut juragan daster, pedagang isu disebut sebagai ... politisi.

Maka, semua politisi yang punya sumber daya ya memakai para *buzzer*. Kalau nggak percaya, coba tanya saja Mas Ismail Fahmi, lelaki termasyhur pakar dunia digital dan media sosial yang bosnya Drone Emprit itu. Semua pakai, kok. Dari semua kubu, dari semua faksi dalam kubu-kubu. Bahkan, tak jarang para *buzzer* dikerahkan untuk bertempur antara sosok yang berlawanan di dalam satu kubu politik yang sama.

Ujungnya, saya cuma mau menyampaikan, memberikan stigma busuk kepada *buzzer* itu sebenarnya salah alamat. Kalaulah ada yang busuk, itu adalah kontennya, sedangkan tidak semua *buzzer* menyebarkan konten busuk. Apalagi mengatakan bahwa yang menggerakkan *buzzer* hanya satu kelompok tertentu, dan hanya memasarkan satu nada informasi tertentu.

Itu pandangan yang sangat lugu. Saya bisa dengan yakin mengatakan itu, sebab saya sendiri pernah diajak jadi *buzzer*, oleh dua tokoh dari dua kubu politik yang berlawanan. Untunglah saya menolak keduanya, karena jadi pedagang buku dan mem-*buzzer*-i buku-buku saya sendiri sudah cukup untuk bikin saya kaya raya. Hahaha![]





## Korban-Korban Echo Chamber

**A**khirnya, polarisasi politik memakan korban nyawa. Berawal dari “duel” di layar gawai terkait dukung-mendukung kubu politik, dua lelaki di Sampang melanjutkan pertarungan mereka secara *offline*. Pisau dilepaskan, pistol rakitan ditembakkan. Salah satu tersungkur, dan tewas seketika.

Menjelang Pilpres 2014, peristiwa yang hampir sama terjadi pula. Bermula dari debat pendukung Jokowi vs pendukung Prabowo di medan Twitter, dua pemuda di Jakarta bersepakat menyelesaikannya dengan gebuk-gebukan. Untung cuma tangan kosong sehingga tak perlu ada nyawa melayang.

Cuma dua kasus ekstrem itulah yang saya ketahui, mudah-mudahan tak ada yang lain lagi. Selebihnya, berbagai perkelahian kata-kata dan baku pukul ejekan terus berjalan. Sebagian masih dalam koridor kesehatan sosial, sebagian lainnya sudah membawa pada perpecahan.

Rasanya, kalau kita bicara tentang perpecahan dan efek negatif pada kohesi sosial, tiba-tiba kalimat kita jadi terkesan moralis dan agak norak-utopis. Padahal, dengan bukti nyata tumpasnya nyawa manusia, pantaskah situasi seperti ini dibiarkan terus begini-begini saja?

Lalu, siapa yang salah? Tentu saja banyak sekali pihak yang

bersalah. Jujur, barangkali saya juga termasuk di dalamnya, karena saya pun sering terlibat dalam keributan di media sosial.

Akan tetapi, pernyataan Raja Juli Antoni yang merespons kasus Sampang tersebut cukup menarik. Sekjen partai yang kerap di-bully di mana-mana itu menduga bahwa ini merupakan dampak dari kelakuan elite politik yang kerap mempertontonkan gaya agresif untuk menyerang lawan politik.

Hmmm, baik, mari kita bicarakan para elite terlebih dahulu.

Beberapa bulan lalu, saya seforum dengan salah seorang elite politik nasional. Selepas forum, dia menceritakan banyak hal di belakang layar.

“Sebenarnya, kami ini ya biasa saja kalau di belakang, Mas. Ngobrol biasa, merokok bersama. Nah, tapi kalau si X dan si Y, mereka memang marahan beneran, hahaha,” katanya sambil menyebut dua nama tokoh yang kerap saling berhantaman di media massa. Soal seperti itu saya rasa sebagian orang sudah tahu.

Satu hal yang bagi saya sendiri agak baru adalah cerita berikutnya, tentang bagaimana para pengelola program dialog politik di televisi memang menghendaki suasana panas penuh gontok-gontokan.

“Jadi, kalau dialognya adem-adem saja, waktu kami rehat iklan, *host*-nya akan bilang, ‘Ayo Pak, kurang panas nih, nanti *rating* kita jatuh,’ begitu. Maka berantemlah kami pada sesi setelahnya, dengan kata-kata yang lebih keras dan tajam.”

See? Anda tahu sekarang, bahwa ternyata media pun dengan sengaja ambil peran besar dalam panasnya situasi pertempuran kedua kubu dalam polarisasi ini. Apa yang sebenarnya adem ayam saja, ternyata dipaksa jadi panas. Semua demi *rating* acara televisi, sebab *rating* berarti iklan, dan iklan berarti uang.

Sementara itu, para penonton dialog tersebut dari berbagai kalangan membawa suasana pertarungan hingga ke kehidupan riil mereka. Dalam segenap keterbatasan akses informasi, mereka menyangka bahwa apa yang mereka tonton itu betulan, lalu dalam semangat yang begitu partisipatoris mereka melanjutkan semuanya hingga ke titik darah penghabisan.

Pendek kata, banyak dialog dan debat politik di televisi itu sesungguhnya berkelas sama belaka dengan sinetron. Bedanya, selepas menonton sinetron biasa, masyarakat awam tidak bertengkar beneran dengan tetangga. Lain halnya dengan apa yang mereka jalani seusai menyimak “sinetron-sinetron politik” itu.

Jadi, siapa yang kurang ajar di sini?

Selain media yang memang menghendaki suasana mendidih demi akumulasi kapital, para elite politik rasa-rasanya tidak memiliki semangat dan nilai moral dalam edukasi publik. Secara retorika memang mereka punya. Namun, orientasi pendidikan publik itu baru akan mereka laksanakan kelak setelah mereka menang dan memegang tampuk kekuasaan.

“Visi pendidikan kami nanti adalah ....” Nanti, nanti. *Lha wong* mereka itu sebenarnya bisa mendidik publik sejak sekarang lho, sejak masa kampanye!

Tapi, apa mereka mau? Tentu saja sulit. Dalam masa kampanye, cara apa pun akan ditempuh. Ada sumber daya belasan ribu triliun rupiah yang akan bisa diakses oleh sang pemenang pertarungan. Jadi, yang penting menang dulu, sedangkan rencana yang baik-baik ditaruh belakangan. Bagaimana mau mendidik publik dengan serius sejak sekarang kalau bagi pihak lawan toh segala cara dihalalkan?

Begitu kira-kira jalan pikiran para elite, dalam imajinasi saya.

Saya ambil contoh dunia media sosial. Dalam media-media alias pers resmi, sebrutal-brutalnya kampanye negatif tetap masih ada kekang-kekang yang mengontrolnya. Ada Dewan Pers, ada sekian kode etik, ada lingkungan sosial sesama jurnalis, ada kritik dari penonton atau pembaca. Namun, dalam media sosial, batasan-batasan itu tidak ada.

Sialnya, pada era pasca-kebenaran, publik sering tidak mampu membedakan antara informasi dari media resmi dan informasi dari medsos. Landasan pengetahuan publik belum sampai ke sana sehingga kabar dari mana pun dianggap sama saja derajatnya.

Pada saat yang sama, medsos mampu melakukan penetrasi dengan jauh lebih lincah daripada media resmi, masuk ke celah-celah sempit perbincangan massa buih, menyodorkan informasi dengan berbagai *framing* dan aneka hoaksnya.

Jelas, medsos punya kemampuan yang tidak dimiliki media-media pers resmi. Ada sebagian yang jelas melanggar hukum sehingga dicokok polisi, tetapi lebih banyak yang tidak.

Nah, dengan kekuatan sedahsyat itu, politisi mana yang mau mengabaikan medsos sebagai instrumen tempur mereka? Rasanya hanya politisi bodoh dan lugu yang tidak menggunakan medsos semaksimal mungkin!

Hasilnya, selain memakai akun-akun medsos resmi, para aktor politik juga menyusun kekuatan pasukan medsos siluman. Wilayah ini sangat remang-remang, tidak dapat diverifikasi secara legal, tapi banyak orang menyaksikan.

Saya juga sedikit mengerti wilayah itu, karena saya pun mengenal beberapa pemainnya, bukan cuma dari satu kubu. (Bahkan saya sendiri pernah ditawari masuk ke sebuah tim untuk melejitkan nama seorang tokoh, dengan tarif sangat menggiurkan, dengan syarat harus mau membikin berita dusta ini-itu. Hampir saya tergoda, untungnya saya ingat bahwa tanpa ikut bisnis begituan pun alhamdulillah saya masih bisa makan.)

Ringkasnya, perang opini dengan menghalalkan segala cara itu dijalankan lewat pasukan-pasukan medsos siluman, akun-akun bodong, akun-akun riil tapi berbayar, yang tidak terkekang dengan ketat oleh beragam aturan. Bagaimana bisa kita mengharapkan nilai-nilai moral dalam edukasi publik dapat berjalan?

Lalu, bagaimana solusinya?

Saya selalu membayangkan cara paling efektif, yaitu solusi struktural. Harus ada pemantauan tegas atas pengerahan akun-akun siluman, sebagaimana pengaturan tegas yang telah berhasil dijalankan pada slot iklan para politisi di media massa. Repotnya, memantau akun siluman tak bedanya memantau politik uang. Sulit, sangat remang-remang.

Solusi lain adalah rekayasa sosial. Langsung di hadapan Pak Ketua KPU saya pernah menyampaikan, jika para aktor politik diam-diam bisa mengerahkan laskar medsos siluman yang kian menjauhkan publik dari kesehatan jiwa komunal, kenapa pihak pemangku kebijakan yang terkait dengan ini tidak bisa menjalankan rekayasa yang sama, tetapi dari arah yang berbeda?

Konkretnya, negara (tolong bedakan antara “negara” dan “rezim”) sangat bisa menyusun kekuatan, katakanlah pasukan medsos *buzzer* “kewarasan”. Kewarasan di sini jangan diterjemahkan sebagai netralitas, sebab sikap netral dalam politik elektoral justru akan menjadi kegagalan negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pilpres.

Kewarasan yang saya maksudkan adalah: punya preferensi politik, tapi masih bisa “diajak rembukan”, masih bisa saling berteman, masih bisa bercandaan, dan menolak sikap-sikap dehumanisasi dalam melihat lawan. Sesederhana itu, meski hari ini terbukti sangat banyak orang

yang tidak mampu atau tidak sudi melakukannya.

Jika dengan sebuah skema rekayasa sosial langkah itu dapat dijalankan, akan ada sedikit perimbangan yang masif dalam peta besar kericuhan media sosial.

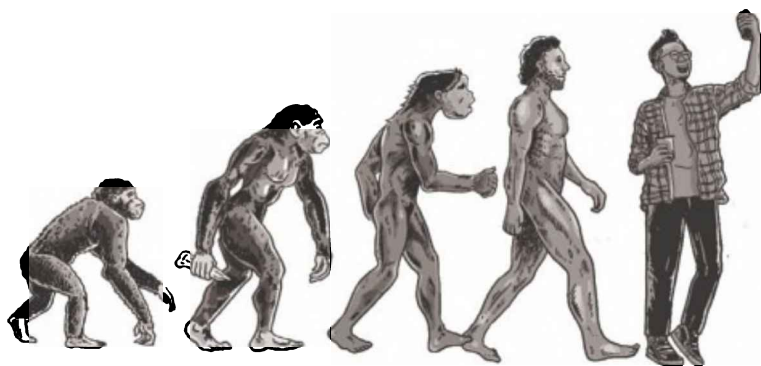
Sekilas ide itu memang nggak mutu dan menggelikan. Sayangnya, saya belum bisa menemukan gagasan lain yang jitu dan bersifat solusi struktural.

Jika tindakan struktural tidak dijalankan, saya khawatir yang berjalan hanya langkah-langkah sporadis dari sedikit orang, juga dari beberapa komunitas yang bervisi panjang. Semua itu tidak terkoordinasi dengan baik, tidak bersinergi satu sama lain, dan tentu kalah cepat dibanding gelombang “industri polarisasi” yang terorganisasi rapi dan memutar uang miliaran.

Sampai kejadian demi kejadian yang kian mengerikan terpampang lagi dan lagi, rasanya solusi-solusi struktural memang tidak akan terpikirkan. Sembari itu, yang dapat kita jalankan sebatas sikap-sikap personal.

Oh ya, nanti malam saya mau berjumpa kopi darat dengan seorang ustaz dari Palembang, yang datang ke Jogja untuk mengikuti Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Kami berbeda pilihan politik, tetapi kami bertekad membuktikan bahwa kami sama-sama suka kopi, sama-sama doyan sate kambing, dan tak perlu gebuk-gebukan dalam membela kubu pilihan.

Cuma ini yang bisa kami lakukan, dan saya tahu: inilah selemah-lemahnya iman.[]



## Tukang Palak Digital

**D**unia *online* telah melahirkan premanisme. Saya akhirnya menyadari kenyataan itu, ditambah lagi fakta bahwa ternyata bentuk premanisme digital tersebut sangat mirip dengan premanisme konvensional yang selama ini kita kenal.

Ada satu cerita. Seorang lelaki tiba di bandara Semarang. Dia memegang tiket untuk penerbangan ke Jakarta, dengan jadwal pukul 20.00 WIB. Sesampai di gerai *check in*, dia celingak-celinguk. Suasana sepi sekali, padahal pukul 20.00 masih satu setengah jam lagi. Maka, dia pun bertanya kepada petugas gerai.

Tak dinyana, petugas menjawab dengan tegang campur kasihan, bahwa pesawat sudah terbang pukul 16.00. Lha kok bisa? Ternyata, jadwal penerbangan dimajukan sejak tiga hari sebelumnya, dan lelaki malang itu sudah dikirim pemberitahuan resmi beberapa kali.

Sialnya, pemberitahuan itu dikirim via SMS. Memangny siapa di zaman ini yang masih membuka SMS? Semua tahu, *inbox* SMS hanya berisi pesan-pesan semacam “Selamat, nomor Anda terpilih sebagai pemenang undian ...” dan “Kami menawarkan pinjaman *online* tanpa agunan ...”. Membuka kotak SMS adalah tindakan nyata membuang-buang waktu yang tidak sesuai dengan spirit produktivitas dan percepatan ekonomi era Jokowi.

Tapi apa pun itu, secara legal pihak maskapai sudah menjalankan

kewajibannya, dan toh jelas-jelas penumpang yang datang sesuai jadwal lama hanya lelaki itu saja. Artinya, semua penumpang lain ternyata membaca SMS! (Tampaknya mereka tidak peduli dengan target percepatan ekonomi era Jokowi.)

Lelaki itu pun protes, kenapa cuma SMS dan bukan telepon. Petugas menjawab bahwa memang via SMS-lah peraturannya. Si lelaki meminta ganti dengan penerbangan berikutnya, tapi kata petugas, jadwal terbang selanjutnya baru akan tiba pukul 09.00 keesokan paginya (sementara jam segitu acara di Jakarta sudah mulai). Hingga kemudian, lelaki itu mengambil HP-nya, dan ... menunjukkan jumlah *follower* medsosnya! "Tolong carikan solusi, atau saya bikin ramai," katanya.

Ajaib. Si petugas sontak memanggil kawan-kawannya, berbisik-bisik, lalu salah seorang di antara mereka menelepon ke sebuah nomor. Dua menit kemudian petugas menyampaikan, "Baik, Pak. Besok ada penerbangan pukul 06.00. Sebenarnya sudah penuh, tapi kami ambilkan satu kursi buat Bapak."

\*\*\*

Cerita kecil di atas itu *true story*. Tampaknya biasa saja, dan kita bisa menanggapi cukup dengan tertawa. Tapi, kalau kita merasa bahwa tertawa saja tidak cukup, akan tampak satu realitas di hadapan kita, bahwa jumlah *follower* medsos seseorang ternyata bukan lagi berfungsi sebatas sebagai aset kekuatan persebaran informasi. Ia sudah menjelma menjadi senjata penekan, yang dapat dikapitalisasi untuk banyak sekali tujuan.

Celakanya, yang dimaksud dengan tujuan di situ bukan lagi sebatas tujuan-tujuan kehumasan, melainkan sudah mirip permainan preman. "Kamu nurut enggak sama aku? Kalau enggak, aku bikin viral!" Kekuatan *follower* akhirnya bisa menciptakan ancaman-ancaman. Ancamannya memang bukan fisik, tapi konsekuensinya sangat nyata, dan masif sekali efeknya.

Dari situlah, diam-diam hierarki tercipta, peta sosial yang baru memunculkan kasta-kasta, melahirkan para *warlord* baru, dan panglima-panglima baru itu menciptakan *chaos* dalam berbagai skala.

Kemarin, lewat medsos, beberapa kali saya mengejek seorang tokoh politik, sebab tokoh itu tampak agak norak dalam ambisinya untuk maju di bursa pertempuran 2024. Beberapa kawan yang paham dunia politik,

dan yang melihat saya punya *follower* meski cuma beberapa puluh ribu, langsung mengira saya sedang bermain. Saya diduga sedang menjalankan mekanisme “pengajuan proposal”, agar diajak bergabung ke tim tokoh yang saya ejek itu.

Kontan saja saya tertawa. Tapi, ketika saya berpikir lagi, lalu menyadari bahwa tertawa saja tidak cukup, akhirnya saya memahami kecurigaan beberapa kawan tadi. Masuk akal mereka menduga begitu. Kenapa? Kita bisa melihat polanya. Pola ini sering kita saksikan dalam beberapa aksi premanisme-betulan yang terjadi di banyak tempat, di sepanjang sejarah dunia politik kita.

Misalnya, beberapa tahun lalu ada satu laskar di Jogja yang menyerbu sebuah hajatan tradisional. Kata mereka, itu acara yang penuh kemusyrikan. Demi menyelamatkan akidah umat, ritual tersebut harus dibabat.

Kalau Anda melihatnya sebatas dengan perspektif kebebasan berkeyakinan, tentu saja itu merupakan aksi intoleransi, dan cara pandang seperti itu sah-sah saja. Namun, itu belum mewakili segenap peta persoalan riilnya.

Jika kita jeli dan paham analisis aktor serta analisis sejarah politik lokal, kemudian paham momentum, gambarannya akan jadi beda. Intoleransi memang digunakan sebagai instrumennya. Tapi, itu cuma instrumen. Selebihnya, mesti dilihat bahwa aksi tersebut berjalan menjelang rangkaian pesta politik. Di situlah poinnya.

Jadi, ketika suatu kelompok preman mulai tak terdengar gaung namanya, mereka harus tampil. *Show of force*. Promo besar-besaran. Celaknya, salah satu cara unjuk kekuatan yang paling menyedot perhatian adalah dengan menggebuk kelompok *liyan*, yang rata-rata ya minoritas. Itu pilihan aman, minim potensi serangan balasan. Lagi pula berita itu pasti viral, *brand* ormas pelaku akan melejit lagi, nama pemimpinnya pun akan kondang lagi.

Apakah ada tindakan hukum yang tegas? Rata-rata, kita tahu, kasus seperti itu menguap. Kenapa menguap? Ini jawabannya: si pemimpin ormas dan wadyabalanya akan segera tampak perkasa, tampak punya daya tawar tinggi untuk menggalang dukungan massa, dan itu ibarat lampu merkuri bagi laron-laron politik. Si ormas akan segera direkrut dan dilindungi laron-laron itu, diberi proyek politik, dan selanjutnya Anda bisa bayangkan mekanismenya seperti apa.

Itu baru satu versi. Versi lainnya juga pernah saya lihat di Jogja, yaitu



kekuatan ormas menembak langsung sasarannya, dan si sasaran itu akan menutup mulut ormas tersebut dengan membagi kue ekonomi kepada mereka. Dengan pengelolaan lahan parkir, contoh paling umumnya.

Demikianlah cara bermain preman-preman. Kalau Anda sudah membaca buku Ian Wilson, *Politik Jatah Preman*, di situ digambarkan bahwa pola seperti itu sudah berjalan sejak era Orde Baru. Ormas-ormas jalanan menjalankan proses “perburuan rente” dengan menegaskan identitas sebagai wakil kelompok tertindas, misalnya, lalu dari situ mereka mendapatkan celah peluang ekonomi lewat para politisi.

Dengan realitas seperti itu, bukankah kecurigaan kawan-kawan saya itu dapat dipahami?

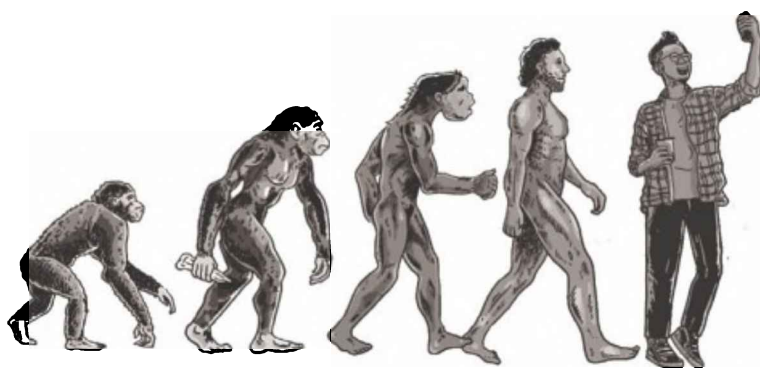
\*\*\*

Tenang, saya jamin ejekan saya ke tokoh politik yang kemarin itu cuma bercanda karena sebal saja, dan saya tidak sedang “bermain”. Tapi sekali lagi, kecurigaan kawan-kawan saya itu bukan tanpa alasan. Toh, selama ini aktivitas orang-orang yang terindikasi sebagai *buzzer* politik (dari kubu mana pun) juga lekat dengan pola-pola semacam itu.

Ya, mereka memainkan “massa”, meskipun massa yang mereka kelola tidak bisa menggebuk pakai pentungan bambu atau membubarkan acara dengan razia-razia. Tapi, gebukan-gebukan digital oleh kekuatan “ormas” mereka itu selalu efektif, dan dari situlah premanisme dijalankan dengan model yang sebenarnya sama persis dengan laskar-laskar jalanan. Semakin banyak *follower*-nya, apalagi sampai berjuta-juta, semakin efektif pula perburuan rente yang mereka lakukan.

Maka, alih-alih *buzzer* atau pendengung, mereka sebenarnya lebih cocok disebut preman. Preman *online*. Preman digital. Bromocorah *cyber*. Garong empat-kosong. Betapa ingin saya memasyarakatkan julukan begitu untuk orang-orang itu. Masalahnya, saya tidak ingin sebutan itu justru menjadi bumerang. Kenapa?

Dengan sepenuh pengakuan dosa, saya harus membuka aib diri sendiri: lelaki yang celingukan di bandara itu adalah saya.[]



## Menatap Kuburan Televisi

**U**ntuk entah kali beberapa ratus, pagi tadi saya rebutan teve lagi dengan anak saya yang kecil. Pagi-pagi dia sudah minta nonton Blippi, saluran YouTube pendidikan campur hiburan (atau hiburan campur pendidikan?) untuk anak-anak, buatan orang Amerika bernama Stevin John. Sedangkan saya kebelet banget nonton film di Netflix. Film apa pun bebas, pokoknya nonton, sebab saya butuh cari-cari ide untuk tulisan saya.

Tentu saja saya kalah melawan anak saya. Apa kata Kak Seto dan KPAI kalau saya tetap ngotot? Dan, kekalahan ini sudah menimpa saya untuk kali kesekian ratus pula. Kadang realitas yang pahit itu membuat saya kepingin beli satu teve lagi. Tapi, ruang di rumah saya terbatas. Lagi pula, dua suara teve akan membuat rumah kami seberisik Terminal Kampung Rambutan (saya, sih, belum pernah ke Terminal Kampung Rambutan, tapi kata orang-orang di sana berisik.)

Sampai kemudian saya memilih rebahan, membuka ponsel saya, dan membaca satu laporan dari sebuah lembaga survei bahwa televisi menggeliat lagi selama pandemi. Orang-orang pada ngendon di rumah, WFH, dan mereka mengisi waktu dengan menonton televisi. Hasilnya adalah kesimpulan bahwa peluang bisnis stasiun-stasiun televisi sedikit meningkat kembali.

Seketika saya sepakat dengan laporan itu, apalagi baru beberapa

detik berselang saya terlibat dalam aksi rebutan teve. Namun, kesepakatan saya ternyata hanya bertahan beberapa detik saja. Langsung saya merasa ada yang janggal. Benarkah angka “kepemirsaan” (duh, istilah yang aneh) televisi meningkat? Bahwa saya dan anak saya rebutan teve, dan kami bagian dari jutaan orang Indonesia yang kembali rajin menonton teve gara-gara pandemi, itu benar. Tapi lihat, yang saya tonton film di Netflix. Yang ditonton anak saya tayangan YouTube. Lalu, di mana televisinya?

Sampai di sini tiba-tiba saya sadar, ada kekaburan istilah yang menjebak kita begitu lama.

\*\*\*

Saya teringat iklan layanan masyarakat itu. Puluhan tahun silam. Dalam adegan iklan, seorang petugas dengan seragam cap TVRI datang ke sebuah rumah. Pemilik rumah menemuinya, lalu si petugas meminta pembayaran “iuran TVRI”. Tuan rumah menjawab bahwa keluarganya sudah tak pernah lagi menonton TVRI, sebab sudah beralih ke televisi-televisi swasta. Lalu si petugas menimpali, “Iuran ini memang bukan untuk menonton TVRI, Pak. Tapi, untuk kepemilikan pesawat televisi.”

Sebagaimana wajarnya iklan, tentu saja kemudian si empunya rumah (sekaligus empunya pesawat televisi) manggut-manggut, lalu berkenan membayar. *Happy ending* pun tercapai, dan mereka bahagia selamanya.

Malangnya, akhir cerita seperti itu tidak terjadi ketika petugas TVRI sungguh-sungguh datang ke rumah kami, dan mendiang bapak saya menemuinya. Bapak bilang, kalau pembayaran itu untuk TVRI, kami tak pernah lagi menonton TVRI. Tapi, kalau untuk kepemilikan pesawat televisi, berarti itu bersifat pajak, dan yang berhak mengambil pajak adalah pemerintah daerah, bukan institusi TVRI. Si petugas pun berpamitan dengan wajah lesu.

*Happy ending* ala iklan tidak terjadi di rumah kami (meski bukan berarti kami tak ingin bahagia selamanya). Tapi, saya tidak yakin apakah keluarga-keluarga lain bisa menjawab seperti halnya bapak saya menjawabnya. Sangat mungkin mereka manggut-manggut saja seperti di iklan, lalu membayar iuran TVRI yang nggak jelas itu.

Nah, sambil manggut-manggut, mereka pusing membedakan antara kata “televisi” pada “pesawat televisi” dan kata yang sama pada “Televisi

Republik Indonesia”. Terlebih lagi, selama masa yang panjang pada era Orba, satu-satunya stasiun televisi ya TVRI, sehingga kata “televisi” memang kembar identik dengan TVRI. Tambah bingunglah mereka itu.

Dan, kebingungan itu agaknya tidak hanya terjadi pada puluhan tahun lalu, ketika saya menonton iklan layanan masyarakat itu. Sebab sekarang pun, ketika muncul kalimat “ada peningkatan sekian persen populasi yang menghabiskan waktu di depan televisi selama pandemi” tidak pernah benar-benar bermakna bahwa jutaan orang itu menonton tayangan-tayangan dari stasiun televisi. Sangat besar kemungkinannya bahwa banyak di antara mereka yang seperti kami, rebutan *remote* teve untuk memperjuangkan keinginan menonton Netflix atau Blippi. Sialnya, tetap saja kami bisa dengan seenaknya dituduh “menonton televisi”.

\*\*\*

Televisi memang sudah megap-megap. Tunggu, maksud saya, stasiun-stasiun televisi sudah megap-megap. Banjir arus digital membuat kita menjadikan siaran-siaran dari stasiun televisi bukan lagi sebagai menu primer untuk asupan informasi. Untuk menyantap informasi kita sudah lari ke media-media daring, juga media sosial. Sementara itu, untuk format audio visual sebagaimana kekuatan dasar televisi yang kita pahami, YouTube tak bisa dilawan lagi.

Anak saya yang kecil menonton tayangan untuk anak-anak di YouTube. Kualitas kontennya bisa kita kontrol, bisa juga kita pilih sendiri dari ribuan pilihan, tidak sebagaimana ketika kita memasrahkan anak kepada siaran stasiun televisi yang sering mengecewakan hati. Anak saya yang gede juga menonton YouTube, untuk menyimak drama-drama ABG, *unboxing* mainan, atau panduan bermain rubik.

Adapun istri saya menonton tutorial oles-oles *skincare* dan *review* sepatu ya dari YouTube, sedangkan saya sendiri menonton potongan-potongan berita, atau video *street fight* dan *instant karma* juga dari YouTube.

Lalu, untuk apa televisi? Maksud saya, untuk apa tayangan stasiun televisi?

Bahkan, bukan cuma terkait urusan-urusan kebutuhan praktis seperti itu tadi. Dengan ramainya YouTube, sesungguhnya yang terjadi bukan hanya pergantian media. Sebab ada pergeseran yang lebih mendasar di sana, yakni runtuhnya “otoritas kebudayaan” yang dulu digenggam

stasiun-stasiun televisi.

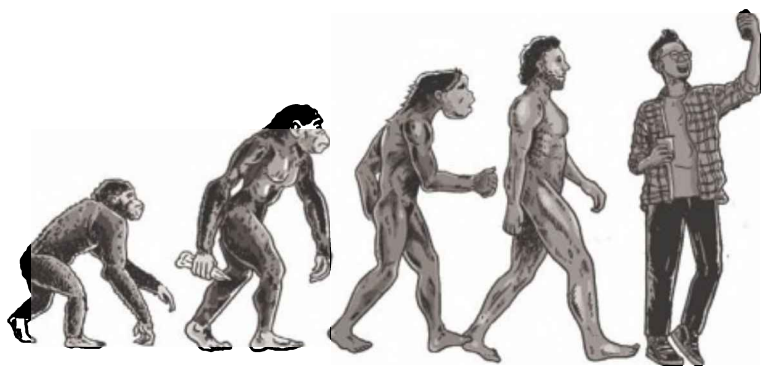
Dulu kala, orang jadi ngetop kalau diorbitkan televisi. Stasiun-stasiun televisi menjadi dewa yang menentukan nasib seorang manusia, apakah wajah dan suara si manusia itu akan dikenal publik luas ataukah tenggelam dalam kegelapan. Namun sekarang, orang tak perlu melamar untuk masuk teve, atau menunggu dilamar teve. Semua bisa membikin teve sendiri. Mulai Ria Ricis sampai gitaris Alip Ba Ta telah membuktikan itu. Ibaratnya mereka bilang, “Oke, teve nggak kasih aku panggung. Persetan, sekarang aku bikin panggungku sendiri!”

Akibatnya jelas, stasiun-stasiun televisi tidak menjadi dewa lagi. Bahkan yang lebih mengesankan, banyak program di stasiun televisi malah menayangkan potongan-potongan video dari YouTube, dunia yang telah melawan otoritas kebudayaan mereka sendiri.

\*\*\*

Kemarin tanggal 21 November adalah Hari Televisi. Saya yakin Anda tidak tahu itu. Tapi, toh Anda juga tak perlu tahu, daripada nanti malah bingung apakah hari tersebut maksudnya Hari Stasiun Televisi ataukah Hari Pesawat Televisi.

Yang jelas, tak berapa lama lagi kita akan lebih rajin menonton pesawat televisi, yang di dalamnya bersemayam jasad stasiun-stasiun televisi.[]



## Tak Perlu Lagi Ada Idola di Antara Kita

**H**ari-hari ini, saya sedang mengalami sedikit patah hati. Bukan karena efek kecelakaan puber kedua atau sejenisnya, tenang saja. Melainkan gara-gara saya mengikuti sebuah akun Instagram.

Akun IG yang saya maksud itu milik Katheryn Winnick, aktris Kanada. Belum lama juga saya kenal si Rambut Pirang itu. Semata-mata karena salah satu *series* mula-mula yang saya tonton di Netflix adalah *Viking*, dan Katheryn jadi salah satu pemeran utamanya.

Di *Viking*, Katheryn tampil sebagai Lagertha. Dia perempuan pendekar bangsa Viking, *skjaldmaer* alias “Gadis Perisai”, istri Ragnar Lothbrok tokoh legendaris Nordik.

Setelah menyimak sekian episode, saya betul-betul terpesona kepada Lagertha. Dia sosok perempuan yang cantik dan seksi luar biasa, penuh gairah meluap-luap. Tapi, ia juga perkasa, kokoh, independen, gesit, dewasa, tenang, penuh perhitungan, dan segenap kualifikasi lain yang membuatnya jadi antitesis rival asmaranya yang lebih menampilkan diri sebagai “putri-putrian”, yaitu Princess Aslaug.

Dari situ saya penasaran dengan pemerannya, dan ketemulah Katheryn Winnick berikut akun Instagram-nya.

Tapi, imajinasi tentang Lagertha seketika runtuh di mata saya.

Bagaimanapun, akun itu akun Mbak Katheryn, bukan akun Lagertha. Maka, seharusnya saya tak perlu kecewa ketika sosok yang saya intip-intip di akun itu adalah seorang perempuan gaul, kadang *selfie* dengan gaya centil, dan saya tidak melihat ada Lagertha-Lagertha-nya di sana.

Akhirnya saya sadar, saya memang ngefan berat kepada Lagertha, tapi sama sekali tidak ngefan sama Katheryn Winnick. Sialnya, ketika saya nonton *Viking* lagi, kedahsyatan persona Lagertha itu sudah dicemari oleh ingatan saya akan siapa sebenarnya di balik Lagertha. Imajinasi saya pun koyak moyak, sensasi menonton *Viking* jadi rusak.

Ini memang murni kesalahan saya, dan saya cuma mengulang jenis kebodohan yang sama meski berbeda bentuknya. Sebab dulu kala, saya pun pernah berada pada situasi menyebalkan yang mirip seperti ini.

Ceritanya, saya membaca sebuah buku yang keren sekali. Itu buku tentang renungan-renungan seseorang, dengan kualitas refleksi yang luar biasa dalam, penuh kejutan pikiran, dilambari khazanah pengalaman hidup yang begitu kaya. Belum lagi cara dia bertutur. Aduh. Penulis yang sekaligus berposisi sebagai narator tunggal di buku itu sempurna sekali membawakan dirinya sebagai pribadi bijak bestari bagai sufi, dengan karakter yang tenang, dingin, persetan dengan ingar bingar di sekitar, dan selalu membawa pembacanya pada palung yang dalam tapi penuh gejolak kegelisahan.

Hingga kemudian buku itu didiskusikan di sebuah acara di Jogja, dan sang Penulis agung direncanakan datang. Sepenuh semangat saya pun berangkat malam-malam, berusaha mendapatkan kursi terdepan. Dan, ketika sang Penulis pujaan saya itu muncul lalu mulai bicara, oh Tuhan. Ternyata cara dia berbicara berikuk warna suaranya mengingatkan saya kepada burung prenjak. Ceriwis sekali, tak tampak aura tenang sama sekali, sungguh berlainan dengan ekspektasi yang telanjur saya tata dalam tumpukan imajinasi.

Sejak malam itu, saya tidak begitu bersemangat lagi untuk membaca karya-karyanya. Gaya tutur naratif dalam buku-buku itu tiba-tiba berubah total jadi suara ceriwis burung prenjak. Mati-matian saya melawan bayangan itu, tapi ternyata saya tidak mampu.

\*\*\*

*Idolatry* memang bukan sesuatu yang rasional. Pada secuil sisi, ia mirip-

mirip dengan spiritualitas. Dialami, dinikmati, tapi tak perlu dijelaskan “kenapa”-nya dengan bukti-bukti. Jadi, kadang kala membongkar alasan-alasan untuk kekaguman itu muspra belaka. Malah ganjil ketika sebuah kekaguman dibenturkan pada hal-hal yang *tinemu nalar*, yang logis, apalagi kemudian disusul dengan: “Faktanya begini, lho, ya.”

Kenapa? Sebab dalam kepala kita, siapa pun yang kita kagumi itu sudah semacam setengah dewa, tak tersentuh, adimanusia. Dan, mungkin semestinya dijaga saja agar selalu begitu.

Pada masa analog, saat media-media cetak berjaya, kekaguman jenis demikian bisa bertahan sangat lama. Saya membaca tulisan Goenawan Mohamad, misalnya, atau Seno Gumira. Kemudian saya terpukau, mabuk, larut dalam sensasi yang membawa saya pada keinginan membanjirkan puja-puji. Tapi, puja-puji itu sebatas *rerasan* saja, tidak bisa saya sampaikan secara langsung. Kenapa? Karena saya tak punya akses kepada tokoh-tokoh itu. Saya tidak kenal dan tak mungkin bakal kenal dengan mereka.

Pada zaman itu, ada suatu jarak komunikasi yang terbentang panjang antara kita dan orang-orang yang karyanya kita kagumi. Jarak komunikasi itu akhirnya menciptakan pula jarak psikologis. Kita mengenal nama-nama mereka hanya lewat karya, bukan lewat realitas-persona.

Kemudian internet datang, dan media sosial menguasai segenap sendi kehidupan kita. Sosok-sosok setengah dewa itu pun turut riuh dalam ajang komunikasi level jelata. Akhirnya, kita bisa membaca bukan cuma karya-karya adiluhung para idola kita, tetapi juga celetukan-celetukan mereka, komentar-komentar asal-ceplos mereka, dan sebagainya.

Media sosial telah membuka tabir yang semula menyimpan mereka rapat-rapat sebagai adimanusia. Kemudian kita terkejut, lalu menyadari bahwa mereka juga sama dengan kita, bisa mengobrol umpatan, bisa *selfie* atau *posting* norak lainnya, bisa juga main blokir kepada siapa pun yang berbeda pandangan dengan mereka. Bahkan, kita pun bisa berkomentar langsung di akun mereka, bisa ikut menempelkan jempol *like* atau *angry* di unggahan mereka.

Jarak psikologis yang semula membentang itu pun lesap, seiring dengan menara pemujaan yang ambrol perlahan-lahan. Ujung-ujungnya, kita cuma bergumam, “*Halah, jebule ming ngono.*” Ternyata cuma begitu.



Itulah kenapa, kalau kita ingin tetap merasakan candu euforia dan sensasi rupa-rupa dalam pemujaan idola, rasa-rasanya memang perlu bagi kita untuk tetap menjaga jarak dari idola-idola kita. Apa yang “sebenarnya” itu tak lagi penting dalam euforia, dan tidak setiap hal perlu-perlu amat untuk dibongkar kebenaran di balik layarnya.

Pendek kata, ketika kita ingin terus bergembira, kita perlu merawat imajinasi dan membiarkan imajinasi tetap berhenti sebagai imajinasi. Sebab, dari imajinasi itu tumbuh emosi dan obsesi.

Itu kalau ingin terus bergembira. Masalahnya, apakah kita melulu hanya ingin bergembira?

Ternyata tidak begitu. Kemudahan akses informasi atas segala hal membuat kita kehilangan kemungkinan untuk yang begitu-begitu. Akibatnya, peluang-peluang pemberhalaan tak ada lagi, ruang-ruang kegembiraan tak berumur panjang lagi.

Maka, ini bukan cuma berlaku bagi para pemuja. Bagi siapa pun yang bernaftsu ingin dipuja, kesempatan pun semakin sempit. Tak perlu lagi orang bercita-cita untuk dikagumi, sebab tak ada lagi idola-idola yang bernapas panjang pada zaman ini.

\*\*\*

Pada tahun-tahun itu, seorang kawan saya sangat tergilagila kepada Dian Sastro. Sampai-sampai belasan kali dia berkirim surat kepada si Cinta itu. Entah sampai atau enggak surat-suratnya, atau cuma ditumpuk di pos satpam rumah Dian.

Yang pasti, segalanya memuncak ketika suatu hari kawan saya mengumpulkan para penyair muda rekan-rekannya, untuk membukukan seratus puisi buat Dian Sastro. Benar, kalau cuma kekaguman saya kepada Lagertha, itu tidak ada seujung upilnya pemujaan kawan saya kepada Dian Sastro.

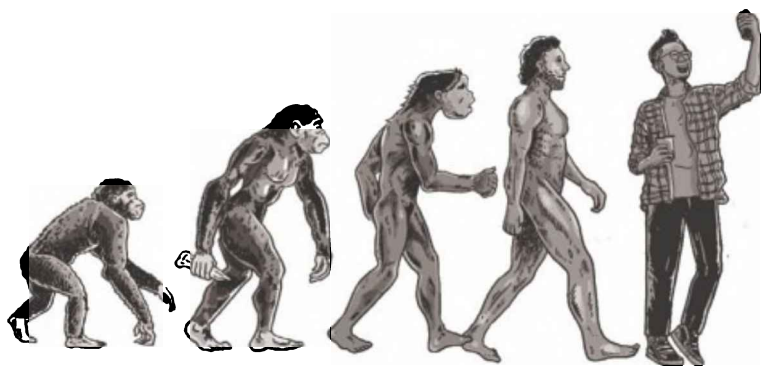
Sampai kemudian seorang kawan-dari-kawan datang dari Jakarta. Dia mendatangi kawan saya, mengatakan bahwa dia bisa mempertemukan langsung kawan saya itu dengan Dian Sastro.

Bisa dibayangkan betapa kagetnya kawan saya itu. Wajahnya memucat, puting beliung menghantam-hantam dadanya. Tapi kemudian, dengan suara gemetar dia menjawab: “Tidak.” Tidak, biarkan tetap seperti ini “hubungan”-nya dengan Dian Sastro. Dia tak mau segala

obsesi dan imajinasinya runtuh hanya karena perjumpaan.

Seharusnya, saya ingat kejadian itu. Seharusnya, saya tak perlu iseng-iseng membuka akun IG Katheryn Winnick itu. Seharusnya, saya tidak datang ke diskusi buku sang Sufi malam itu.

Tapi ya sudahlah, yang sudah ya sudah. Setidaknya, kalau ada yang mau mengajak saya untuk ketemu Chef Renatta, saya sudah berbulat hati untuk menolaknya.[]



## Oligarki YouTuber

**S**elama empat tahun terakhir, dalam setiap kesempatan bicara tentang fenomena media sosial, saya selalu menyebut-nyebut tentang “demokratisasi wacana”. Istilah itu, entah tepat entah tidak, saya sampaikan terutama terkait ruang dan panggung dalam bersuara, yang sekaligus memengaruhi pergeseran gaya berkomunikasi di hadapan massa (tentu saja massa digital).

Maksud saya, pada era pra-digital, panggung-panggung hanya dikuasai beberapa gelintir kekuatan, yaitu para penguasa industri media. Ruang bicara alias saluran untuk menyampaikan pendapat secara masif ke hadapan khalayak ramai tidak banyak, dan masyarakat luas pun bergantung pada media. Sehingga, terbentuklah karakter arus informasi yang nyaris bersifat *top down*.

Pada masa itu, media-media punya kuasa untuk memilih siapa saja yang mereka sukai untuk diberi podium. Orang yang tidak punya akses ke media, atau dipandang jauh dari kapasitas tertentu untuk mengakses corong media, ya tidak pernah memperoleh ruang itu. Kalau toh mereka berbicara, saluran diseminasi yang bisa mereka akses adalah ruang-ruang obrolan di mimbar perkuliahan, juga di warung kopi, pos ronda, grup arisan, majelis pengajian, atau jalur bisik-bisik tetangga.

Akan tetapi, tiba-tiba semua berubah cepat sejak era digital tiba, lebih-lebih lagi era media sosial. Setiap orang jadi punya kesempatan

yang nyaris sama untuk melipatgandakan efek suara mereka. Setiap orang punya potensi sebagai produsen informasi yang efektif, sehingga karakter *top down* pada masa lalu lambat laun mengabur. Pendek kata, setiap orang yang tidak punya akses atas panggung lama akhirnya bisa berkata, “Oh, aku nggak dapat panggung itu? Nggak masalah. Aku bikin panggungku sendiri!”

Dan, kita tahu, panggung-panggung baru pun bermunculan dengan gila-gilaan. Panggung lama semakin sepi, tatapan mata jutaan manusia terpecah ke mana-mana, ukuran-ukuran kapasitas tertentu sebagai syarat mengakses corong persebaran suara tak lagi ada. Bahkan belakangan, saya amati media-media digital dalam kategori pers pun memahami dan menghormati atmosfer baru itu.

Tidak usah jauh-jauh, contoh kasus kecilnya ya saya sendiri. Saya bukan siapa-siapa, bukan elite pengetahuan, tidak punya kapasitas apa pun dalam ukuran-ukuran lama. Tapi, saya berisik di panggung baru, dan itu pelan-pelan menjadikan saya bisa mengakses ruang-ruang lama dalam wajah baru dan dalam lanskap situasi yang juga baru.

Itulah yang saya sebut-sebut sebagai demokratisasi wacana, sekali lagi terlepas dari apakah istilah itu tepat atau tidak. Poinnya, dalam demokratisasi itu muncul kesetaraan dalam kesempatan menyebarkan suara seluas-luasnya, hingga kemudian sangat berpengaruh juga dalam gaya berkomunikasi di depan massa. Jika dulu gaya komunikasi formal cenderung lebih dominan (khas elite pengetahuan), sekarang siapa pun bahkan bisa menuliskan “hahaha!” dengan santai, di media-media serius, di tulisan-tulisan yang juga serius.

Beberapa waktu lalu, saya mendengar istilah dan pembacaan yang lebih jitu atas situasi ini dari budayawan kondang Irfan Afifi. Dia tidak menyebut demokratisasi, melainkan “desentralisasi”. Poin yang dia tekankan adalah pusat (kebudayaan) telah terpecah, menjadi banyak sekali pusat di mana-mana, di pelosok, di sudut-sudut. Walhasil, sebenarnya tak ada lagi yang namanya pusat. Tentu saya sangat setuju.

Gejala tersebut, entah mau disebut demokratisasi atau desentralisasi, sesungguhnya juga terjadi pada medan-medan aktivitas yang lain, bukan cuma dalam industri informasi. Dalam industri buku juga, misalnya, jenis industri lain yang dekat dengan dunia saya. Dulu, ada kekuatan yang terlalu dominan di level nasional dalam industri buku. Bahwa produksi buku alias penerbitan relatif mudah, itu benar. Tapi, kesempatan pemasaran nyaris dimonopoli oleh satu jaringan ritel raksasa.

Setelah era medsos hadir, jalur-jalur pemasaran baru terbentuk dengan masif, ceruk-ceruk pasar yang baru pun tergarap. Mulai toko-toko buku di akun-akun medsos, hingga *marketplace*. Lebih-lebih lagi semasa pandemi, ketika orang lebih suka di rumah daripada pergi. Akibatnya, banyak toko milik si jaringan ritel raksasa gulung tikar, dan cipratan berkahnya menyebar ke toko-toko *online*. Dalam industri buku (sebenarnya dalam industri yang lain-lain juga), zaman digital telah memecah orientasi atas “pusat” sebab kekuatan-kekuatan baru terus bermunculan.

Ini tentu menyenangkan. Inilah demokrasi dan kesetaraan. Inilah pemerataan kesempatan, dalam cara yang sebaik-baiknya.

Hingga kemudian hari-hari belakangan ini tiba, dan mimpi indah itu kok rasa-rasanya bakal segera sirna. Kita akan geragapan bangun, mengucek-ucek mata sejenak, lalu sadar bahwa pusat yang mengeropos lalu menciptakan ribuan kekuatan kecil di sudut-sudut baru pelan-pelan akan mengantarkan kita pada menggumpalnya kekuatan yang kecil menjadi besar, menjadi semakin besar, dan akhirnya yang kecil tadi pun dengan cepat akan menjadi segelintir pusat yang baru lagi.

Ribut-ribut permainan catur kemarin itu adalah gejala kuatnya. Ada keributan yang menyedot perhatian jutaan orang, bisa dikatakan skala internasional, minimal lintas negara. Salah seorang pelaku keributan segera disambar oleh akun YouTube milik seorang mantan pesulap. Keributan yang lebih besar lagi pun meledak, pelaku lain tidak terima, lalu dia menulis surat terbuka kepada sang Mantan Pesulap, meminta ruang dan panggung, panggung dihadirkan oleh si Mantan Pesulap, dan keributan kian menjadi-jadi.

Dalam segenap keberisikan itu, terjadi perputaran ekonomi yang sangat besar. Bahkan, untuk hadiah (untuk tidak menyebut “honor narasumber”) disediakan fulus 300 juta, nominal honor yang rasanya tak cukup mudah disediakan oleh lembaga media. Lalu, ke mana media-media? Ya, media-media yang semestinya masih besar itu harus rela hati menjadi penjunput remah-remah, dengan memberitakan ulang saja huru-hara di YouTube sang Mantan Pesulap.

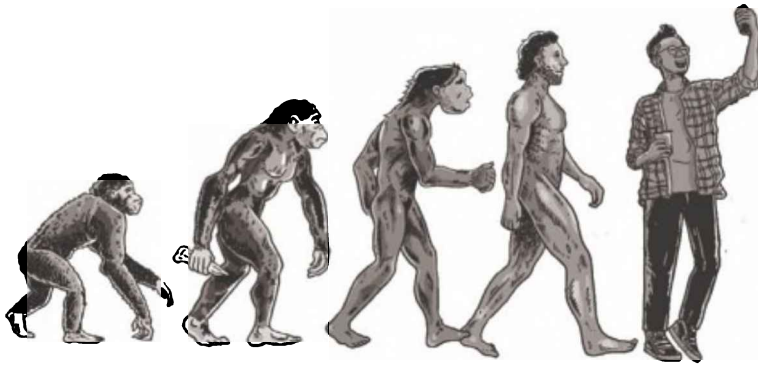
Tentu saja ini bukan dosa media. Tapi, bagaimana alur cerita yang berjalan membuat kita melihat bahwa tatapan mata jutaan orang telah direbut dengan sangat efektif oleh kekuatan kecil yang tak lagi layak mengaku kecil, para tokoh yang terlibat dalam keributan juga seolah tak lagi memikirkan alternatif panggung selain di panggung yang kecil-tapi-

tak-lagi-pantas-mengaku-kecil itu, dan yang seolah kecil tampak sekali sangat berpotensi untuk menjadi lebih besar dan lebih besar lagi.

Hasilnya, pemusatan itu akan segera terjadi lagi. Bukan cuma pemusatan perhatian dari jutaan pasang mata, melainkan juga pemusatan perputaran ekonomi. Industri-industri akan berebut mendapatkan serpihan ruang *marketing* di panggung kecil-yang-tak-lagi-boleh-mengaku-kecil, kue yang seharusnya bisa disebar untuk, katakanlah, menghidupi jurnalisme (juga media dan ribuan awaknya) akan mengumpul hanya ke beberapa gelintir orang saja, dan kesetaraan serta pemerataan yang semula diangankan itu akan jadi mimpi yang sia-sia.

Maka, khalayak banyak yang semula bergembira karena mendapatkan banyak alternatif bisa jadi tak akan lama lagi semakin kehilangan alternatif. Ini bukan lagi demokratisasi, bukan pula desentralisasi. Ini proses dalam menciptakan sentral-sentral yang baru. Hampir sama dengan apa yang berlangsung pada masa lalu. Bedanya, kali ini proses itu berlipat-lipat lebih instan, tanpa sistem kendali, tanpa tata aturan yang bisa mengamankan hak jutaan pasang mata yang menyimak tanpa henti, dan setelah ini entahlah apa lagi yang akan terjadi.

Dan, Anda semua yang awalnya membayangkan bisa menjaga panggung-panggung Anda sendiri, akan menjadi penjumput remah-remah juga tak lama lagi. Hahaha![]



## YouTuber Pembela Petani

“**T**idak ada satu pun YouTuber atau *influencer* top membantu mempromosikan produk pertanian pada saat petani mengalami kendala pemasaran.”

Saya membaca omelan itu di sebuah grup Facebook tentang berkebun. Secara reaktif, sebenarnya saya kepingin mengumpati para YouTuber itu. Tentu saja biar gagah. Mengumpat toh sudah jadi hobi yang tercitrakan keren belakangan ini. Tapi, setelah saya pikir-pikir, saya terlalu lapar untuk mengumpat, dan beduk Magrib pun masih lama.

Maka, saya lebih memilih mengernyit sebentar, dan akhirnya berujung pada kesan yang lain: sebegitu nistakah anak-anak gaul semacam tukang main YouTube dan pendengung-pendengung itu, di mata orang-orang yang tidak kenal mereka?

\*\*\*

Semua orang paham, pandemi telah mengacak-acak banyak aktivitas perekonomian. Orang tidak bisa lagi berinteraksi dengan bebas. Sementara sampai hari ini, mayoritas sektor riil masih mengandalkan perjumpaan wajah dengan wajah.

Akibatnya pasar pun sepi, angka perjumpaan penjual dan pembeli

turun drastis sekali, dan lenyaplah peluang transaksi-transaksi.

Sudah sering kita membaca berita tentang petani yang membagi-bagi hasil taninya, peternak ayam yang membuang ayam-ayamnya, atau nelayan yang menangisi tumpukan ikan-ikannya.

Akan tetapi, satu hal sebenarnya masih sama, hanya saja telanjur banyak orang melupakannya. Yakni bahwa konsumen masih tetap ada meski tidak bisa ke mana-mana, dan produsen masih juga bisa memproduksi meski kesulitan menjualnya.

Maka, satu hal yang perlu dilakukan adalah mempertemukan mereka, entah dengan cara apa. Seperti itu hakikat pasar, bukan?

Bulan lalu, saya mengamati aktivitas yang dijalankan dua teman saya. Sebut saja namanya Mawar dan Melati; dan memang semuanya indah. Si Mawar berjualan *wedang uwuh*, sejenis minuman rempah khas Jogja, dengan konsumen jaringan perkawanan. Hasil jualan itu ia salurkan untuk membantu kalangan yang terdampak pandemi. Adapun *wedang uwuh*-nya diambil Mawar dari para peracik di sebuah desa, yang selama masa wabah ini kekurangan order.

Adapun si Melati berjualan lobster. Lobster-lobster itu merupakan hasil tangkapan para nelayan di Gunungkidul. Pada masa normal, hasil kerja nelayan diserap restoran-restoran yang ada di sepanjang garis pantai Gunungkidul, dan restoran menyajikannya untuk para wisatawan. Tapi, sejak Corona hadir dalam kehidupan kita, pariwisata ambyar, restoran-restoran juga, dan akhirnya nelayan menyusul pula.

Di tangan Melati, pemasaran lobster itu bisa dengan cepat menjangkau konsumen baru di Jogja kota, dua jam perjalanan dari Gunungkidul. Pesanan membeludak, Melati kewalahan, nelayan kelarisan, dan para sopir ojol kecipratan berkah mengantar pesanan-pesanan.

Lalu, apa rahasianya? Rahasiannya adalah konektivitas, meski kita juga tahu kalau itu tidak rahasia-rahasia amat.

Saya sendiri ikut membantu si Mawar dan si Melati. Selain dengan berbelanja, saya juga diminta untuk turut menyebarkan kabar “ayo beli *wedang uwuh*” dan “ayo beli lobster” ke beberapa puluh ribu *follower* saya. Bersama kabar itu, satu info kami sisipkan, yaitu bahwa dengan berbelanja si pembeli otomatis membantu pula para nelayan dan peracik *wedang uwuh* yang dapur mereka terhuyung-huyung diterjang Corona.

Tentu saya bukan satu-satunya pihak yang berperan dalam persebaran kabar itu. Selain ada beberapa kawan pendengung lainnya,



jangan lupa bahwa jaringan perkawanan Mawar dan Melati sendiri luas sekali, seluas pintu maaf kita pada beberapa hari menjelang Idulfitri.

Tapi poinnya, yang telah dilakukan oleh Mawar dan Melati adalah mempertemukan dua entitas yang selama ini tidak pernah bertegur sapa, yaitu produsen dan pendongeng. Para peracik *wedang uwuh* tak pernah kenal dengan aktivis Facebook, sebagaimana aktivis Facebook juga nggak kenal peracik *wedang uwuh*. Para *selebgram* nggak pernah berurusan dengan nelayan di Pantai Sadeng dan Ngobaran, sementara nelayan-nelayan itu mungkin tak pernah mengira bahwa di muka bumi ini ada makhluk yang bernama *selebgram*.

Akan tetapi, Mawar dan Melati mengenal kedua pihak itu. Mereka pun mempertemukan pihak-pihak yang mesti dipertemukan, hanya dalam selarik kalimat ringkas, “Eh, tolong bantu *share*, dong.”

Setelah kedua pihak itu dipertemukan, hasilnya adalah perjumpaan yang lain lagi, yaitu perjumpaan dengan para konsumen yang masih menyimpan banyak uang, tapi tak tahu ke mana bisa berbelanja aman dan murah pada masa pandemi. Ujungnya, ekonomi berputar kencang, tanpa harus menciptakan kerumunan-kerumunan yang kontraproduktif dengan upaya bertahan hidup di era yang serbategang.

\*\*\*

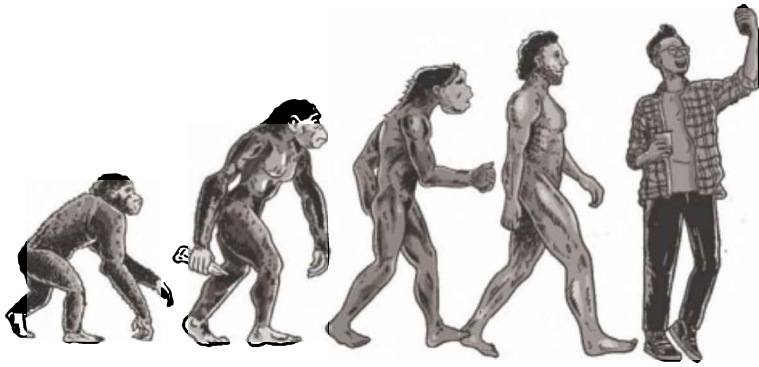
Saya kira, model *digital socialpreneurship* semacam itu bisa dikembangkan untuk banyak sektor yang lain, termasuk sektor pertanian sebagaimana keluhan yang saya kutip di awal. Dan barangkali, model seperti itu akan menjadi salah satu praktik paling cocok untuk *the new normal* yang mesti kita hadapi.

Dalam model demikian, yang ada bukan hanya kebutuhan yang bertemu dengan kebutuhan, melainkan kebutuhan bertemu dengan kebutuhan sekaligus dirangkai dengan kepedulian. Kalau hanya kebutuhan saja yang saling bertemu, pasar akan dengan sangat mudah bergeser sesuai hukum ekonomi. Tapi, jika hanya kepedulian saja yang diandalkan, napasnya tak akan panjang dan dalam waktu singkat akan terhenti.

Tapi, model demikian tetap saja tak akan bisa berjalan kalau tak ada upaya untuk mempertemukan dan “mencantolkan” roda-roda gerigi pemutar mesin ekonomi. Dan, yang bisa mempertemukan roda-roda

tersebut ya para penggerak.

Persoalannya, ada dua jenis penggerak. Ada penggerak yang dengan suka hati membabati semak-semak penghalang komunikasi, seperti halnya si Mawar dan si Melati. Di sisi lain, ada jenis penggerak yang gampang jijik kepada kalangan lain yang berbeda karakter ruang aktualisasi; agaknya mereka telanjur menganggap sakral diri sendiri.[]



## Selebgram vs Penulis

**S**eorang teman menggerutu. Dia akademisi, mengajar di beberapa kampus, dan kadang menulis juga di banyak media. Musabab gerutuanya adalah kabar yang tempo hari tersebar, tentang seorang *selebgram* yang tarif *posting-an endorse-nya* puluhan juta.

“Kita ini ya, *Bro*. Sudah menulis pake mikir berat-berat sampai pusing, kadang buka referensi macam-macam, belum lagi harus cari ide dan menata analisis yang kuat, eh, honor dari media cuma ratusan ribu. Lah itu *selebgram*, nulis satu *caption* ecek-ecek sambil goyang-goyang aja dapatnya empat puluh lima jeti! *Piye, jal?*”

Saya tersenyum B<sup>3</sup> aja. Bukan sekali dua kali saya mendengar ratapan serupa. Bahkan, kalau urusannya dengan para penulis, itu jadi keluhan *default*, yang awalnya membuat saya prihatin, tapi lama-kelamaan malah bikin saya geli sendiri.

Menulis memang tidak segampang yang dibayangkan orang. Bohong kalau ada yang ngomong menulis itu gampang. Yang gampang itu mengetik, sedangkan menulis membutuhkan kemampuan menggali ide, keterampilan menata struktur pikiran, kecanggihan dalam menyodorkan argumen yang logis dan kuat, dan sebagainya.

Maka, wajar saja ada penulis yang seperti kawan saya tadi. Dia tersinggung karena jerih payah intelektualnya seolah tercampakkan di hadapan segala kemegahan hidup para *selebgram*.

Di satu sisi, saya setuju saja dengan kawan saya. Penghargaan atas hal-hal yang berbau ilmu pengetahuan memang masih rendah di negeri ini. Gaji dosen dan peneliti pun rasanya masih kalah sama penghasilan YouTuber tukang *cover* lagu. Tapi, di sisi lain, kawan saya itu sebagai penulis juga kurang jeli dalam memetakan masalah.

Begini, maksud saya. Dia bilang bahwa tulisannya dibayar murah, sedangkan *caption* bikinan para *selebgram* dihargai puluhan juta. Artinya, dia sedang memperhadapkan antara dua produk: tulisannya versus takarir bikinan si *selebgram*. Masalahnya, pola pasar yang sedang berjalan sesungguhnya tidak seperti itu.

Coba perhatikan lagi. Apa yang dibayar oleh media kepada si penulis? Benar, tulisannya. Gagasannya. Keterampilannya meracik kata-kata. Lalu, apa yang dibayar oleh industri kepada si *selebgram*? Ide cemerlang dia? Kelihaiannya dalam menampilkan diksi yang membius pada takarir unggahan-unggahan IG-nya? Tentu saja bukan!

Yang dihargai dan dibayar oleh klien si *selebgram* adalah kekuatan *follower*-nya!

Itulah kenapa, meski keterampilan bikin kontennya sama, *selebgram* yang punya *follower* seratus ribu dan *selebgram* dengan pengikut lima juta, tarifnya beda. Bahkan sebenarnya, dalam kreativitas bikin konten IG, saya ini jauh lebih keren daripada Anya Geraldine, apalagi Tante Erni. Tapi, dengan *follower* tujuh ribu nggak naik-naik, tentu saja akun IG saya tak lebih daripada sudra tak berguna di hadapan keagungan akun mereka berdua.

Awalnya saya mau bilang bahwa inilah realitas baru yang kita hadapi. Tetapi, sekejap saja saya renungkan, saya sadar ini bukan realitas yang sama sekali baru. Ini realitas lama belaka, hanya saja mengambil bentuk dan wadah yang baru.

Para *selebgram* itu sesungguhnya bukan semata-mata merebut tempat penulis. Mereka telah merebut posisi media massa.

Coba pahami lagi duduk perkaranya. Media menyediakan berita dan segenap informasi pelengkapannya. Karena menyediakan segala informasi itu, banyak orang berlangganan atau menjadi pengakses rutin. Dari mekanisme langganan atau akses rutin itu, muncullah statistik pembaca. Statistik pembaca itulah yang menjadi daya tawar sekaligus daya jual media di hadapan pengiklan. Semakin banyak pengakses yang rutin menjadi pembaca si media, semakin mahal juga tarif iklan di sana.

Artinya, berita menjadi garis idealisme media dalam gerak aktivitas profesionalnya. Namun, pada saat yang sama ia juga menjadi amunisi untuk mengumpulkan pelanggan. Dengan populasi pelanggan itulah media menawarkan kemampuan diseminasi alias ketersebaran informasi yang ada di iklan-iklan. Semakin banyak pelanggannya, semakin tinggi potensi persebarannya, semakin mahal pula tarif iklannya.

Nah, para *selebgram* dan para kreator konten digital lainnya menjalankan pola yang sama saja, bukan?

Bedanya memang pada tahap penyajian konten. Ketika media massa menggaet audiens dengan konten-konten informatif, para *selebgram* menggaet pengikut mereka dengan konten yang untuk ukuran tertentu sering kali tak ada layak-layaknya. Ketika media massa memproduksi sajian dengan modal profesionalisme tim wartawan dan penulis, para *selebgram* memainkan sensasi personal mereka sendiri.

Jadi, ketika kerumunan di media dalam sebagian sisi bisa bermakna tingginya populasi manusia yang haus informasi, kerumunan pengikut di sekitar akun *selebgram* tak lebih dari kehausan akan *infotainment* belaka. Namun sekali lagi, kekuatan yang bisa dikapitalisasi oleh para *selebgram* itu adalah jumlah *follower* mereka, bukan kecemerlangan kontennya.

Inilah wajah yang berubah dari dunia informasi kita. Wajahnya saja yang berubah, tapi pola dasar dari cara permainannya tetap sama dari masa ke masa.

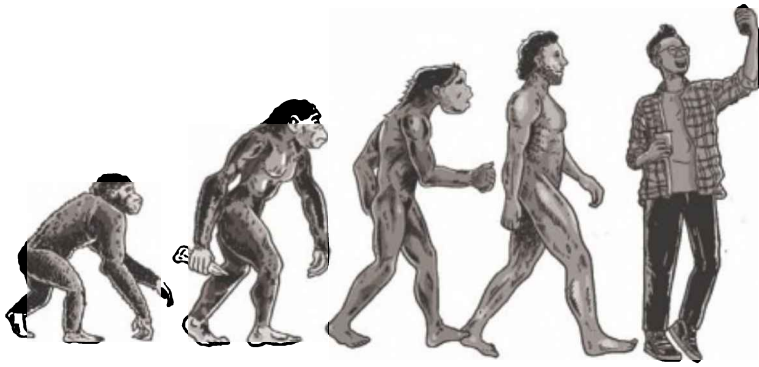
Lebih spesifik lagi, harap sadar, penulis tidak pernah dikalahkan oleh *selebgram*. Keduanya bergerak dalam ruang dan skala yang berbeda. Jadinya, tetap saja tidak relevan jika ada penulis yang cemburu dengan kesuksesan seorang *selebgram*. Ia ibarat *olshoper* yang merasa bersaing *head to head* dengan bos Tokopedia, atau tukang ecer bensin yang iri dengan kesuksesan seorang komisaris Pertamina.

Maka, kalau memang tujuannya dapat duit empat puluh lima jeti hanya dengan menulis dua paragraf, ya jangan jadi penulis. Jadilah *selebgram* saja. Pertanyaannya: memangnya bisa? Dikiranya kemampuan menulis yang *ndakik-ndakik* bisa menghasilkan *follower* belasan juta? Hahaha![]

---

<sup>3</sup> Singkatan untuk “Biasa”.—peny.





## YouTuber dan Tewasnya Informasi

**“Y**ang kukhawatirkan justru bagaimana nasib dunia informasi beberapa tahun lagi di Indonesia, *Bro*. Ini mengerikan. Yang rugi masyarakat kita sendiri. Hancur. Benar-benar hancur.”

Saya tertegun menyimak kalimat-kalimat yang meluncur dari mulut lelaki di hadapan saya. Tadinya saya mengira dia cuma mau mengobrol soal bisnis, perkara-perkara duniawi sejenis perburuan uang dan harta karun. Tapi, buntutnya jadi jauh lebih serius daripada itu.

Tiba-tiba, saya merasa sedang berhadapan dengan sosok pengayom yang memendam kegundahan altruistik penuh kemuliaan, tak bedanya dengan para SJW<sup>4</sup> yang saya kenal. Sialnya, kali ini saya tidak bisa membantahnya. Orang ini benar. Seratus persen benar.

\*\*\*

Saya membetulkan posisi duduk saya. Langit Surabaya sore itu terasa ganjil. Satu jam sebelumnya amat cerah, ditemani udara yang begitu gerah. Tapi, pada menit-menit berikutnya, awan mendung datang bergulung-gulung. Sampai kemudian sebutir dua butir air besar-besar mulai menimpa atap kanopi di warung kopi tempat kami berjumpa. Saya curiga, perubahan cuaca yang cepat itu terjadi memang karena

galaunya hati kawan saya tadi.

Di tengah suara *pletok-pletok* hujan lebat yang mulai menampari sekujur wajah Surabaya, kawan saya melengkapi lagi ceritanya.

Dia memulai dengan gambaran bagaimana media *online* yang dia kelola memutuskan tutup buku. Sebelumnya, telah ada banyak media lain yang mendahului. Musababnya tentu saja seretnya oli untuk menjaga laju mesin penggerak media-media itu. Para investor tak lagi percaya bahwa ada potensi bisnis yang bikin ngiler dari media-media yang selama ini mereka hidupi. Pada saat yang sama, pemasukan iklan, apalagi sekadar AdSense, tak bisa dijadikan sandaran. Itulah kenapa media yang digarap kawan saya itu menyusul pula.

“Media Anu saja ternyata cuma mampu menutup seperempat dari kebutuhan biaya mereka dari pemasukan iklan, lho. Gimana coba? Jelas nasib semua media yang *start up* kritis sekali. Jauh dari bayangan semula.”

Saya manggut-manggut takzim. Saya tahu, kawan saya itu tidak sedang memikirkan dirinya. Ada belasan bisnis yang dia jalankan, sedangkan media *online* yang gulung tikar itu cuma camilan. Dia sedang memikirkan, mmm, anu, bangsa Indonesia.

Sembari manggut-manggut itu, otak saya menelusur lagi, dari mana semua ini bermula.

Iklan memang sumber makanan utama media-media. Bersama informasi-informasi yang dibutuhkan publik luas, media menyajikan iklan pesanan industri, dan industri membayar ruang iklan itu. Setelah ada Google di dunia ini, banyak industri beriklan lewat jalur AdSense, membayar ke Google, dan media mendapatkan pembagian keuntungan dari Google. Belum lagi iklan yang dipasang Google lewat mesin pencariannya.

Dengan senjata algoritma, segmen konsumen yang ditembak industri jadi lebih terfokus, iklan dan pemasaran jadi lebih efektif, meski media hanya mendapatkan *sharing* yang lebih sedikit dibanding ketika dulu mereka langsung bertransaksi dengan industri.

Maka, jumlah iklan di media konvensional menurun, jumlah industri yang beriklan langsung ke media pun ikut merosot. Muncullah kemudian roda perekonomian dunia yang digelindingkan oleh klik jempol-jempol kita. Klik ibu jari kita membentuk *traffic* alias lalu-lintas kunjungan, *traffic* yang tinggi berarti akses atas iklan yang juga tinggi, dan akses yang tinggi terhadap iklan berarti *sharing* keuntungan dari Google semakin



banyak.

Imbasnya, model permainan berbasis jempol seperti itu memunculkan media-media murahan yang menghamba pada *clickbait*, bahkan tanpa malu bikin hoaks hanya demi berebut klik. Berita yang disajikan pun memelintir urusan-urusan yang paling mudah memancing sentimen dan emosi personal, khususnya terkait agama, politik, dan kesehatan. Dalam kondisi emosi, siapa yang masih mampu mengerem jempol?

Sebagian media yang meminggirkan etika itu kemudian larut pula dalam polarisasi politik yang pernah terjadi (atau masih?) di negeri kita, turut bermain di sana demi menggaet segmen pembaca fanatik dan otomatis pengeklik iklan fanatik. Dan, semua itu berpadu dengan rendahnya literasi media di kalangan masyarakat awam.

Akibatnya, lambat laun kepercayaan publik kepada media mulai tergerus. Lubang ketidakpercayaan itu diisi dengan cepat oleh aktor lain. Siapa lagi kalau bukan media sosial?

Bagi publik awam, informasi ya informasi, setara saja bobotnya. Mereka tak paham kualifikasi informasi. Mana informasi yang akurat dan mana yang mencurigakan, mana yang sesuai standar jurnalisme dan mana yang asal ditulis. Apalagi tentang media mana yang punya rekam jejak tepercaya dalam akurasi informasi dan mana yang *ngehek*, mereka tidak paham.

Sialnya, pendidikan di sekolah dan pendidikan publik di masyarakat luas pun tak ada yang secara serius menyebarkan pemahaman soal-soal itu. Hasilnya, banyak sekali akun media sosial yang jauh lebih dikenal dan dikunjungi publik daripada media massa alias lembaga pers. Akun-akun Instagram dengan *follower* ratusan ribu, akun YouTube dengan *subscriber* puluhan juta, jadi lebih sering menyedot pandangan mata. Apa efeknya?

Efeknya jelas sekali dalam mekanisme pasar seperti ini: iklan-iklan pindah ke medsos. Industri menggelontorkan uang mereka ke akun-akun medsos, alih-alih ke media massa penyedia informasi.

Dua pekan lalu saya pergi ke Wonosobo, ditemani seorang sopir hebat berpengalaman tinggi. Namanya Rusli. Selain mantan aktivis pers mahasiswa, dia sekarang juga sangat aktif di YouTube. Maksudnya, aktif sebagai penonton. Menurut pengakuannya, tak jarang dia menghabiskan waktu delapan jam lebih setiap hari hanya untuk menonton video-video nggak jelas yang tersebar di YouTube.

Saya merasa perlu menyebut fakta bahwa Rusli kecanduan YouTube, hanya untuk menegaskan kompetensi profesionalnya sebagai seorang pemerhati. Dari situ saya jadi percaya ceritanya.

“Mas, tahu nggak, Mas. Kemarin, perusahaan otomotif Yang Itu meluncurkan produk mobil baru. Nah, mereka tak lagi mengundang satu pun media massa untuk meliput! Sekarang memang sudah semakin sedikit yang mau mengundang media. *Lha wong* bakalan lebih efektif kalau yang diundang YouTuber, kok.”

Awalnya, saya tak terlalu menyimak cerita Rusli. Namun, sekarang saya paham, lanskap akan segera berubah total. Bukan hanya lanskap pemasaran dan dunia bisnis, tetapi juga lanskap informasi dan pengetahuan.

\*\*\*

Saya pun kembali memandangi wajah ganteng kawan saya, di bawah guyuran hujan yang semakin deras menghajar Surabaya.

Di balik pandangan matanya yang menerawang jauh, saya melihat aliran uang dari industri lari semua ke medsos, ke para *selebgram*, *selebtwit*, juga *seleb* YouTube dengan jutaan pengikut. Media-media massa semakin kehilangan sumber iklan, para penggeraknya mulai kehilangan sumber penghidupan, nasib informasi dan berita yang layak baca pun semakin mengkhawatirkan.

Di sebelah sana, para *seleb* menanggung banyak uang yang bisa membuat mereka hidup mewah, dan kita terus menonton saluran mereka dengan gembira. Sambil berjam-jam menonton YouTube berisi *prank* atau *unboxing* produk, kita tidak menyadari bahwa ada saatnya nanti kita tak lagi punya kesempatan untuk mengakses informasi bermutu tinggi.

“Di luar negeri situasi seperti ini memang sudah berjalan, Bal. Akhirnya, masyarakat di sana bertahan dengan media-media yang lebih mengabdikan kepada publik, dengan sistem donasi. Publik percaya dengan kredibilitas media terkait, merasa membutuhkan informasi akurat, dan mau menyumbangkan uang demi tujuan itu. Kukira nanti mau tak mau kita akan berjalan ke arah sana,” kata kawan saya itu, kemudian menyeruput tetes terakhir *vanilla latte*-nya.

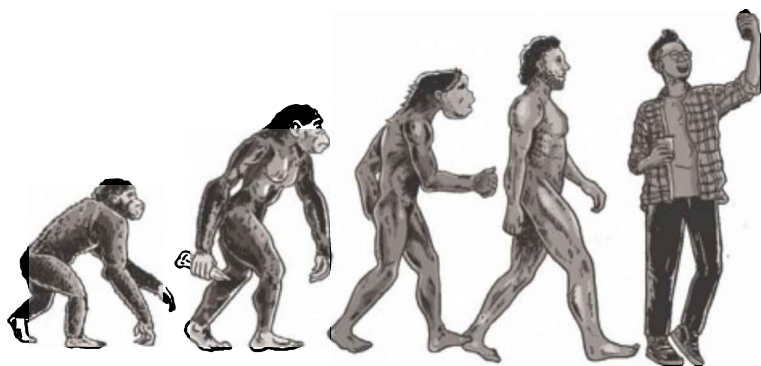
Saya kembali manggut-manggut penuh kepercayaan. Sampai

kemudian saya kaget sendiri.

*Lho, Cak, sejak kapan masyarakat kita mau memberi harga yang pantas untuk informasi dan pengetahuan? Lihat saja, orang pada pamer di Instagram habis makan mahal dan jalan-jalan, tapi giliran beli buku milihnya yang murah meski bajakan. Macam gitu mau diajak berdonasi sukarela untuk membaca media massa?[]*

-----

<sup>4</sup> *Social Justice Warrior*.—peny.



## Hikmah Masa Corona

**G**ara-gara harus meringkuk di dalam rumah selama sebulan lebih, banyak orang kini lebih rajin membaca buku. Saya sendiri yang sebenarnya tidak punya ketelatenan tinggi dalam membaca pun tiba-tiba sadar, dalam sebulan terakhir buku yang saya baca jauh lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya.

Di lini masa media sosial, tiba-tiba banyak orang menceritakan buku-buku yang mereka baca. Foto-foto dipajang, menampilkan buku-buku yang bersebelahan dengan kopi atau lumpia. Saya menjumpai seorang kawan mulai membagi videonya sendiri saat membedah tuntas sebuah buku bagus. Dan di sudut sana, kawan saya yang lain memamerkan betapa dagangan bukunya laris manis.

Pada hari-hari awal ketika seruan *social distancing* disebar, soal buku ini memunculkan pembacaan berujung pesimisme di kalangan pekerja buku. "Kami duga awalnya orang-orang akan bosan di rumah saja, dan buku-buku menjadi salah satu pilihan pelariannya. Tapi, situasi tidak sesederhana itu. Meski bosan di rumah, ada pergerakan ekonomi yang berhenti. Daya beli menurun drastis. Akhirnya ya sama saja, tak ada orang membeli buku." Begitu cerita seorang kawan dengan suara lemas.

Akan tetapi, setelah sebulan lewat, entah kenapa situasi berubah lagi. Kemarin siang saya bertemu kawan saya lainnya lagi di aplikasi

Zoom, panggil saja dia Agus. Agus punya toko buku *online* yang cukup terkenal, sebut saja namanya Akal Buku. Agus bercerita, pada masa normal dia bisa menjual 15 sampai 20 eksemplar dalam sehari. Tapi gara-gara Corona, orderan per hari tinggal 2 biji!

“Tapi, itu bulan lalu. Entah kenapa sekarang semua pulih lagi. Aku sendiri juga kaget. Alhamdulillah,” Agus bercerita, tentu dengan ekspresi wajah dan suara yang sangat ceria.

Buku-buku secara mendadak menjadi tempat “kembali”. Kita sudah terlalu lama meninggalkan buku-buku, dan sibuk dengan cecaran informasi yang berentetan tanpa henti. Sebelumnya buku-buku memang tetap laris, tapi mentok menjadi barang koleksi. Sangat sering saya mendengar teman menangisi waktunya yang tak lagi ada untuk membaca. Buku-buku masih tersegel plastik meski sudah dua tahun lebih dibeli. Namun, imajinasi intelektual masih terus dipupuk sehingga orang tetap membeli buku-buku, dengan rencana membaca yang entah kapan terwujud.

Sekarang, jam demi jam kita jalani dengan lebih hening, lebih lambat, tetapi juga lebih kontemplatif. Buku-buku mewakili atmosfer itu. Tentu karena semuanya berpadu dengan minimnya aktivitas, efisiensi waktu karena tak ada lagi kegiatan merayap berjam-jam menembus kemacetan, berpadu pula dengan media sosial yang dari sana citra buku-buku tersebar dengan lebih menggairahkan, dan tentu saja layanan toko *online* dan jasa pengiriman yang masih berjalan.

Jadi, jangan kaget kalau selepas musim Corona nanti, entah kapan itu, ada peningkatan kecerdasan kolektif bangsa Indonesia secara sangat signifikan. Hahaha! *Ngarep* boleh saja, kan?

\*\*\*

Saya mungkin terdengar terlalu optimistis dengan apa yang saya ceritakan barusan. Tapi, memang kali ini saya ingin bercerita yang baik-baik saja.

Kemarin seorang kawan lama mengirim pesan kepada saya untuk menyudahi tulisan-tulisan bernada getir dan penuh keluh kesah. Dia bilang, “Iya kalau kamu sendiri mungkin nggak *papa*, Bal. Tapi ingat, karakter orang beda-beda, fondasi dan masalah kejiwaan orang juga berbeda-beda. Bagi orang-orang macam kamu, keluhan itu bisa jadi nggak ngaruh apa-apa. Tapi buat yang sudah depresi, mendengar

keluhanmu bakal bikin tambah depresi, dan bisa-bisa putus asa lalu bun ... ah semoga enggak.”

*Deg!* Saya kaget juga. Lalu, sedikit banyak membenarkan perkataan teman saya.

Maka, hari ini saya memulai dengan bercerita tentang buku-buku. Cukup indah, bukan, cerita saya? Dan, itu baru tentang buku-buku. Sementara itu, saya masih punya banyak cerita lain yang tidak melulu mengundang pilu.

Tentang aplikasi-aplikasi *meeting* seperti Zoom, Google Hangout, UMeetMe, dan Lite Big, misalnya. Jangan dikira itu hanya soal teknis. Hari ini, aplikasi jenis itu sudah menjadi fenomena spesifik. Sudah ada ideologi, bahkan spiritualitas di sana.

Bayangkan saja. Kemarin-kemarin, kita memang sudah bermain medsos. Interaksi kita via medsos sudah mencapai segenap kolega dan handai tolan yang terpaut jarak begitu jauh. Kadang malah kita lengkapi lagi semuanya dengan grup WhatsApp.

Tapi, apakah Anda juga merasakan bedanya ketika Zoom dan kawan-kawannya tiba, lantas kita bisa berkumpul dalam jumlah banyak, saling melihat wajah, saling mendengar suara, dan dengan sangat meyakinkan mekanisme tersebut telah membawa kita bergeser dari karakter psikologis medsos dan grup WhatsApp?

Salah satu hal yang dikritik dari pola interaksi di medsos adalah impersonalitas. Kita melihat kawan-kawan medsos kita hanya sebagai akun. Kadang kita sendiri pun seolah lupa bahwa kita manusia, sebab ketika bergerak di medsos kita memosisikan diri cuma sebagai akun, bukan sebagai manusia.

Tak heran, di medsos kita bisa dengan ganas mencela orang, membacot-bacotkan orang, sampai kadang heran sendiri karena kita di “dunia analog” ini sama sekali berbeda dengan citra personal yang tampil di medsos.

Semua itu dilengkapi lagi dengan muslihat aneka rupa aplikasi edit foto, yang membuat kita bisa memajang diri dalam performa paling tidak masuk akal, mulai dari sudut pengambilan gambar hingga kemulusan kulit wajah. Kita adalah akun di medsos. Kita adalah bidak-bidak palsu di medsos.

Akan tetapi, aplikasi *meeting* bicara lain. Kita tak lagi bisa tampil sepenuhnya dalam citra-citra palsu kita, atau dalam ekspresi-ekspresi yang tak peduli pagar-pagar sosial sebagaimana biasanya kita jalankan

di medsos.

Di aplikasi *meeting*, yang dibarengi dengan maraknya orang menggunakan fitur siaran langsung di Facebook maupun Instagram, kita pelan-pelan melawan impersonalitas. Kita mau tak mau mesti tampil apa adanya, dengan senyum dan tawa yang tak bisa dipoles via aplikasi edit video, dengan nada suara yang tak bisa kita siasati dengan emotikon atau sekadar ketikan huruf “wkwwk”.

Ini tampak sepele, tapi diam-diam menjadi sebuah lompatan besar. Dan tanpa Covid-19, kita tak akan segera sampai di titik ini. Kesempatan pertemuan yang tidak lagi fleksibel, acara-acara yang tak lagi boleh mengumpulkan orang dalam jumlah besar, telah membawa kita kepada sedikit upaya melawan kepalsuan media sosial.

Ya, sedikit saja, memang. Sebab, ketika saya harus bergabung dalam sebuah forum Zoom, atau diwawancarai seorang *seleb* YouTube lewat IG Live, toh saya tetap tidak merasa penting untuk mandi dulu, apalagi pakai minyak wangi.

\*\*\*

Dua dimensi yang saya ceritakan tadi masih sebatas urusan kita dengan produk-produk teknologi yang menjadi alternatif aktivitas kita selama musim Corona. Masih ada sekian kabar positif lainnya, termasuk bagaimana kita dipaksa oleh situasi, dan oleh kebijakan dunia pendidikan, agar menjadi guru dadakan di rumah-rumah kita sendiri.

Anda boleh saja mengeluh. Potensi kericuhan di rumah akibat minimnya pengalaman kita dalam mengajar memang lumayan besar. Saya dan istri pun berkali-kali harus ribut dengan anak kami sendiri karena proses belajar bersama tanpa kehadiran gurunya yang asli.

Ini sering kali tak gampang. Tapi, kita tiba-tiba jadi lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak kita sendiri, dengan keluarga kita sendiri, padahal sebelumnya itu hanya berlangsung pada akhir pekan atau malam hari. Bukankah itu seindah-indahnya keadaan?

Dari prediksi para ahli yang saya simak (meski sering tanpa mengerti), kondisi ini masih akan berlangsung hingga berbulan-bulan ke depan. Dengan waktu sepanjang itu, kita akan membentuk normalitas yang baru, yang berbeda, yang dalam banyak sisi akan lain sama sekali dengan apa yang telah bertahun-tahun sebelumnya kita jalani.

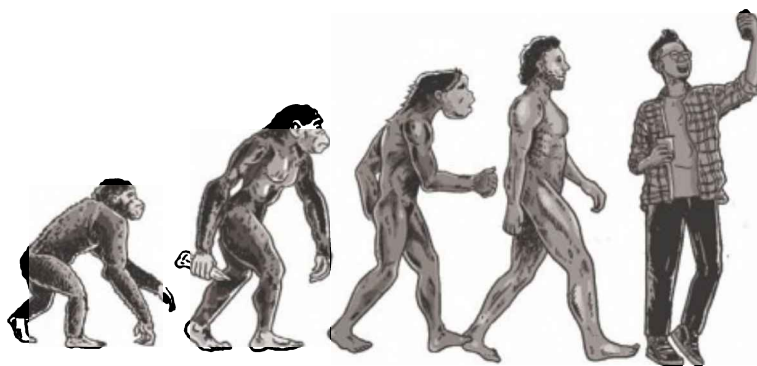
Setelah ini, kita akan membentuk pola interaksi yang sama sekali baru, norma komunikasi yang juga baru, corak kedekatan interpersonal yang juga baru. Entah bagaimana wujudnya, saya juga belum tahu. Yang jelas, kita tak akan mudah untuk kembali seperti sediakala. Bisa jadi itu bermakna negatif, tapi melihat buku-buku, terkikisnya impersonalitas, dan terbangunnya kembali kedekatan keluarga, saya kira ada banyak hal positif di sana.

\*\*\*

“Lho, tapi apa yang kamu ceritakan itu, kan, sangat terbatas di kalangan kelas menengah? Bagaimana dengan mereka yang tidak punya alokasi anggaran untuk buku-buku, tidak punya paket data internet sebesar punyamu, dan karena itu juga tidak bisa belajar dengan sistem *online* bersama anak-anak mereka?”

Iya, iya, saya sangat sadar itu. Tapi, kan, tugas saya hari ini memang bercerita yang positif-positif. Kalau mau dilebar-lebarkan, nanti ujungnya yang negatif yang kelihatan. Terus saya salah lagi ....[]





## Kearifan Generasi Baru

**P**agi tadi, saya berdebat kecil dengan istri. Gara-garanya saya nyeletuk tentang kekhawatiran atas anak sulung saya, yang pada bulan ini sudah berumur selusin tahun itu. Di usia segitu, saya melihat dia belum cukup memunculkan tanda-tanda keterampilan sosial. Anaknya pemalu. Kalau bicara dengan orang lain, suaranya pelan sekali, padahal di rumah dia ceriwis tanpa henti.

Dia memang tidak punya masalah dalam pelajaran, baik ketika sekolah masih normal maupun selama pandemi ketika sekolah jadi daring begini. Bahkan, pada beberapa mata pelajaran tertentu ia tampak menonjol. Namun, pintar akademis saja tanpa keterampilan sosial? Aduh.

Bagi saya, itu memang mencemaskan. Bukan karena saya terpengaruh teori apa-apa atau termakan motivator mana, tetapi agaknya lebih karena egoisme saya sendiri. Saya orang yang sejak kecil sangat tergantung dengan kehidupan sosial. Lebih banyak mainnya daripada belajarnya, lebih banyak nongkrongnya daripada membacanya. Bukan jenis yang bandel-bandel amat sih, tapi tetap saja tak bisa menjalani waktu tanpa teman-teman di sekeliling saya.

Bahkan, semua itu berlanjut hingga umur terus menua. Boleh dikata, sebagian besar jalur penghidupan saya pun datang karena berkah pertemanan. Saya juga percaya, lebih enak menjalankan aktivitas

produktif bersama orang yang kapasitasnya biasa-biasa saja tetapi menyenangkan sebagai teman, ketimbang sama orang yang pintar tetapi menyebalkan.

Lebih dari itu, bahkan saya merasa bahwa teman-teman adalah bagian dari kehidupan utama saya. Boleh-boleh saja saya mengalami masa-masa susah semisal merasa tak punya otak dan tak punya duit, dan toh masih bisa bertahan. Tapi, tak punya teman? Wah, bakalan habislah saya.

“*Lho, sik! Bentar to, Pak!*” istri saya memotong. “Kamu kira sekarang ini siapa yang nggak cemas dengan kehidupan sosial anak-anak? Semua orang begitu juga kondisinya, kan?”

Saya tercenung. Oh iya ya, betul juga. Baik punya bakat sosial maupun tidak, baik yang anteng maupun yang ceriwis, anak siapa sekarang ini yang punya ruang untuk mengondisikan diri mereka dalam kehidupan sosial, lalu mengasah keterampilannya dalam bersosial?

Lihat saja, sekolah-sekolah ditutup, ruang-ruang kelas diboyong ke kotak-kotak Zoom atau bahkan ke halaman-halaman datar bernama grup WhatsApp. Sementara, sebagian besar manusia modern mengandalkan sekolah sebagai pembentuk kesadaran awal dalam bermasyarakat bagi anak-anak mereka. Model masyarakat mula-mula yang jadi referensi anak-anak di era kita adalah lingkungan sekolah. Itu dia.

Artinya, sekarang ini sebagian besar anak-anak kehilangan kehidupan bermasyarakat mereka. Betul, kan?

Apa? Bermasyarakat lewat Zoom dan Google Meet? Lalu menyimak teman-teman mereka tertawa hanya secara visual, dan karena fitur *mute*, lenyap sudah suara mereka? Atau bermasyarakat lewat grup WhatsApp, dan mengekspresikan *skill* interpersonal dengan emotikon yang itu pun biasanya dipencetkan oleh bapak-ibu mereka?

Rasanya itu semua agak *fals* untuk disebut *bermasyarakat*.

Tapi, “... semua orang begitu juga kondisinya, kan?” Potongan kalimat terakhir istri saya itu menyembul kembali dalam kepala saya. Ini sejenak menghentikan kelebat-kelebat kecemasan di dalamnya.

Ya, kalau semua anak pada zaman pandemi ini punya keterbatasan sosial, artinya anak saya tidak sendiri. Semua anak di Indonesia, bahkan di dunia, ya seperti itu. Walhasil, nantinya selepas pandemi, mereka akan berada pada tingkatan yang kurang lebih sama dalam kemampuan pergaulan. Artinya, anak saya sendiri pun tidak perlu saya

cemaskan, karena dia tidak akan menghadapi satu lanskap dunia yang membuat dia tenggelam.

Ini jadi mirip-mirip perkara relativitas pada umumnya. Andai semua orang berbadan kurus, misalnya, maka sebenarnya semua orang gemuk juga. Sebab di dunia khayalan itu tidak ada pembandingan antara kurus dan gemuk. Andai semua orang cantik dan ganteng, pada hakikatnya semua orang jelek pula. Sebab selain masuk ke wilayah subjektivitas dan konstruksi sosial, soal ganteng dan jelek adalah perkara perbandingan.

Begitu pula, sekarang ini kita mengenal barang mewah, semisal jam tangan Rolex atau tas Hermes. Tapi, andai kita menghadapi sebuah dunia yang semua penghuninya tanpa terkecuali punya Rolex dan Hermes, lantas nilai benda itu ada di mana? Tidak di mana-mana.

Atau sebaliknya. Taruhlah semua orang di dunia ini miskin tanpa kecuali, dan berada dalam level kemiskinan yang sama. Kalau begitu, berarti semua orang juga kaya. Sebab, tak ada jenis kekurangan tertentu yang membuat kita melihat orang lain sebagai lebih miskin dibanding yang lainnya. Karena itu jugalah utopia komunisme pernah menjadi cita-cita jutaan orang, sebab ketidakbahagiaan akan datang bukan karena tidak tercapainya suatu strata kekayaan, melainkan karena mencoloknya kesenjangan.

Dan kita paham, kesenjangan adalah situasi ekstrem dari sebuah paket komparasi ketika ada orang tampak kaya sekali, sedangkan di sisi sebelah sana ada yang terlihat miskin sekali.

Maka, ketika gampangnya nanti gara-gara pandemi ini semua anak jadi bodoh, terutama pada perkara kecerdasan sosial, sebenarnya yang akan mereka hadapi adalah satu generasi yang sama-sama bodoh-sosial, bukan? Dan, karena dalam hal itu semua anak sama bodohnya maka pada hakikatnya semua anak juga sama pintarnya! Ah, ini agak menenangkan hati saya.

Di sisi lain, sebodoh apa pun anak-anak generasi pandemi, toh mereka telah mengenal instrumen komunikasi yang, seminimalis apa pun, tetap saja dapat digunakan sebisa-bisanya. Dari situ, saya tidak percaya dengan ketakutan munculnya *lost generation* gara-gara gelombang pandemi ini, sebagaimana pernah dilontarkan seorang pakar kepada salah seorang menteri.

*The lost generation* yang disebut-sebut sang pakar itu mengacu pada generasi pasca-Perang Dunia Pertama, ketika puluhan juta orang tewas,

puluhan juta lainnya terluka dan tak lagi bisa berbuat apa-apa, lalu puluhan juta sisanya kehilangan cita-cita.

Situasi seekstrem itu tidak terjadi pada masa pandemi ini. Sehancur apa pun kita, pertukaran informasi yang masif tetap terjadi, gagasan-gagasan baru terus diproduksi. Selebihnya, satu generasi anak-anak yang mengandalkan kotak-kotak Google Meet dan grup WhatsApp untuk berinteraksi itu akan beradaptasi, menciptakan kearifan zaman mereka sendiri.

Dan saya? Saya hanyalah angkatan tua renta yang terlalu meremehkan kekuatan anak-anak itu, mengukur mereka semata dengan standar saya, dan secara egois-naif membayangkan bahwa mereka seharusnya melanjutkan kehidupan sebagaimana generasi saya menjalankannya.

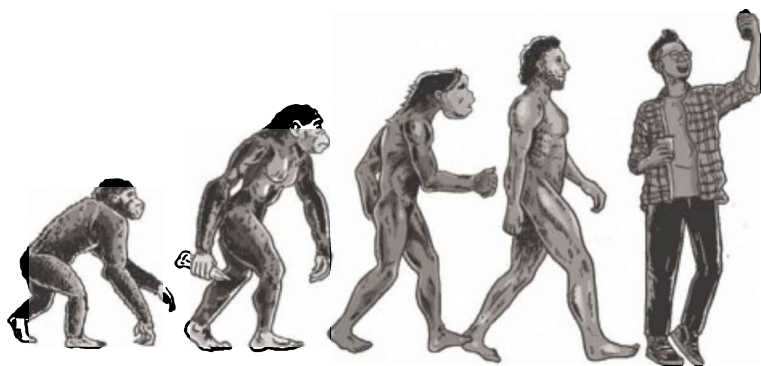
Itu membuat saya teringat sepotong obrolan Nicholas Carr dalam bukunya *Shallows* yang terkenal itu. Pada awalnya, kata Carr, jangan dikira peradaban kertas datang secara baik-baik saja. Di sela persetujuannya atas pencatatan pemikiran di lembar-lembar manuskrip, filsuf sedahsyat Socrates pun menyimpan keresahannya.

“Karena simbol menggantikan ingatan, tulisan mengancam akan membuat kita menjadi pemikir dangkal, sehingga kita tidak bisa mencapai kedalaman intelektual yang akan mengantarkan pada pengetahuan dan kebahagiaan sejati!” Begitu kata Socrates, sebagaimana dikisahkan oleh Plato, muridnya.

Bayangkan, Socrates melihat kertas-kertas, anak kandung peradaban pada generasi setelah dia, sebagai asal muasal kedangkalan berpikir!

Tapi kemudian kita tahu, pada 1445 Gutenberg beraksi, kapitalisme cetak pun dimulai. Lalu hingga lebih dari setengah milenium setelahnya, kertas-kertas justru menjadi sumber pengetahuan tertinggi. Kita pun akhirnya mengerti, bahwa kecemasan Socrates itu tak lebih dari kecemasan seorang tua produk zaman lama yang sedang meremehkan kemampuan anak-anaknya. Dan bisa jadi, saya pada hari ini tak lebih dari mengulang model kekhawatiran Socrates belaka.

Nah, masalahnya, terlalu ge-er juga kalau saya menyama-nyamakan diri dengan sang Filsuf pendobrak Athena hahaha![]



## Ruang-Ruang yang Tak Lagi Dicintai

**A** “yo sekalian ke Lombok, Om! Tinggal dikit lagi, tuuuh!” kata sahabat saya di Mataram, begitu dia tahu kami menyeberang dari Pelabuhan Padang Bai ke Nusa Penida. Dia juga tahu saya menyetir mobil sendiri dari Jogja sehingga mobilitas lebih mudah. Maksud dia, selepas dari Nusa Penida, kami bisa kembali ke Padang Bai, lalu langsung naik feri meluncur ke Lombok.

“Duh, belum sekarang, Pakde. Tahun depan kami mau *road trip* lagi, sampai NTT. Sekalian nanti mampir Mataram, deh,” jawab saya.

“Heh, ngawur!” sambar istri saya. “Tahun depan aku sudah ngajar *offline*. Anakmu sekolahnya juga sudah *offline*!”

Tiba-tiba, bayangan indah menginjak pedal gas menyusuri jalanan berdebu dari Sumbawa sampai Lembata itu punah seketika. *Offline!* Luring! Kata itu mendadak jadi menyebalkan. Seolah segala kemewahan yang kami nikmati akan segera dicabut hingga ke akar-akarnya.

Selama hampir sebulan terakhir, kami sekeluarga muter-muter di seujur Bali, berpindah-pindah titik sesuka hati. Banyak orang menuduh kami liburan sambil menghamburkan uang, padahal bukan itu yang terjadi. Kami juga bekerja dengan sangat sibuk. Ada banyak hari ketika kami sepenuhnya mendekam saja di penginapan. Anak saya harus sekolah daring, istri saya mengajar daring untuk para mahasiswanya,

saya sendiri pun belasan kali mengisi acara webinar dan kelas-kelas *online*.

Jenis pekerjaan kami memang sangat dimudahkan oleh ledakan budaya daring akibat situasi pandemi ini. Hingga pada satu titik, diam-diam kami membenci keterikatan pada ruang. Ruang fisik bukan lagi sesuatu yang penting untuk memapankan hati. Andai tidak ingat wajah Emak di kampung, ingin rasanya saya menjalani sisa hidup sebagai nomad yang tak merasa perlu punya domisili fisik bernama tanah dan rumah, hahaha.

Istri saya punya cerita lucu terkait lepasnya keterikatan pada ruang itu. Suatu siang, dia sedang menjalani ritual di altar Zoom-nya. Dalam sebuah dialog, seorang mahasiswanya memperkenalkan diri. “Saya Anu, Mbak. Rumah saya di Surabaya, tapi sekarang sedang ngekos di Bali.”

“Lho! Kok, ngekos di Bali? Orang Surabaya, kuliah di UGM Jogja, tapi ngekos di Bali? Itu gimana maksudnya?” tanya istri saya.

“Ya kepingin aja, sih, Mbak, hehehe,” sahut si Mahasiswa.

Saya sebenarnya ingin protes kenapa istri saya masih saja dipanggil “Mbak” oleh seorang mahasiswa yang sudah sangat pantas memanggilnya “Tante”. Tapi, itu kita bahas kapan-kapan saja. Yang lebih mendesak untuk dibicarakan adalah betapa absurdnya kelakuan si Mahasiswa itu. Sekali lagi: orang Surabaya, kuliah di sebuah kampus di Jogja, tapi indekos di Bali!

Lihat, betapa ruang-ruang fisik tak lagi sepenting dulu. Si Mahasiswa meninggalkan rumahnya yang di Surabaya itu untuk ngekos di Bali, agar lebih konsentrasi dalam menjalani kuliah “di” Jogja (kata “di” tentu harus saya beri tanda petik, bukan?).

Saya jadi membayangkan, kenangan masa kuliah seperti apa yang akan terbentuk dalam samudra nostalgia si Mahasiswa itu kelak, andai situasi ini berjalan hingga dia lulus?

Dia akan jadi alumnus UGM yang tak punya kenangan akan Lembah Hitam di Kampus Biru, tak punya kenangan makan nasi rames di Kantin Bonbin Fakultas Ilmu Budaya (yang memang sudah hilang itu), tak akan pula bisa mengenang tengah malam kelaparan lalu nongkrong sambil ngemil nasi sambal teri di angkringan. Dia akan jauh sekali dari kenangan sebagai mahasiswa UGM sebagaimana generasi kami merasakannya.

Kenapa saya menekankan tentang kenangan? Jangan salah, ini

bukan semata perkara sentimental. Ini ada kaitannya dengan harga properti.

Para penghuni Jogja baik yang asli maupun pendatang pasti tahu, betapa mahalnnya harga tanah di sekitar UGM. Bahkan, dalam radius sekian kilometer di sekelilingnya pun konon banyak lokasi yang harga tanahnya lebih mahal daripada pinggiran Jakarta sekalipun. Bahkan, mahalnnya tanah di area itu menyebar juga sampai spektrum yang lebih luas lagi, sampai ke sudut Jogja yang lebih pelosok lagi.

Kenapa bisa begitu? Jawabannya: karena kenangan.

Ya, kenangan ternyata menciptakan pergerakan harga tanah. Ini saya dengar dari seorang petapa yang *nyambi* jadi pengamat tentara. Saya menjumpainya pagi itu di Kuta, di sebuah rumah besar dengan pepohonan rimbun yang kadang jadi sarang ular sanca. Dia bilang, “Mau aku carikan tanah di Bali, Mas? Murah, lho. Ada yang lebih murah daripada di Bantul, malahan.”

Tentu saya kaget. Tanah di sebuah pulau yang setiap ceruknya bisa jadi vila itu lebih murah ketimbang di ketiak Jogja? Sulit dipercaya. Tapi, ternyata memang demikian adanya.

Gara-garanya, kata sang Petapa itu, banyak orang yang sukses di Jakarta itu alumni Jogja, khususnya UGM. Mereka jadi kaya raya di Ibu Kota, kebanyakan mereka muslim, dan pada masa pensiun mereka kepingin tetirah menikmati senja di kota yang tak banyak anjingnya, tapi juga membawa setrum-setrum kenangan masa muda. Kota manakah itu? Tentu saja bukan Bali, tapi Jogja!

Akibatnya, permintaan tanah di Jogja dari para borjuis Jakarta itu meledak. Agen dan mafia properti bertepuk tangan. Harga stabil merayap dalam grafik menanjak, terus menanjak, sampai-sampai pernah ada hitungan logis bahwa anak-anak muda Jogja selain anak Sultan Hamengkubuwono mustahil bisa punya rumah di kota kelahiran mereka.

Nah, sampai di sini mulai jelas, betapa kenangan adalah amunisi pemasaran yang bagus untuk bisnis properti. Lalu, apa yang akan terjadi nanti ketika potensi munculnya kenangan itu terus berkurang, seiring berlanjutnya kuliah daring yang menyebabkan satu keajaiban dunia semacam “anak Surabaya yang jadi mahasiswa UGM, tapi ngekos di Bali”? Para orang sukses baru di Jakarta tak akan punya kenangan tentang Jogja, tak punya nostalgia apa pun tentang Jogja. Sebab, romantisme masa kuliah mereka berceceran di banyak kota dan desa

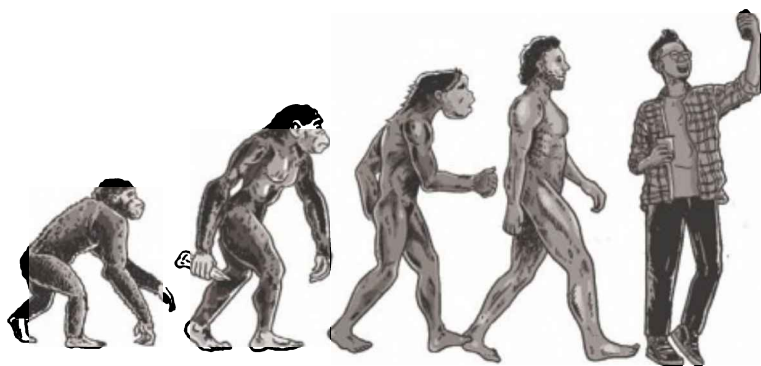
tempat mereka bisa indekos semau-maunya.

Sama dengan Anda, saya pun ingin wabah ini segera berakhir. Tapi, jujur saja saya berdoa agar tradisi daring terus berlanjut, membuat kita lepas dari romantisme atas ruang-ruang fisik. Agar harga tanah di Jogja kembali wajar, agar anak-anak muda seumuran keponakan saya bisa punya rumah di kota kelahiran mereka, dan jujur saja agar saya bisa terus jalan-jalan sebagai pengelana yang sebenarnya tak pernah berhenti bekerja.

Tapi ngomong-ngomong, anu, saya menuliskan ocehan ini di kamar saya yang berdebu di sudut Bantul. Malam tadi akhirnya kami “pulang”. Kata “pulang” saya beri tanda petik. Sebab, saya mulai merasa bahwa saya kembali ke Bantul bukan karena kecintaan pada rumah saya, bukan karena keterikatan sentimental pada ruang fisik atau bidang tanah tempat tinggal saya, tetapi semata karena kangen Emak dan khawatir dengan nasib kelinci-kelinci saya.

Sembari melepas rindu kepada Emak, saya menata rencana untuk *pulang ke jalanan* lagi. Mungkin bulan depan. Mungkin tahun depan.[]





## B Aja, Tak Lagi Istimewa

**S**aya merancang kalimat-kalimat awal ini sambil rebahan di samping anak laki-laki saya. Umurnya 4 tahun, baru sebulan lalu dia meniup lilin ulang tahunnya. Tangan-tangan mungilnya sedang mengutak-atik dua mainan. Satu mobil-mobilan *van* berwarna biru, satu lagi berbentuk ekskavator yang lebih gede. Kuning, warnanya.

Dua mainan itu dia dapatkan setelah merengek beberapa jam kepada ibunya, gara-gara melihat sepupunya punya mainan serupa. Sementara itu, anak saya sejak dulu sangat terobsesi dengan mainan kendaraan, hasil ketekunan menonton saluran YouTube Blippi, MonsterJamLord, dan TwentyTrucks.

Awalnya saya malas menuruti keinginan anak saya itu. *Pertama*, karena konon menuruti keinginan anak dengan terlalu gampang itu tidak baik dan tidak mendidik. Setidaknya, begitulah kata para ayah-bunda pakar *parenting* itu. *Kedua*, karena tampaknya mainan-mainan itu mahal. Bentuknya memang keren, bahannya dari logam.

Akan tetapi, dugaan saya salah. Ketika istri saya menengok *marketplace*, mainan semacam itu ternyata cuma seharga tiga puluh ribuan. Segeralah muncul dalam imajinasi saya akan potensi komentar-komentar *netizen*, semacam, “Ya ampuuun, harga segitu lebih murah ketimbang dua bungkus rokokmu! Jadi, kamu lebih mementingkan rokok daripada kegembiraan anakmu?”

Karena saya tak ingin ada survei viral lagi yang mengatakan bahwa sekian juta laki-laki Indonesia menelantarkan anak demi rokok, akhirnya saya pun bilang ke istri saya, “Ya udah, beli aja.” Lagi pula, saya tidak mungkin bisa konsen menulis kalau terus-terusan mendengar regekan anak saya.

Akhirnya, mainan itu sekarang ada dalam genggamannya. Satu proses yang sangat mudah, terlalu mudah. Apalagi dipermudah dengan proses pembeliannya via *marketplace* yang nyaris tanpa usaha: sambil duduk saja, tanpa perlu menggeser pantat, tahu-tahu tiga hari kemudian barang sudah nongol di depan mata. Sungguh satu situasi yang tiba-tiba memunculkan kekhawatiran baru di benak saya.

Mainan milik anak saya sudah bertumpuk-tumpuk di sudut sana, sekaligus tersebar di mana-mana. Itu baru yang berbentuk kendaraan, belum yang robot dan *superhero*. Waktu ulang tahun kemarin, karena kakaknya menata pesta ultah adiknya dengan tema Spiderman, semua saudara yang datang membawa kado bertema Spiderman juga. Akhirnya, rumah saya diserbu dari segala sisi oleh puluhan ekor Spiderman.

Nah, seminggu kemudian, apa yang terjadi? Ya, anak saya hanya fokus pada satu dua biji Spiderman-nya. Yang lain-lain diabaikan begitu saja, bahkan beberapa hari kemudian yang dua biji itu pun ditinggalkannya.

Begitu mudahnya anak saya, juga mungkin semua anak zaman sekarang, mengakses mainan-mainan itu. Segalanya begitu murah. Banjir produk di pasar *online* membuatnya semakin murah dan semakin murah. Sangat sedikit di antara mainan anak saya itu yang harganya di atas seratus ribu. Dan karena murah, semuanya mudah didapat. Dan karena mudah didapat, jumlahnya jadi terlalu banyak. Dan karena jumlahnya terlalu banyak, tak ada lagi yang spesial di antara mereka.

Ini situasi psikologis yang mirip dengan cerita tentang kelinci-kelinci milik anak perempuan saya. Pada awalnya, setelah kami belikan sepasang kelinci berwarna putih dan cokelat, keduanya memproduksi beberapa anak. Semuanya diberi nama oleh anak perempuan saya. Ada Choco, Petches, Peanut, dan nama-nama bule lainnya.

Pada generasi pertama itu, setiap bayi yang lahir adalah kebahagiaan, dan setiap kematian adalah tangisan. Tiap kali ada kelinci yang sakit atau menyendiri mogok makan, saya tahu bahwa esok paginya saya harus menyiapkan diri untuk memeluk anak saya yang pasti akan terisak-isak sambil berendam air mata.

Tetapi, sekarang peta politik sudah berbeda. Sepasang kelinci itu sudah beranak pinak, bercucu cicit, dan kawin-mawin antarsaudara. Dari yang semula 2 menjadi 8, dari 8 menjadi 19, dari 19 menjadi 27. Pada satu tahap generasi, akhirnya anak saya tak lagi memberi mereka nama. Mungkin karena bosan dan kehabisan ide nama, saking banyaknya. Dan karena tak lagi bernama, mereka tak lagi istimewa.

Sejak itu, untuk anak saya, kematian kelinci-kelinci bukan lagi jadi sesuatu yang akan dia tangisi. Peristiwa lepasnya nyawa dari tubuh-tubuh mungil itu bukan lagi putusnya sebuah relasi, tercabiknya kenangan dan kedekatan batin, apalagi hancurnya cita-cita bersama akan masa depan, melainkan semata berhentinya aktivitas sel-sel organisme. Kematian-kematian itu sekarang menjadi nirmakna.

Persis di sini saya jadi paham kenapa Stalin berkata, “Satu kematian adalah tragedi, sejuta kematian adalah statistik.” Sekaligus saya akhirnya juga mengerti kenapa para korban kamp konsentrasi Auschwitz konon hanya disebut dengan nomor-nomor dan bukan nama, yaitu untuk melenyapkan kemungkinan tumbuhnya rasa iba dalam diri para eksekutor yang akan melihat bakal korban-korbannya sebagai sesama manusia.

Ah, tapi saya tidak hendak bicara tentang kematian. Sudah terlalu jenuh kita mendengar dan membincangkan kematian-kematian. Yang mau saya sampaikan hanyalah betapa arus zaman ini membawa kemudahan-kemudahan yang keterlaluan kepada kita. Dan karena saking gampang, saya ulangi, tak lagi banyak hal yang bisa kita tempatkan sebagai sesuatu yang istimewa.

Bukan cuma tentang mainan-mainan, atau produk apa pun yang sekarang bisa kita dapatkan dengan harga yang tidak perlu membuat dompet kita kembang kempis. Namun, juga tentang informasi, berita, juga kabar-kabar.

Waktu ronda malam Minggu lalu, Mas Dayat, anggota Brimob yang teman satu grup saya, bercerita kalau dia habis ikut menengok pabrik pil koplo terbesar se-Indonesia yang baru saja digerebek polisi itu. Jarak pabrik itu cuma enam kilo dari rumah saya. Ketika mendengar cerita itu, saya cuma manggut-manggut. Biasa saja, rasanya. Entah kenapa kabar yang seharusnya menghebohkan itu tidak lagi mampu membuat saya ternganga. Bahkan, ketika Senin pagi penggerebekan itu dikabarkan di media-media *online*, saya pun malas membaca detailnya.

Meskipun itu berita besar, sudah seberapa sering kita mendengar berita tentang kasus narkoba pada zaman sekarang? Sering sekali.

Ekspansi narkoba memang kian merangsek ke mana-mana. Tapi, lebih daripada itu, ruang tanpa batas di medan *online* membuat semua berita mendapat tempat, tidak terganjal keterbatasan halaman-halaman kertas. Apa yang puluhan tahun sebelumnya tidak kebagian jatah tayang, sekarang jadi lebih mudah masuk lembar tayang.

Hasilnya, berita-berita itu memberondong sedemikian banyaknya. Bosan, saya. Pasti begitu pula Anda.

Bandingkan dengan dulu ketika saya SD. Bukan berita narkoba, sih, tapi saat itu tersebar berita ada seekor ular berkepala kuda. Pada zaman tatkala persebaran berita belum begitu mudahnya, ribuan orang langsung mendatangi Kampung Brajan, tiga kilo dari sekolah saya. Berita itu jadi sangat istimewa.

Belum lagi ketika beredar kabar seekor ayam yang disembelih sampai putus kepalanya, tapi tetap hidup dan mengeluarkan suara kokoknya, sepulang sekolah teman-teman saya langsung bersepeda menuju TKP di dekat Jalan Lingkar Barat Jogja. Atau, ketika kuburan di Kampung Jogonalan dibongkar dan jenazah di dalamnya masih utuh, ratusan orang menggeruduk makam itu untuk berebut lebih dulu mencatat tanggal kematian jenazah itu, lalu membeli nomor togel yang sesuai dengan angka-angka itu. Segalanya sungguh terasa istimewa.

Sekarang, sekali saja saya buka koran *online* isinya sungguh tak terasa ada yang istimewa. Selain narkoba, juga banyak lagi yang terasa klise. Pembunuhan? Korupsi? Perdebatan para tokoh politik? Berita tentang indeks kepercayaan yang rendah kepada anggota DPR? Kepala daerah (yang agaknya pada mau nyapres itu) yang berkeliling untuk memantau pelaksanaan vaksinasi? Di mana istimewanya? Tak ada lagi yang istimewa.

Semakin gampang kita mendengarnya, semakin sering kabar-kabar itu melintas di layar HP kita, semakin kita sulit untuk meletakkannya pada posisi istimewa.

Hari-hari esok kita mungkin adalah hari-hari yang murung, karena semakin tidak gampang bagi kita untuk menemukan lagi hal-hal yang istimewa. Persis sebagaimana anak saya saat melirik tumpukan mainannya.[]

# Tentang Penulis

**Iqbal Aji Daryono** adalah penulis kolom bertema sosial dan budaya di sejumlah media. Berpengalaman sebagai pengguna media sosial penuh waktu, Iqbal senang berbagi baik kegelisahan maupun kegelianya terhadap perilaku manusia pada era digital ini. Saat ini Iqbal aktif sebagai penulis, mentor kepenulisan, dan spesialis media sosial di IAD Consulting.

Iqbal dapat disapa di akun-akun medsosnya:

Iqbal Aji Daryono

[iqbal.aji.daryono](#)

[iqbal\\_daryono](#)

**"Pernah tersesat karena lebih percaya Google Maps ketimbang tanya warga lokal?"**

**"Pernah merasa mati gaya karena internet *down* semalaman?"**

**"Pernah tergopoh-gopoh keluar kamar mandi demi menyambut kurir paket?"**

Era digital menawarkan kemudahan. Namun, era ini juga merenggut banyak kemampuan dan kebebasan kita. "Manusia" dalam diri ini terkikis bahkan nyaris lenyap. Akibatnya, perilaku manusia dalam berkomunikasi dan bersosialisasi turut berubah, yang dariacamata akal sehat, jadi tampak konyol. Membaca buku ini menyadarkan kita betapa kocaknya polah tingkah manusia pada era digital. Dan percayalah, tidak ada yang lebih nikmat selain tertawa sekaligus tertohok.

"Kita senang dengan gaya tulisannya yang jenaka, tapi juga jengkel karena kritiknya tentang ironi masyarakat digital banyak benarnya."

—**Nezar Patria**, wartawan senior

"...merontokkan sekat sumbatan kaku berkomunikasi pada era digital."

—**Teguh Arifiyadi**, "pengendali tata kelola internet", Kementerian Kominfo RI

"Ide-ide besar yang lahir dari renungan serius disajikan dengan sangat renyah."

—**Abdul Gaffar Karim**, pengamat politik Universitas Gadjah Mada

"Iqbal membawa kita dalam pengalaman yang cukup personal dan sehari-hari, tapi menyentil."

—**Irham Nur Anshari**, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada

#SaplensdiUjungTanduk

@bentangpustaka

@bentangpustaka

Bentang Pustaka

Info Bentang Pustaka

